



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
kemdikbud.go.id

Komplek Kemendikbudristek
Jl. Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta 10270

Telp.
(021) 5731177



LAPORAN KINERJA

2023



fb.com/kemdikbud.ri



instagram.com/kemdikbud.ri



twitter.com/Kemdikbud_RI



KEMENDIKBUD RI



www.kemdikbud.go.id



Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020–2024 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang dilaksanakan oleh 9 Unit Eselon I dan 352 unit kerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023. Laporan Kinerja Kemendikbudristek tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Kemendikbudristek serta menetapkan rencana aksi ke depan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang telah diidentifikasi selama tahun 2023.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan serta menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan program dan anggaran, peningkatan tata Kelola Kemendikbudristek, serta peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Kemendikbudristek Tahun 2023.

Jakarta, Februari 2024
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

Nadiem Anwar Makarim



Daftar Isi



i
ii
iii
x
xiv
xv

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Singkatan
Ikhtisar Eksekutif
Permasalahan Umum
Langkah Antisipasi



BAB I Pendahuluan

Latar Belakang 2
Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi 4
Struktur Organisasi 5
Isu Strategis 6
Peran Strategis 7



9
10
12
13
14

BAB II Perencanaan Kinerja

Visi, Misi, dan Tujuan
Matriks Kinerja
Perjanjian Kinerja 2023
Alokasi Anggaran 2023
Program Prioritas



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kebijakan 18
Pengukuran Kinerja 19
Capaian Kinerja 20
Realisasi Anggaran 93
Efisiensi Anggaran 94
Inovasi 95
Penghargaan 100
Collaborative dan Crosscutting Program 102



107
108

BAB IV Penutup

Ringkasan Kinerja
Langkah Kerja ke Depan



Lampiran

Pernyataan Telah Direviu 110
Perjanjian Kinerja 2023 (Awal) 111
Perjanjian Kinerja 2023 (Revisi) 115
Pengukuran Kinerja 2023 119

Daftar Singkatan

#

3T : Tertinggal, Terluar, Terdepan/Daerah Perbatasan

A

ACT	: <i>American College Testing</i>
ADEM	: Afirmasi Pendidikan Menengah
ADik	: Afirmasi Pendidikan Tinggi
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
AKM	: Asesmen Kompetensi Minimum
AKS	: Angka Kesiapan Sekolah
AN	: Asesmen Nasional
ANBK	: Asesmen Nasional Berbasis Komputer
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APE	: Alat Peraga Edukatif
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ARPS	: Anak Rentan Putus Sekolah
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ATS	: Anak Usia Sekolah Tidak sekolah
ARPS	: Anak Rentan agar tidak Putus Sekolah

B

BA	: Bustanul Athfal
BAN	: Badan Akreditasi Nasional
BAN-PT	: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BB	: Belum Berkembang
BBGP	: Balai Besar Guru Penggerak
BBPMP	: Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan
BBPMPV	: Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi

BGP	: Balai Guru Penggerak
BIM	: Beasiswa Mahasiswa Maju
BIPA	: Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
BKII	: Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional
BKHM	: Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
BKK	: Bursa Kerja Kursus
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMN	: Barang Milik Negara
BO	: <i>Back Office</i>
BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOPTN	: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BOSP	: Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
BPI	: Beasiswa Pendidikan Indonesia
BP PAUD dan Dikmas	: Badan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPMP	: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
BPNB	: Balai Pelestarian Nilai dan Budaya
BPP Bahasa	: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
BPPMPV	: Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPTI	: Balai Pengembangan Talenta Indonesia
BSB	: Berkembang Sangat Baik
BSH	: Berkembang Sesuai Harapan
BSKAP	: Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan

C

CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
CB	: Cagar Budaya
CDIs	: <i>Culture Development Indicators</i>
CEO	: <i>Chief Executive Officer</i>
CIBI	: Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa
CLC	: <i>Community Learning Centre</i>
COE	: <i>Center of Excellence</i>
Covid	: <i>Coronavirus Disease</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>



D

DAK	: Dana Alokasi Khusus
Dapobud	: Data Pokok Kebudayaan
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
Dikdas	: Pendidikan Dasar
Dikmas	: Pendidikan Masyarakat
Dikmen	: Pendidikan Menengah
Diksus	: Pendidikan Khusus
Dikti	: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Diktiristek	: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen Vokasi	: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
DOAJ	: <i>Directory Open Access Journal</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUDI	: Dunia Usaha dan Dunia Industri
DUDIKA	: Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja
Dukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

E

EMIS	: <i>Education Management Information System</i>
------	--------------------------------------------------

F

FO	: <i>Front Office</i>
----	-----------------------

G

GTK	: Guru dan Tenaga Kependidikan
GSMS	: Gerakan Seniman Masuk Sekolah
GSS	: Gerakan Sekolah Sehat

H

HI	: Holistik Integratif
----	-----------------------



I

ICH	: <i>Intangible Cultural Heritage</i>
IELTS	: <i>International English Language Testing System</i>
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
ILM	: Iklan Layanan Masyarakat
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
IKU	: Indikator Kinerja Utama
INAP	: <i>Indonesia National Assesment Program</i>
IT	: <i>Information Technology</i>
Itjen	: Inspektorat Jenderal
IPK	: Indeks Pembangunan Kebudayaan
IPV	: Instrumen Penilaian Visitasi
IKM	: Implementasi Kurikulum Merdeka
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKBI	: Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia
IISMA	: <i>Indonesian International Student Mobility Awards</i>
ISEC	: <i>Indonesian Student Entrepreneur Camp</i>

K

K3SD	: Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar
K3TK	: Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak
KBM	: Kegiatan Belajar Mengajar
Kemen PAN-RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepmen	: Keputusan Menteri
KI	: Kekayaan Intelektual
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KM	: Kampus Mengajar
KMB	: Kurikulum Merdeka Belajar
KMI	: Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia
KNB	: Kemitraan Negara Berkembang
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KSS	: Kampanye Sekolah Sehat

L

LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan
LKE	: Lembar Kerja Evaluasi
LLDIKTI	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
LMS	: <i>Learning Management System</i>
LoA	: <i>Letter of Acceptance</i>
LPMP	: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPTK	: Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

M

MB	: Mulai Berkembang
MA	: Madrasah Aliyah
MBKM	: Merdeka Belajar Kampus Merdeka
MBS	: Manajemen Berbasis Sekolah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MKKS	: Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MoLK	: Monitoring Laporan Keuangan
MP	: <i>Major Program</i>
MSIB	: Magang Studi Independen Bersertifikat
MSBP	: Modul Sosial Budaya dan Pendidikan
MTN	: <i>Medium Term Notes</i>
MOOC	: <i>Massive Open Online Course</i>
MTS	: Madrasah Tsanawiyah

N

NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NISN	: Nomor Induk Siswa Nasional
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPSN	: Nomor Pokok sekolah Nasional

O

ODCB	: Objek yang Diduga Cagar Budaya
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OPK	: Objek Pemajuan Kebudayaan

P

P2MW	: Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha
P3TV	: Program Penguatan Perguruan Tinggi Vokasi
P4TK	: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAN-RB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Pauddasmen	: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
PBD	: Perencanaan Berbasis Data
PBL	: <i>Problem Based Learning</i>
PDD	: Program Studi Diluar Domisili
Permendikbudristek	: Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
PGB	: Program Guru Belajar
PGP	: Pendidikan Guru Penggerak
PHLN	: Pinjaman Hibah Luar Negeri
PIP	: Program Indonesia Pintar
PIPK	: Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
PISA	: <i>Programme for International Student Assessment</i>
PK	: Pusat Keunggulan
PKB	: Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
PKG	: Pengukuran Kompetensi Guru
PKK	: Pendidikan Kecakapan Kerja
PKN	: Pekan Kebudayaan Nasional
PKM	: Program Kreativitas Mahasiswa
PKW	: Pendidikan Kecakapan Wirausaha
PMM	: Platform Merdeka Belajar
PMM	: Pertukaran Mahasiswa Merdeka
PMPRB	: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PMPZI	: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNF	: Pendidikan Non Formal
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
POS AN	: Prosedur Operasional Standar Asesmen Nasional
PPA	: Penilaian Prasyarat Akreditasi
PP PAUD dan Dikmas	: Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
PPDB	: Penerimaan Peserta Didik Baru

PPG	: Pendidikan Profesi Guru
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPK	: Penguatan Pendidikan Karakter
PPK Ormawa	: Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan
PPL	: Praktik Pengalaman Lapangan
PSDKU	: Program Studi Diluar Kampus Utama
PT	: Perguruan Tinggi
PTDN	: Perguruan Tinggi Dalam Negeri
PTLN	: Perguruan Tinggi Luar Negeri
PT Vokasi	: Perguruan Tinggi Vokasi
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
PTPPV	: Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi
PUI PT	: Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pusaka	: Pekan untuk Sahabat Karakter
Pusmendik	: Pusat Asesmen Pendidikan
Puspresnas	: Pusat Prestasi Nasional

R

RA	: Raudatul Athfal
RB	: Reformasi Birokrasi
RBI	: Reformasi Birokrasi Internal
Renstra	: Rencana Strategis
RI	: Republik Indonesia
RKAS	: Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RKB	: Ruang Kelas Baru
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPBL	: Rekognisi Pembelajaran Lampau

S

SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sarpras	: Sarana dan Prasarana
SAT	: <i>Scholastic Aptitude Test</i>



SBMPTN	: Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SBSN	: Surat Berharga Syariah Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SDLB	: Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEA PD on ECCE	: <i>Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education</i>
Sertikom	: Sertifikasi Kompetensi
Setjen	: Sekretariat Jenderal
SILN	: Sekolah Indonesia di Luar Negeri
SIMKeu	: Sistem Informasi Monitoring Keuangan
SK	: Sasaran Kegiatan
SKM	: Survei Kepuasan Masyarakat
SLA	: <i>Service Level Agreement</i>
SM	: Sekolah Menengah
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMLB	: Sekolah Menengah Luar Biasa
SMALB	: Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	: Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SNMPTN	: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SNP	: Standar Nasional Pendidikan
SMS	: Sangiran Masuk Sekolah
SP	: Sasaran Program
SPAB	: Satuan Pendidikan Aman Bencana
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPI	: Satuan Pengawasan Internal
SIPI	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SS	: Sasaran Strategis
SSS	: <i>Stakeholders Satisfaction Survey</i>
Sulingjar	: Survei Lingkungan Belajar
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional

T

Tefa	: <i>Teaching Factory</i>
TK	: Taman Kanak-Kanak
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKG	: Tunjangan Khusus Guru

TKLB	: Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TOEFL	: <i>Test of English as a Foreign Language</i>
TPA	: Tes Potensi Akademik
TPG	: Tunjangan Profesi Guru

U

UAPPA	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I
UAPA/B	: Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang
UKBI	: Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
UKMPPG	: Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru
UKS	: Usaha Kesehatan Sekolah
UKT	: Uang Kuliah Tunggal
ULT	: Unit Layanan Terpadu
UMP	: Upah Minimum Provinsi
UN	: Ujian Nasional
UPT	: Unit Pelayanan Teknis
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
USB	: Unit Sekolah Baru
UU	: Undang-Undang

W

WBTB	: Warisan Budaya Tak Benda
WMK	: Wirausaha Merdeka
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

Y

YME	: Yang Maha Esa
-----	-----------------

Z

ZI	: Zona Integritas
ZI-WBK/WBBM	: Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



Capaian Kinerja 2023

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Ikhtisar Eksekutif



Rata-Rata

Capaian

110,33

Rata-rata dari capaian 20 IKSS yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja tahun 2023

11 IKSS

Capaian >100%

2 IKSS

Capaian =100%

7 IKSS

Capaian <100%

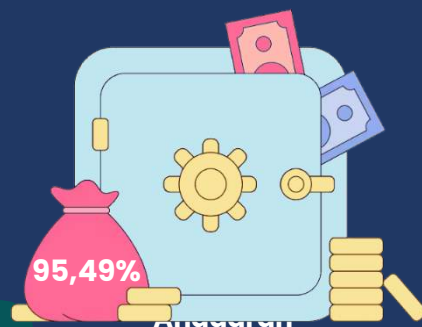
Kinerja Anggaran 2023

Pagu Anggaran

Rp 84.527.635.111.000

Realisasi Anggaran

80.714.414.470.938



Sumber Data : OmSpan Kemenkeu 19 Februari 2024



SS 1

Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang

Angka Kesiapan Sekolah

101,26% Target 75,59
Realisasi 76,54

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
7-12 Tahun

99,84% Target 99,32
Realisasi 99,16

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
13-15 Tahun

99,75% Target 96,34
Realisasi 96,10

Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat

93,04% Target 92,80
Realisasi 86,34

Angka Partisipasi Kasar (APK)
Pendidikan Tinggi

98,62% Target 31,89
Realisasi 31,45

SS 2

Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang

Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD

100,00% Target 0,52
Realisasi 0,52

Proporsi Peserta Didik Yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum Dalam Asesmen Kompetensi Minimum (Literasi)

114,52% Target 59,49
Realisasi 68,13



Proporsi Peserta Didik Yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum Dalam Asesmen Kompetensi Minimum (Numerasi)

138,17%Target **45,24**Realisasi **62,51**

Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik

110,10%Target **30,00**Realisasi **33,03**

Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional

107,90%Target **48,83**Realisasi **52,69**

Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya

178,54%Target **5,50**Realisasi **9,82**

Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan Dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP

106,40%Target **45,00**Realisasi **47,88**

Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1,2x UMP)

156,20%Target **20,00**Realisasi **31,24****SS 3****Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**

Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia

117,43%Target **75,00**Realisasi **88,07**

Indeks Pembangunan Kebudayaan

90,08%Target **61,20**Realisasi **55,13**

SS 4

Meningkatnya Kontribusi Perguruan Tinggi Terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan

Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat

87,48%

Target 86.500
Realisasi 75.669

SS 5

Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek

100%

Target WTP
Realisasi WTP*

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek

104,45%

Target 83
Realisasi 86,70

*IKSS ini masih menggunakan hasil capaian tahun 2022, karena hasil tahun 2023 belum diterbitkan.

Predikat SAKIP Kemendikbudristek

99,44%

Target A
Realisasi BB

Indeks Reformasi Birokrasi

103,44%

Target 81,00
Realisasi 83,79

Permasalahan Umum

- 1 Belum meratanya sebaran satuan pendidikan khususnya di daerah 3T, serta belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai di setiap satuan pendidikan;
- 2 Masih terdapat lembaga kebudayaan yang belum terstandarisasi;
- 3 Masih terdapat banyak jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang belum mendapatkan rekognisi internasional dan belum dapat diterapkan di masyarakat;
- 4 Hasil evaluasi tahun sebelumnya, masih belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Langkah Antisipasi

- 1 Memanfaatkan anggaran DAK Fisik dan sumber pendanaan lainnya (SBSN, PHLN) untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan di setiap jenjang;
- 2 Melakukan sosialisasi tentang mekanisme penetapan WBTB yang mencakup tata cara pengusulan, sampai pelestariannya guna meningkatkan pemahaman terhadap sistem Data Pokok Kebudayaan;
- 3 Mendorong Perguruan Tinggi untuk meningkatkan penelitian yang dapat dipublikasikan di tingkat internasional serta penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat;
- 4 Mendorong satuan kerja agar melakukan dialog kinerja dalam menetapkan target kinerjanya.

BAB I

Pendahuluan



Latar Belakang
Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi
Struktur Organisasi
Isu Strategis
Peran Strategis

Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan tahun keempat periode Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek. Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2023, Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek mengacu pada program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RKP tersebut, yakni mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tahun 2023 dalam pembangunan SDM, Kemendikbudristek terus berupaya untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Dukungan Kemendikbudristek terhadap pembangunan SDM tidak hanya terbatas pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi menciptakan SDM yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif dan selalu siap bekerja sama melalui pengarusutamaan kebudayaan. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu harus juga disertai dengan pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi memajukannya dengan cara mencerdaskan dan mendamaikan, sebagaimana visi Kebudayaan Indonesia 2020-2040 hasil dari Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, yakni “Indonesia Bahagia Berlandaskan Keanekaragaman Budaya yang Mencerdaskan, Mendamaikan, dan Menyejahterakan”. Kemendikbudristek terus berinovasi dan berupaya agar sistem pendidikan yang ada dapat menghasilkan SDM berkompeten yang dibutuhkan di masa depan di kancah global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Hal ini selaras dengan visi Kemendikbudristek, yaitu menciptakan Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Dengan semangat Merdeka Belajar yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Kemendikbudristek senantiasa berikhtiar membawa perubahan terhadap pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan SDM Unggul yang berkarakter Pancasila dan berdaya saing global untuk memajukan Indonesia. Semangat merdeka belajar berarti menekankan murid, guru, orang tua, satuan pendidikan, daerah, komunitas pendidikan, yayasan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri serta pelaku pendidikan lainnya sebagai aktor yang otonom dan berdaya. Pelaku pendidikan berdaya mengembangkan praktik-praktik baik pembelajaran, manajemen pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan yang perlu diperkuat dan ditularkan ke seluruh ekosistem pendidikan sehingga membentuk pembelajaran yang berkualitas.

Laporan Kinerja Kemendikbudristek tahun 2023 ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yakni menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang berlandaskan asas akuntabilitas.



Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006**
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014**
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021**
tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- d. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022**
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022**
tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- f. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014**
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- g. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang**
Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
- h. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022**
tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- i. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022**
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbudristek.

Tugas



Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.



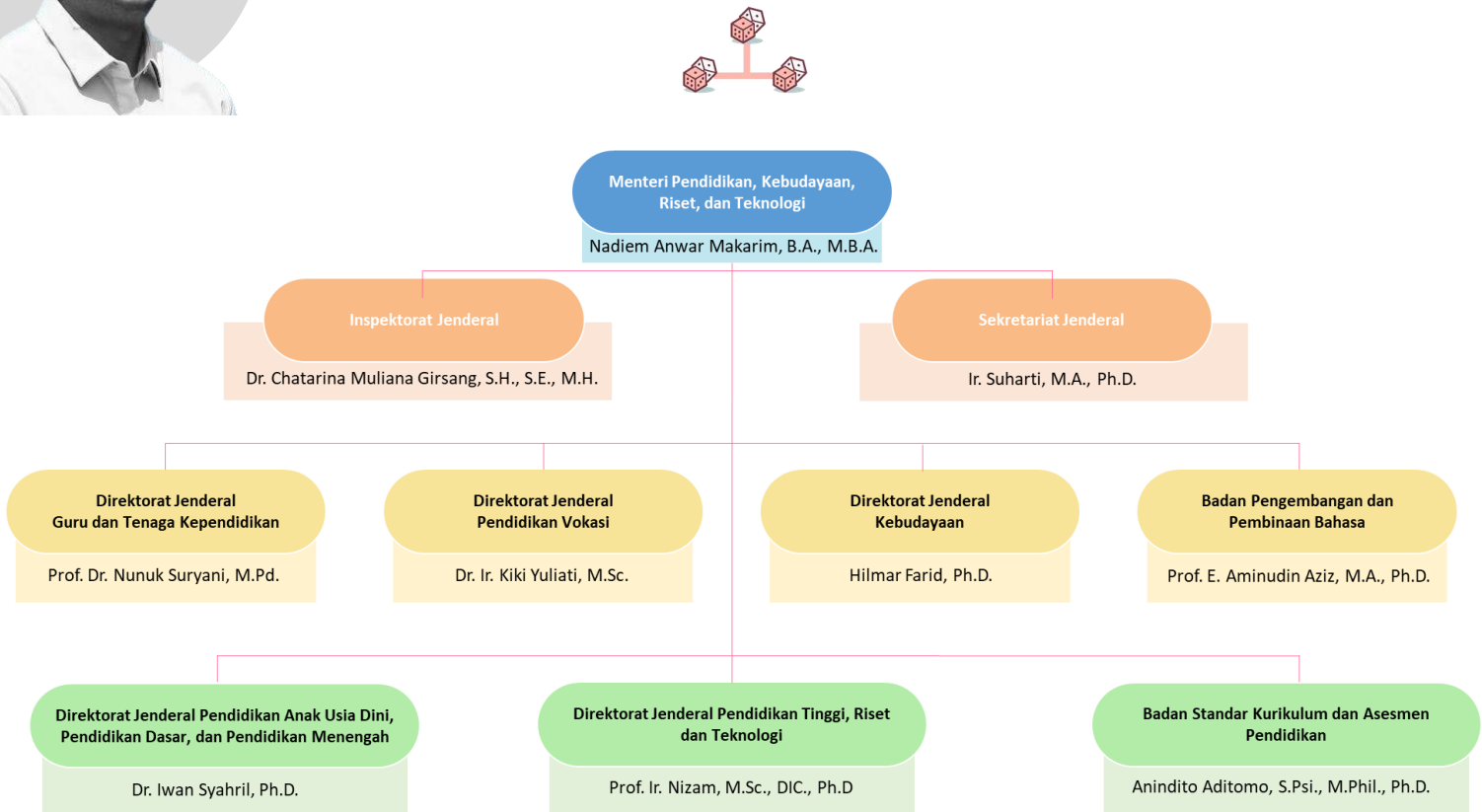
Fungsi

- 1** Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan;
- 2** Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3** Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- 4** Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
- 5** Penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan;
- 6** Penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- 7** Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- 8** Pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- 9** Pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan kebudayaan;
- 10** Pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- 11** Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- 12** Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- 13** Pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
- 14** Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di daerah;
- 15** Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- 16** Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- 17** Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
- 18** Pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian.





Struktur Organisasi

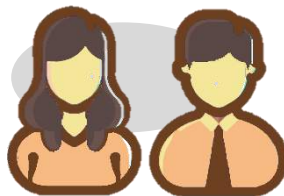


Sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden dan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi tersebut terdistribusikan dengan baik, Kemendikbudristek menetapkan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



9

Unit Organisasi Eselon I



120.525 orang

Total Pegawai Kemendikbudristek per 15 Desember 2023



352

Unit Kerja



Isu Strategis



- 1 Optimalisasi angka partisipasi pendidikan yang cenderung stagnan diseluruh jenjang melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta tidak lupa pihak swasta dan masyarakat, serta melalui pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah dan bagi peserta didik dari daerah 3T;
- 2 Implementasi pemanfaatan hasil asesmen nasional oleh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan lingkungan belajar yang kondusif;
- 3 Optimalisasi relevansi serta keterserapan lulusan di dunia usaha dan dunia industri melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- 4 Optimalisasi dan peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas hasil pembelajaran serta dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas serta dapat diterapkan oleh masyarakat;
- 5 Implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan
- 6 Optimalisasi pengembangan kosakata bahasa Indonesia, pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas, melakukan revitalisasi bahasa daerah untuk melestarikan bahasa daerah terutama bahasa daerah yang kritis dan terancam punah, serta memproyeksikan tantangan bahasa Indonesia di tingkat global;
- 7 Optimalisasi perlindungan dan pengembangan budaya serta tradisi sejarah dan kearifan lokal;
- 8 Koordinasi dan kolaborasi secara berjenjang, selaras dan berkesinambungan baik di internal Kemendikbudristek maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, swasta dan peran serta masyarakat dalam rangka berkontribusi dalam meningkatkan kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- 9 Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan, serta menyiapkan program/bantuan Pendidikan secara tepat sasaran dan melalui tri dharma perguruan tinggi.



Peran Strategis

- 1 Menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila;
- 2 Mewujudkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bermutu bagi seluruh peserta didik yang berkeadilan dan bersifat inklusif;
- 3 Mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan berpusat pada pengembangan kompetensi peserta didik, serta didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang memadai;
- 4 Mendorong peningkatan produktivitas riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan rekognisi internasional atau dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
- 5 Mendorong pelestarian bahasa daerah, meningkatkan jumlah kosakata bahasa Indonesia, dan meningkatkan kualitas kebahasaan penutur terbina dengan melaksanakan penyuluhan secara massif; dan
- 6 Memastikan terciptanya kerja sama dan kolaborasi yang erat antarpemangku kepentingan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan keluarga melalui penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

BAB II

Perencanaan Kinerja



Visi, Misi, dan Tujuan
Matriks Kinerja
Perjanjian Kinerja 2023
Alokasi Anggaran 2023
Program Prioritas 2023



Visi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Misi



Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;



Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan



Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.



Tujuan Strategis

- 1 Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
- 2 Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
- 3 Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan;
- 4 Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
- 5 Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Matriks Kinerja Kemendikbudristek Tahun 2020–2024

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024, Kemendikbudristek menetapkan 5 SS dan 20 IKSS yang merupakan IKU sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemendikbudristek tahun 2020–2024 (revisi Tahun 2022). Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel A.1
Matriks Kinerja

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang						
IKSS 1.1	Angka Kesiapan Sekolah	%	-	-	75,38	75,59	75,79
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	-	-	99,30	99,32	99,34
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	-	-	96,14	96,34	96,55
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat	%	86,19	88,39	88,39	92,80	95,00
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	33,47	34,56	31,52	36.64	37,63
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang						
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai	-	-	0,51	0,52	0,53
IKSS 2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum						

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dalam asesmen kompetensi minimum						
	a. Literasi	%	-	-	47,50	49,75	52,00
	b. Numerasi	%	-	-	28,30	29,20	30,10
IKSS 2.3	Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	%	-	-	27,50	30	32,50
IKSS 2.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47,10	48,30	47,84	48,83	49,83
IKSS 2.5	Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya	%	-	-	5	5,50	6
IKSS 2.6	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/ berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP	%	-	-	42,77	45	47,77
IKSS 2.7	Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan	%	-	-	19,70	20	20,25

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	mendapatkan gaji kompetitif (1.2X UMP)						
SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan						
IKSS 3.1	Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	Indeks	-	-	69	75	81
IKSS 3.2	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	55,50	57,30	59,71	61,20	62,70
SS 4	Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan						
IKSS 4.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	Karya	-	-	82.500	86.500	90.500
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel						
IKSS 5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS 5.2	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	Indeks	81	82	82	83	84
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	-	-	BB	A	A
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	78	81	83	85	87

Perjanjian Kinerja 2023

Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian periode 2020–2024, serta program Prioritas Nasional bidang pendidikan dan kebudayaan yang tercantum dalam RKP Tahun 2023, Kemendikbudristek merumuskan target kinerja yang akan dicapai di tahun 2023 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel B.1
Perbandingan Target Kinerja PK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target PK	
				Awal	Revisi
1	[SS 1] Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	[IKSS 1.1] Angka Kesiapan Sekolah	%	75,59	75,59
		[IKSS 1.2] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–12 tahun	%	99,32	99,32
		[IKSS 1.3] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13–15 tahun	%	96,34	96,34
		[IKSS 1.4] Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat	%	92,80	92,80
		[IKSS 1.5] Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	36,64	31,89
2	[SS 2] Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang	[IKSS 2.1] Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai	0,52	0,52
		[IKSS 2.2.a] Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Literasi	%	49,75	59,49
		[IKSS 2.2.b] Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Numerasi	%	29,20	45,24
		[IKSS 2.3] Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks	%	30	30

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target PK	
				Awal	Revisi
		karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik			
		[IKSS 2.4] Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	48,83	48,83
		[IKSS 2.5] Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya	%	5,50	5,50
		[IKSS 2.6] Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/ berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP	%	45	45
		[IKSS 2.7] Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1.2X UMP)	%	20	20
3	[SS 3] Meningkatnya pemaparan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	[IKSS 3.1] Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	Indeks	75	75
		[IKSS 3.2] Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	61,20	61,20
4	[SS 4] Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan	[IKSS 4.1] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	Karya	86.500	86.500
5	[SS 5] Meningkatnya	[IKSS 5.1] Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	Opini	WTP	WTP



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target PK	
				Awal	Revisi
	tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel	[IKSS 5.2] Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	Indeks	83	83
		[IKSS 5.3] Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	A	A
		[IKSS 5.4] Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	81	81

Tabel B.2
Sandingan Alokasi Anggaran PK Awal dan PK Revisi

No	Nama Program	Alokasi Anggaran	
		PK Awal	PK Revisi
1	Program Pendidikan Tinggi	Rp. 31.527.253.251.000	Rp. 35.426.665.205.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.994.718.358.000	Rp. 19.296.004.769.000
3	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp. 14.818.624.988.000	Rp. 13.273.623.279.000
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 4.046.031.657.000	Rp. 4.719.402.666.000
5	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp. 8.708.496.945.000	Rp. 10.114.863.637.000
6	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Rp. 1.282.655.238.000	Rp. 1.697.477.745.000
	TOTAL	Rp. 80.377.780.437.000	Rp. 84.528.037.301.000

Pada tahun 2023, Kemendikbudristek melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja melalui revisi Perjanjian Kinerja tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa pertimbangan kebijakan. Adapun penyesuaian target dilakukan pada beberapa indikator kinerja, antara lain:

- 1 Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi semula target 36.64 direvisi menjadi 31.89. Perubahan target tersebut dilakukan karena penyesuaian target

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

- 2** Indikator Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Literasi semula 49.75 menjadi 59.49, serta Indikator Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Numerasi semula 29.20 menjadi 45.24. Penyesuaian target tersebut sebagai salah satu tindak lanjut yang dilakukan dari hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap pencapaian kinerja tahun 2022.

Selain itu penyesuaian Perjanjian Kinerja terjadi pada sektor anggaran dari anggaran sebesar Rp. 80.377.780.437.000 menjadi Rp. 84.528.037.301.000.

Program Prioritas Kemendikbudristek 2023

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Kemendikbudristek dan mendukung kinerja nasional bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Kemendikbudristek melaksanakan berbagai program prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional. Program prioritas Kemendikbudristek tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
1	SMA yang Mendapatkan Pembinaan Afirmasi (Lembaga)	34	38	28,009,500,000
2	SD yang mendapat pembinaan Program Afirmasi (Lembaga)	514	514	38,676,926,000
3	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang Mendapatkan	34	38	6,056,360,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
	Pembinaan Program Afirmasi (Lembaga)			
4	Satuan Pendidikan Yang Mendapat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan (Lembaga)	514	514	12,028,250,000
5	Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif (Lembaga)	34	38	6,127,672,000
6	Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan (Orang)	33,000	33,000	26,699,000,000
7	SMP yang mendapat pembinaan Afirmasi (Lembaga)	514	873	33,974,326,000
8	Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar (Orang)	10,360,614	10,386,997	4,223,762,199,000
9	Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar (Orang)	4,369,968	4,471,118	2,726,502,381,000
10	Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar (Orang)	1,368,243	1,390,682	1,183,707,440,000
11	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar (Orang)	1,829,167	1,860,322	1,538,461,070,000
12	Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) (Orang)	3,048	4,243	107,501,857,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
13	Satuan PAUD Mendapatkan pembinaan Afirmasi (Lembaga)	514	657	21,663,751,000

2. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan (Rekomendasi Kebijakan)	6	7	21,212,436,000
2	Soal yang dikembangkan (Rekomendasi Kebijakan)	18000	18241	17,814,564,000
3	Model Asesmen Pendidikan (Rekomendasi Kebijakan)	5	5	9,356,428,000
4	Pengembang Penilaian Pendidikan yang berkompeten (Orang)	40	56	2,000,000,000
5	Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani (Orang)	1470000	2805707	233,702,263,000
6	Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Asesmen (Lembaga)	360663	492204	83,836,617,000
7	Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi (Lembaga)	61857	77505	145,908,764,000
8	Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi (Lembaga)	45777	46717	200,516,365,000
9	Satuan PAUD Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan (Lembaga)	3182	3.646	32,650,113,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
10	Satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku (Lembaga)	250	269	28,980,245,000
11	Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif (Lembaga)	5000	5.000	29,306,838,000
12	Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS (Lembaga)	500	1.064	6,658,897,000
13	Satuan PAUD yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu (Lembaga)	514	514	88,362,352,000
14	SD yang Melaksanakan Program UKS (Lembaga)	514	559	11,767,140,000
15	SD Penggerak yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	6512	7.994	50,443,974,000
16	SD yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku (Lembaga)	514	488	17,152,580,000
17	SD yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu (Lembaga)	514	514	105,333,583,000
18	SMP yang Melaksanakan Program UKS (Lembaga)	514	757	4,475,175,000
19	SMP Penggerak yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2772	2.968	21,400,406,000
20	SMP yang Menerapkan Kurikulum yang berlaku (Lembaga)	514	548	25,808,864,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
21	SMP yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu (Lembaga)	514	552	120,441,601,000
22	SMA yang melaksanakan program UKS (Lembaga)	34	38	3,626,920,000
23	SMA Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan (Lembaga)	1488	1.488	25,042,208,000
24	SMA yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku (Lembaga)	1458	1.458	14,462,596,000
25	SMA yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu (Lembaga)	34	38	96,777,808,000
26	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS (Lembaga)	34	38	6,632,500,000
27	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Penggerak yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	284	284	10,345,545,000
28	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku (Lembaga)	34	38	20,226,227,000
29	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu (Lembaga)	34	38	71,531,456,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
30	Guru TK/TKLB Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi (Orang)	52086	51991	1,561,599,892,000
31	Guru Dikdas Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi (Orang)	83205	83232	2,081,373,528,000
32	Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi (Orang)	66378	72493	1,775,757,784,000
33	Kepala Sekolah Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi (Orang)	43600	44911	1,440,586,055,000
34	Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus (Orang)	393	577	8,944,767,000
35	Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus (Orang)	23975	23976	450,064,316,000
36	Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus (Orang)	3379	4.116	67,756,967,000
37	Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus (Orang)	393	451	9,298,337,000
38	Guru TK/TKLB/Dikmas Non-PNS yang Menerima Insentif (Orang)	41065	38.522	108,086,400,000
39	Guru Dikdas Non-PNS Yang Menerima Insentif (Orang)	25794	25764	92,858,400,000
40	Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Insentif (Orang)	2850	2840	10,260,000,000
41	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran (Orang)	65041	78.519	469,113,143,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
42	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru (Orang)	79678	93.708	1,034,665,290,000
43	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi (Orang)	13475	17.338	33,512,628,000
44	Guru PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir (Orang)	2275	2.404	1,895,650,000
45	Guru PAUD dan Dikmas yang Memperoleh Penghargaan (Orang)	262	397	7,936,440,000
46	Instruktur Guru PAUD dan Dikmas yang mendapat pendampingan pembelajaran (Orang)	850	15.289	33,036,870,000
47	Penataan Guru PAUD dan Dikmas (Daerah (Prov/Kab/Kota))	38	38	24,409,904,000
48	Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir (Orang)	600	720	2,841,680,000
49	Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan (Orang)	296	296	8,865,868,000
50	Instruktur Guru Dikdas yang mendapat pendampingan pembelajaran (Orang)	1020	1.240	40,989,922,000
51	Penataan Guru Dikdas (Daerah (Prov/Kab/Kota))	38	38	32,686,057,000
52	Guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir (Orang)	3500	4.159	12,664,752,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
53	Guru Dikmen dan Diksus yang Memperoleh Penghargaan (Orang)	376	376	10,228,899,000
54	Instruktur Guru Dikmen dan Diksus yang mendapat pendampingan pembelajaran (Orang)	900	1.948	38,499,720,000
55	Penataan Guru Dikmen dan Diksus (Daerah (Prov/Kab/Kota))	38	38	26,262,209,000
56	Layanan Penguatan Karakter Terkait Profil Pelajar Pancasila (layanan)	6	8	14,995,968,000
57	Layanan Penguatan Karakter Terkait iklim keamanan satuan pendidikan (layanan)	3	5	30,183,227,000
58	Layanan Penguatan Karakter Terkait inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan (layanan)	2	3	7,745,800,000
59	Platform Digital Pendidikan Merdeka Belajar (Sistem Informasi)	5	6	601,500,000,000
60	Peserta didik yang difasilitasi karir belajar untuk pengembangan prestasi (Orang)	800	1.150	105,970,037,000
61	Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi (Orang)	17400	17.431	26,971,476,000
62	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi (Orang)	8682	7712	68,474,364,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
63	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Seni, Budaya, dan Literasi (Orang)	5786	5586	41,538,645,000
64	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Olahraga (Orang)	1872	4.824	75,200,134,000
65	Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Vokasi dan Kewirausahaan (Orang)	1888	2291	54,352,545,000
66	Peserta Didik yang dikembangkan Prestasinya Tahap Lanjut (Orang)	135	184	54,266,247,000
67	Peserta Didik yang mengikuti Pelatihan Ketalentaan (Orang)	1600	1478	3,000,000,000
68	Pemandu Talenta yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	800	766	3,433,355,000
69	Kajian dan Pengembangan Model Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Parenting di Kawasan Asia Tenggara (Tim)	6	6	249,646,000
70	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya (Lembaga)	207752	252.530	417,872,590,000
71	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya (Lembaga)	206645	238.188	51,947,572,000
72	Kurikulum yang dikembangkan (Rekomendasi Kebijakan)	255	305	36,182,495,000
73	Perangkat Pembelajaran Yang Dikembangkan (Rekomendasi Kebijakan)	558	710	21,368,467,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
74	Pengembang kurikulum yang berkompeten (Orang)	45	63	2,559,681,000
75	Sistem Informasi Kurikulum (layanan)	1	2	2,182,500,000
76	Buku Pendidikan yang dikembangkan, dinilai dan diawasi (Rekomendasi Kebijakan)	2625	2650	49,088,030,000
77	Buku Umum yang dikembangkan, dinilai dan diawasi (Rekomendasi Kebijakan)	50	55	3,203,925,000
78	SDM Perbukuan yang Tersertifikasi (Orang)	112	113	2,673,342,000
79	Sistem Informasi perbukuan (layanan)	1	2	10,565,860,000
80	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan (Rekomendasi Kebijakan)	16	19	13,754,070,000
81	Rapor Pendidikan yang dikembangkan (Rekomendasi Kebijakan)	3	3	6,293,456,000
82	Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan (Rekomendasi Kebijakan)	10	11	11,044,785,000
83	Guru yang mengikuti Sertifikasi Guru (Orang)	166705	172509	72,901,685,000
84	Calon Kepala Sekolah Penggerak yang mendapat pendampingan pembelajaran (Orang)	660	792	57,175,737,000
85	Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir (Orang)	105	137	2,592,173,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
86	Pengawas Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir (Orang)	105	120	2,592,173,000
87	Kepala sekolah, Pengawas sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan (Orang)	668	800	21,658,766,000
88	Fasilitator dan Pendamping PGP yang mendapatkan peningkatan kompetensi (Orang)	22156	26582	179,085,557,000
89	Penataan kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan (Daerah (Prov/Kab/Kota))	34	75	6,502,302,000

3. Program Pendidikan Tinggi

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Program Studi dengan Inovasi Pembelajaran Digital dan Berkualitas (Lembaga)	800	800	70,213,367,000
2	Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha (Orang)	5000	7852	40,000,000,000
3	Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat. (Orang)	6500	8254	33,000,000,000
4	Perguruan Tinggi/Prodi yang Diakreditasi (BAN-PT) (Lembaga)	2047	2074	39,667,581,000
5	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) (Orang)	489	443	5,765,800,000
6	SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar (Orang)	1840	1824	232,476,898,000
7	Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah (Orang)	913636	916827	11,912,856,603,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
8	Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) (Orang)	7417	7614	7,799,420,000
9	Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK) (Lembaga)	52	52	40,000,000,000
10	Kemitraan Bidang Gizi dan Pangan SEAMEO RECFON (Kesepakatan)	5	5	487,564,000
11	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN) (Paket)	19	18	634,013,189,000
12	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN) (Paket)	30	16	392,148,697,000
13	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) (unit)	16	16	1,218,050,125,000
14	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN) (unit)	30	29	1,686,154,855,000
15	SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya (PHLN) (Orang)	1465	1273	186,867,450,000
16	Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi (Orang)	102218	116402	2,139,547,274,000

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja (Orang)	46960	46960	21,417,583,000
2	SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Lembaga)	1851	1851	1,092,037,155,000
3	SMK yang Melaksanakan Program UKS (Lembaga)	34	34	3,525,074,000
4	SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan (Lembaga)	240	240	13,805,924,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
5	SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 (Lembaga)	31	80	72,121,240,000
6	Dunia Usaha/Dunia Industri yang menerapkan kerjasama dengan Satuan Pendidikan Vokasi (Kesepakatan)	200	293	24,683,642,000
7	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri (Lembaga)	1020	1261	29,841,519,000
8	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja (Orang)	31790	43337	139,346,195,000
9	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha (Orang)	23630	26135	147,851,554,000
10	Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN) (Paket)	29	53	180,716,532,000
11	Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN) (unit)	8	8	530,317,468,000
12	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja (Kajian)	14	25	1,824,000,000
13	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja (Kesepakatan)	105	157	3,225,800,000
14	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi (Lembaga)	3048	6794	18,489,080,000
15	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja (Orang)	3144	5735	15,380,734,000
16	Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri (Orang)	9684	14639	246,594,136,000
17	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan (Orang)	270	388	4,646,326,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
18	Program Studi Vokasi yang Menerapkan Kurikulum Link and Match dengan Dunia Kerja (Lembaga)	12	35	9,500,000,000
19	Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi (Orang)	4500	4570	1,368,450,000
20	Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri (Lembaga)	142	256	104,275,153,000
21	SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi (Orang)	380	784	4,376,451,000

5. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Partisipan perlindungan bahasa dan sastra (Orang)	4956	7881	43,471,258,000
2	Produk Kodifikasi Bahasa (dokumen)	68	87	8,329,172,000
3	Penutur bahasa terbina (Orang)	8920	13348	34,541,716,000
4	Penutur bahasa teruji (Orang)	86028	282951	8,576,960,000
5	Generasi muda terbina program literasi (Orang)	14437	23386	29,156,976,000
6	Even Film dan Musik yang dikembangkan dan dimanfaatkan (Kegiatan)	16	20	221,259,764,000
7	Karya Perfilman dan Musik Indonesia (layanan)	45	54	27,323,200,000
8	Platform Produksi dan Distribusi Perfilman dan Musik Indonesia (layanan)	1	2	29,747,800,000
9	Warisan Budaya yang Ditetapkan (layanan)	284	310	7,751,644,000
10	Museum yang Dibangun (unit)	1	1	21,000,000,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
11	Warisan Budaya yang Dilindungi (unit)	49	62	33,362,100,000
12	Event Diplomasi Cagar Budaya Dan Objek Pemajuan Kebudayaan (Kegiatan)	2	3	14,403,691,000
13	Even Prioritas Bidang Kebudayaan (Kegiatan)	3	4	120,179,302,000
14	Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pembelajaran Nilai Budaya Dan Objek Pemajuan Kebudayaan (Lembaga)	500	591	28,000,000,000
15	Fasilitasi Bidang Kebudayaan (Kelompok Masyarakat)	150	300	49,079,164,000
16	Desa Pemajuan Kebudayaan (Desa)	120	145	30,000,000,000
17	Lembaga Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	127	191	4,700,000,000
18	Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang Dikembangkan (Orang)	5600	7640	45,000,000,000
19	Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	490	593	4,500,000,000
20	Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Disertifikasi (Orang)	520	614	1,750,000,000
21	Museum Nasional Yang Dibangun dan Ditata (unit)	2	2	3,359,807,000
22	Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat (Orang)	500	810	3,087,800,000
23	Advokasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat (layanan)	3	4	10,250,000,000
24	Materi Pembelajaran Budaya dan Penguatan Karakter dalam Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME	3	4	1,600,000,000

No	Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
	dan Masyarakat Adat yang Tersusun (layanan)			
25	Penguatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat (Lembaga)	40	48	3,450,000,000
26	Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan (Desa)	10	13	17,000,000,000
27	Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (orang)	3000	4792	9,687,000,000
28	Film dan Iklan Film yang Disensor (layanan)	41000	41498	2,938,000,000
29	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA (Lembaga)	250	387	17,401,362,000
30	Museum Nasional Yang Dibangun dan Ditata (unit)	2	2	66,804,493,000
31	Koleksi, Cagar Budaya Nasional, dan Benda Budaya Yang Dikelola (unit)	250017	360583	72,277,393,000
32	Giat Warisan Budaya (Kegiatan)	209	300	39,255,509,000
33	Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya (Kelompok Masyarakat)	450	535	13,411,704,000
34	Data dan Informasi Warisan Budaya (layanan)	450	592	17,457,901,000
35	Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan (unit)	1	1	1,500,000
36	Konten Media Kebudayaan yang Diproduksi (layanan)	33	49	113,729,000,000

6. Program Dukungan Manajemen

Program Prioritas	Target	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan (layanan)	1	1	4,057,866,000

Program Prioritas tersebut mendukung Prioritas Nasional Berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas yang dijabarkan diatas merupakan program prioritas yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dan bertujuan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional dalam rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

A. Rencana Aksi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023

Berdasarkan mandat dari Presiden RI yang melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertugas untuk:

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta menyiapkan, program/bantuan pendidikan secara tepat sasaran;
2. Menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah secara tepat sasaran; dan
3. Mendorong peran perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui tri dharma perguruan tinggi.

Dalam rangka mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2023, Kemendikbudristek mendukung kinerja nasional dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program prioritas Kemendikbudristek tahun 2023 yakni sebagai berikut:

No.	Kelompok Intervensi	Program Intervensi	Satuan		Sasaran	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Menurunkan Beban Pengeluaran	a. Program Indonesia Pintar (PIP)	orang		14,303,732	18,109,119	9,672,433,090,000
		b. KIP Kuliah	orang		893,005	866,650	11,912,856,603,000
		c. ADIK	orang		7,417	7,103	7,799,420,000
		d. ADEM	orang		3,048	4,242	107,501,857,000
2	Meningkatkan Pendapatan	a. Tunjangan Profesi Guru Non PNS	orang		246,070	252,129	6,859,317,259,000
		b. Tunjangan Khusus Guru Non PNS	orang		30,048	28,135	536,064,387,000
		c. Insentif Guru Non PNS*	orang		67,000	41,064	211,204,800,000
		d. Pendidikan Kecakapan Kerja	orang		31,790	38,842	139,346,195,000
		e. Pendidikan Kecakapan Wirausaha	orang		23,630	26,135	147,851,554,000
		f. SMK Mengembangkan Pendidikan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	lembaga		240	240	13,805,924,000
3	Mendorong peran PT melalui Tri Dharma PT	a. Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha	orang		5,000	5,000	40,000,000,000
		b. Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	orang		7,500	4,570	1,368,450,000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja



Merdeka Belajar
Pengukuran Kinerja
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Efisiensi Anggaran
Inovasi
Penghargaan

Collaborative dan Crosscutting Program

A. Merdeka Belajar

Merdeka Belajar adalah program kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Merdeka belajar mendorong inovasi di lembaga pendidikan, termasuk sekolah dan madrasah, serta meningkatkan kompetensi guru. Program Merdeka Belajar ini mengharapkan sistem pengajaran di Indonesia akan berubah menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa di masa mendatang. Perubahan ini bertujuan untuk membentuk pelajar yang siap kerja dan berkarakter. Sampai dengan Tahun 2023 sudah ada 26 luncuran episode Merdeka Belajar, sebagai berikut :

- A.** Merdeka Belajar 1 | Asesmen Nasional (AN), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- B.** Merdeka Belajar 2 | Kampus Merdeka;
- C.** Merdeka Belajar 3 | Penyaluran dan Penggunaan Dana Bos;
- D.** Merdeka Belajar 4 | Program Organisasi Penggerak;
- E.** Merdeka Belajar 5 | Guru Penggerak;
- F.** Merdeka Belajar 6 | Transformasi Dana Pemerintah Untuk Perguruan Tinggi;
- G.** Merdeka Belajar 7 | Program Sekolah Penggerak;
- H.** Merdeka Belajar 8 | SMK Pusat Keunggulan;
- I.** Merdeka Belajar 9 | KIP Kuliah Merdeka;
- J.** Merdeka Belajar 10 | Perluasan Program Beasiswa LPDP;
- K.** Merdeka Belajar 11 | Kampus Merdeka Vokasi;
- L.** Merdeka Belajar 12 | Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah;
- M.** Merdeka Belajar 13| Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana;
- N.** Merdeka Belajar 14| Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual;
- O.** Merdeka Belajar 15 | Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar;

- P.** Merdeka Belajar 16 | Akselarasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
- Q.** Merdeka Belajar 17 | Revitalisasi Bahasa Daerah;
- R.** Merdeka Belajar 18| Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana;
- S.** Merdeka Belajar 19 | Rapor Pendidikan Indonesia;
- T.** Merdeka Belajar 20| Praktisi Mengajar;
- U.** Merdeka Belajar 21 | Dana Abadi Perguruan Tinggi;
- V.** Merdeka Belajar 22 | Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi;
- W.** Merdeka Belajar 23| Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia;
- X.** Merdeka Belajar 24 | Transisi PAUD Ke SD Yang Menyenangkan;
- Y.** Merdeka Belajar 25 | Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Z.** Merdeka Belajar 26 | Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi.

Pencapaian program prioritas yang menunjang kebijakan Merdeka Belajar pada tahun 2023 antara lain:

1. Pembiayaan Pendidikan

No.	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Program Indonesia Pintar (PIP)	Orang	17.927.992	18.109.119	101,01
2	Mahasiswa yang Mendapatkan KIP Kuliah	Orang	913.636	916.827	100,35
3	Tunjangan GTK Non PNS (TPG, TKG dan Insentif)	Orang	343.118	348.873	101,68
4	Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Orang	7.417	7.614	102,66
5	Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Orang	3.048	4.243	139,21

2. Digitalisasi Pendidikan, Penguatan Karakter dan Peningkatan Prestasi

No.	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Layanan Penguatan Karakter	Layanan	11	16	145,45
2	Peserta Didik yang Dikembangkan Prestasinya	Siswa	20.763	29.035	139,84
3	Platform Digital Pendidikan Merdeka Belajar	Sistem Informasi	5	6	120,00

3. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

No.	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	GTK yang Mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi	Orang	13.475	17.588	130,52
2	Guru yang Mengikuti Sertifikasi Guru	Orang	166.705	167.784	100,65
3	GTK yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Orang	6.585	7.540	114,40
4	Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan	Daerah (Provinsi, Kab, Kota)	148	189	127,70
5	Fasilitator dan Pendamping PGP yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	22.156	26.582	119,98

4. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No.	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Partisipasi Pelindungan Bahasa dan Sastra ^{*)}	Orang	4.956	7.881	159,02
2	Produk Kodifikasi Bahasa	Dokumen	68	87	127,94
3	Penutur Bahasa Terbina ^{*)}	Orang	8.920	13.348	149,64
4	Penutur Bahasa Teruji ^{*)}	Orang	86.028	282.951	328,91
5	Generasi Muda Terbina Program Literasi ^{*)}	Orang	14.437	23.386	161,99
6	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA ^{*)}	Lembaga	250	387	154,80

5. Pembinaan dan Pendampingan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

No.	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Orang Dewasa Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	Orang	33.000	33.000	100,00
2	Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif	Lembaga	5.000	5.000	100,00
3	Satuan Pendidikan Mendapat Pembinaan Pendidikan Kesenjangan	Lembaga	514	514	100,00
4	Satuan Dikdas dan Dikmen difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	207.752	252.530	121,55

No.	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
5	Sekolah penggerak yang Mendapatkan Pendampingan	Lembaga	14.238	16.380	115,04
6	Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	Lembaga	34	38	111,76
7	Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku	Lembaga	2.770	2.801	101,12

6. Kurikulum, Perbukuan, dan Asesmen Pendidikan

No.	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Buku Umum dan Buku Pendidikan yang Dikembangkan Dinilai dan Diawasi	Rekomendasi Kebijakan	2.675	2.705	101,12
2	SDM Perbukuan yang Tersertifikasi	Orang	112	113	100,89
3	Kurikulum yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	255	305	119,61
4	Perangkat Pembelajaran yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	558	710	127,24
5	Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Asesmen	Lembaga	360.66 3	492.204	136,47
6	Rapor Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	3	3	100,00
7	Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi	Lembaga	61.857	77.505	125,30

No.	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
8	Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi	Lembaga	45.777	46.717	102,05
9	Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani*)	Orang	1.470.000	2.805.707	190,86

7. Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

No.	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Desa Pemajuan Kebudayaan	Desa	120	145	120,83
2	Karya Perfilman dan Musik Indonesia	layanan	45	54	120,00
3	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Orang	3.012.000	4.500.904	149,43
4	Tenaga Bidang Kebudayaan yang Disertifikasi	Orang	520	614	118,08
5	Tenaga Bidang Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	490	593	121,02
6	Warisan Budaya yang Dilestarikan*)	unit	715	1.079	150,91
7	Warisan Budaya yang Dilindungi	unit	49	62	126,53
8	Warisan Budaya yang Ditetapkan	layanan	284	310	109,15

8. Pendidikan Vokasi

No.	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	Lembaga	1.851	1.851	100,00
2	SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Lembaga	240	240	100,00
3	Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi*)	Orang	4.500	4.570	101,56
4	Guru Kejuruan dan Kepala Sekolah yang mengikuti <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Berstandar Industri*)	Orang	9.684	14.639	151,17
5	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	Orang	31.790	43.337	136,32
6	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	Orang	23.630	26.135	110,60
7	Dunia Usaha/Dunia Industri yang Menerapkan Kerjasama dengan Satuan Pendidikan Vokasi	Kesepakan	200	293	146,50

9. Program Pendidikan Tinggi

No.	Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) *)	Orang	489	441	90,18
2	SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar *)	Orang	1.840	1.824	99,13
3	Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha *)	Orang	5.000	7.582	151,64
4	Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat	Orang	6.500	8.254	126,98
5	Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK)	Lembaga	26	26	100,00
6	Perguruan Tinggi/Prodi yang Diakreditasi (BAN-PT)	Lembaga	2.047	2.074	101,32
7	Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun (PHLN) *)	unit	30	27	90,00
8	Sarana Perguruan Tinggi yang Direvitalisasi (PHLN) *)	Paket	30	15	50,00
9	SDM Dikti yang Ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya (PHLN) *)	Orang	1.465	1.064	72,63
10	Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun (SBSN)	unit	16	16	100,00
11	Sarana Perguruan Tinggi yang Direvitalisasi (SBSN) *)	Paket	19	18	94,74
12	Program Studi dengan Inovasi Pembelajaran Digital dan Berkualitas	Lembaga	800	800	100,00

Program Prioritas Merdeka Belajar tersebut tentunya mendukung untuk peningkatan kinerja Kemendikbudristek yang telah ditargetkan pada tahun 2023.

B. Pengukuran Kinerja

Kinerja Kemendikbudristek tahun 2023 diukur dari pencapaian 5 SS dan 20 IKSS yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kinerja Kemendikbudristek tersebut merupakan kinerja tahun keempat Rencana Strategis Kemendikbudristek 2020–2024. Secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 110,33%, dan rata-rata capaian sasaran kinerja tahun 2023 sebesar 103,61%. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
SS 1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang			
IKSS 1.1	Angka Kesiapan Sekolah	75,59%	76,54%	101,26%
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–12 Tahun	99,32%	99,16%	99,84%
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13–15 Tahun	96,34%	96,10%	99,75%
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	92,80%	86,34%	93,04%
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	31,89%	31,45%	98,62%
SS 2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang			
IKSS 2.1	Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD	0,52	0,52	100%
IKSS 2.2	Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum			
	a. Literasi	59,49%	68,13%	114,52%
	b. Numerasi	45,24%	62,51%	138,17%

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
IKSS 2.3	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik	30%	33,03%	110,10%
IKSS 2.4	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	48,83%	52,69%	107,90%
IKSS 2.5	Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya	5,5%	9,82%	178,54%
IKSS 2.6	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP	45%	47,88%	106,40%
IKSS 2.7	Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang Dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1.2X UMP)	20%	31,24%	156,20%
SS 3	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan			
IKSS 3.1	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	75	88,07	117,43%
IKSS 3.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,20	55,13	90,08%
SS 4	Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan			
IKSS 4.1	Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat	86.500 Karya	75.669 Karya	87,48%
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel			
IKSS 5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	WTP	WTP*)	100%
IKSS 5.2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek	83	86,7	104,45%
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A	BB	99,44%



Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	81	83,79	103,44%

*) Realisasi tahun 2022

A. Capaian Kinerja

Hasil analisis dan uraian singkat terkait seluruh SS dan IKSS tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja

Hasil analisis dan uraian singkat terkait seluruh SS dan IKSS tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka Kesiapan Sekolah	75,59%	76,54%	101.26%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	99,32%	99,16%	99.84%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	96,34%	96,10%	99.75%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	92,80%	86,34%	93.04%
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	31,89%	31,45%	98,62%

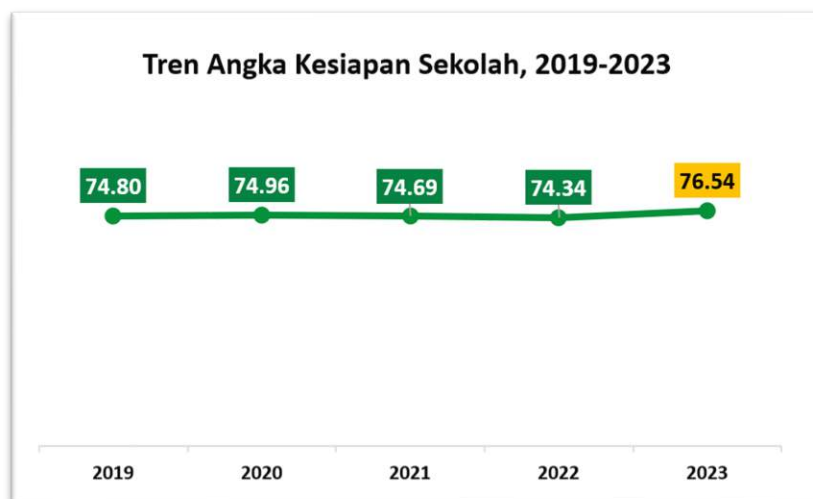
Ketercapaian Sasaran Strategis meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu diseluruh jenjang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi di seluruh jenjang pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Secara nasional, angka partisipasi di seluruh jenjang dari tahun 2020 sampai

dengan tahun 2023 cenderung stagnan, walaupun terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2022.

Intervensi utama Kemendikbudristek untuk pemerataan layanan pendidikan yaitu fokus pada pemberian bantuan pendidikan baik bagi peserta didik maupun bagi satuan pendidikan sehingga kesempatan untuk mengakses pendidikan semakin terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Ketercapaian SS tersebut didukung oleh 5 IKSS. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing IKSS tersebut adalah sebagai berikut.

IKSS 1.1 : Angka Kesiapan Sekolah

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target PK	Realisasi	%		
74,96	74,69	75,59	76,54	101,26	75,79	100,99%



Layanan pendidikan sudah sepatutnya dimulai sejak usia dini agar perkembangan anak menjadi lebih optimal. Pemerintah membuat program untuk anak usia dini yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Angka Kesiapan Sekolah



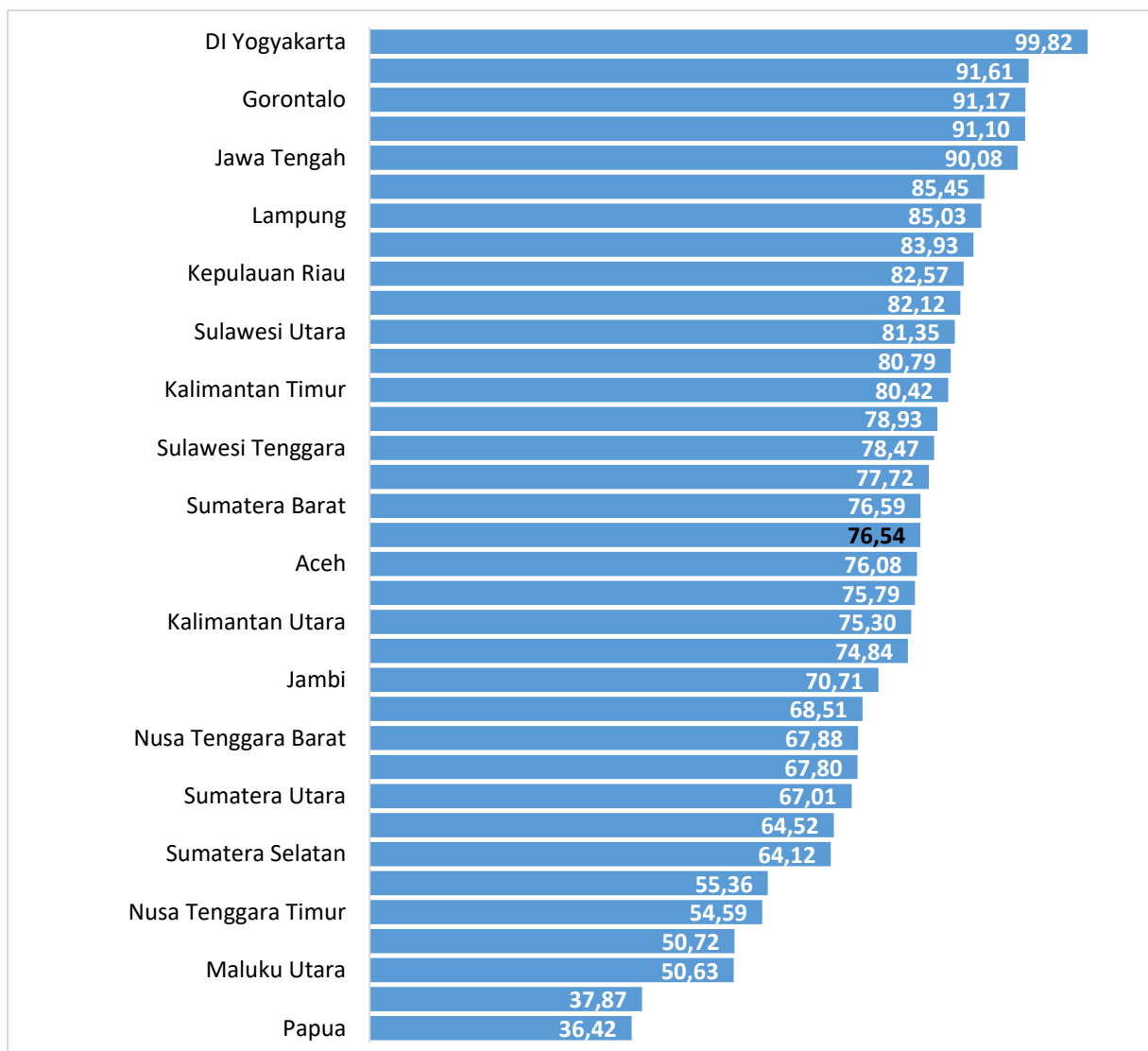
(AKS) digunakan untuk mengukur kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat). Indikator ini menggambarkan seberapa banyak siswa kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya telah mengikuti PAUD. AKS menghitung proporsi anak pada kelas 1 SD/Sederajat yang pernah mengikuti PAUD pada satu tahun sebelumnya terhadap keseluruhan anak pada kelas 1 SD/Sederajat. Badan Pusat Statistik menghitung AKS dengan melakukan perbandingan siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti pendidikan prasekolah (TK/BA/RA/Satuan PAUD Sejenis), terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD.

$$AKS = \frac{\text{Jumlah siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD/sederajat yang pada Tahun Ajaran sebelumnya mengikuti TK atau BA atau RA atau PAUD}}{\text{Jumlah siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD/sederajat}} \times 100$$

Indikator Angka Kesiapan Sekolah (AKS) dimaknai sebagai persentase anak kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD. Pada tahun 2023, capaian AKS meningkat dibanding tahun sebelumnya. Terdapat 76,54 persen anak kelas 1 SD yang pernah mengikuti pendidikan prasekolah dan siap memasuki jenjang Pendidikan Dasar. Adapun capaian AKS Tahun 2023 telah melebihi target akhir periode renstra Kemendikbudristek yaitu 75,79 persen. Meskipun target Renstra Kemendikbudristek telah tercapai pada tahun 2023, Kemendikbudristek perlu tetap mempertahankan bahkan lebih mengoptimalkan pencapaian AKS ini pada tahun berikutnya.

Nilai AKS tertinggi ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pencapaian sebesar 99,82% dan terendah ada di Provinsi Papua dengan pencapaian sebesar 36,42%. Keberhasilan pencapaian AKS sebesar 76,54 pada tahun 2023 ini salah satunya dikarenakan dengan adanya luncuran kebijakan merdeka belajar terkait transisi PAUD ke SD yang menyenangkan sehingga Peserta didik

PAUD dapat terus melanjutkan prosesnya untuk mendapatkan kemampuan fondasi saat di SD/MI.



Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Program satu desa satu PAUD yang bertujuan agar penyelenggaraan layanan PAUD yang berkualitas tersebar di seluruh desa;
2. Pemberian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi 184.570 Satuan PAUD;
3. Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan merupakan gerakan bersama yang mendasari transisi peserta didik PAUD ke SD/MI/ sederajat dengan cara yang menyenangkan dan dimulai sejak tahun ajaran baru. Setiap anak perlu mendapatkan kemudahan dalam proses transisi dari PAUD ke SD/MI/ sederajat sehingga dapat terus melanjutkan prosesnya untuk mendapatkan kemampuan fondasi saat di SD/MI/ sederajat dan bagi peserta didik SD/MI/ sederajat yang tidak pernah mengikuti PAUD, tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi, sehingga memiliki pijakan yang kuat untuk memperoleh pembelajaran selanjutnya. Enam kemampuan fondasi anak yang harus dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas dua pada pendidikan dasar, yaitu: nilai agama dan budi pekerti, sosial dan bahasa, kematangan emosi, kognitif, motorik dan perawatan diri, dan belajar yang positif.
4. Program pendidikan inklusif,
Program pendidikan inklusif di Direktorat PAUD melalui penyaluran bantuan PAUD ABK berupa uang sebesar Rp2.000.000,00- untuk setiap anak usia dini berkebutuhan khusus yang didaftarkan menjadi penerima. Bantuan ini telah disalurkan sesuai target kepada 2.000 anak di 500 satuan PAUD. Selain itu, telah dilaksanakan pendampingan layanan PAUD inklusif di 10 kabupaten/kota sesuai hasil pemetaan kabupaten/kota dengan berdasarkan identifikasi daerah, jumlah satuan PAUD, dan anak usia dini dengan disabilitas.

5. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) bertujuan untuk melakukan advokasi kepada *stakeholder* mengenai membangun budaya siaga, budaya aman, dan budaya pengurangan risiko bencana, serta membangun ketahanan dalam menghadapi pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana, terkoordinasi dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka memberikan perlindungan kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat di sekitar dari ancaman dan dampak bencana.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Data valid Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai basis data penanganan anak tidak sekolah belum tersedia;
2. Sebaran PAUD Negeri belum merata yang menyebabkan orang tua/wali anak usia PAUD tidak dapat menyekolahkan anaknya pada PAUD/ sederajat di swasta yang membutuhkan biaya tinggi.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan basis data penanganan anak tidak sekolah (ATS)
2. Menambah satuan pendidikan PAUD negeri dengan program satu desa satu PAUD.
3. Memberikan BOP PAUD agar meringankan biaya orang tua/wali anak usia 3–6 tahun untuk mengikuti PAUD.

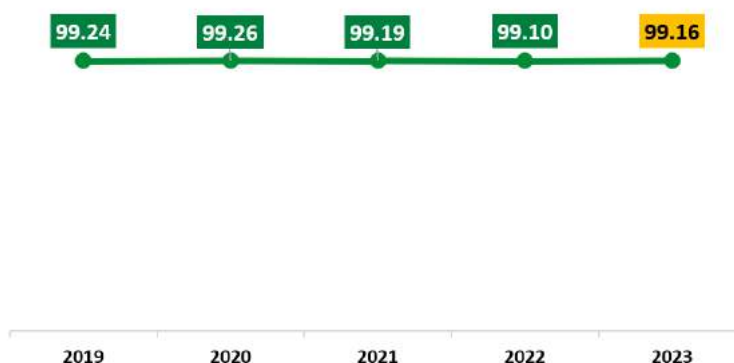
IKSS 1.2 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target PK	Realisasi	%		
99,19	99,10	99,32	99,16	99,84	99,34	99,81

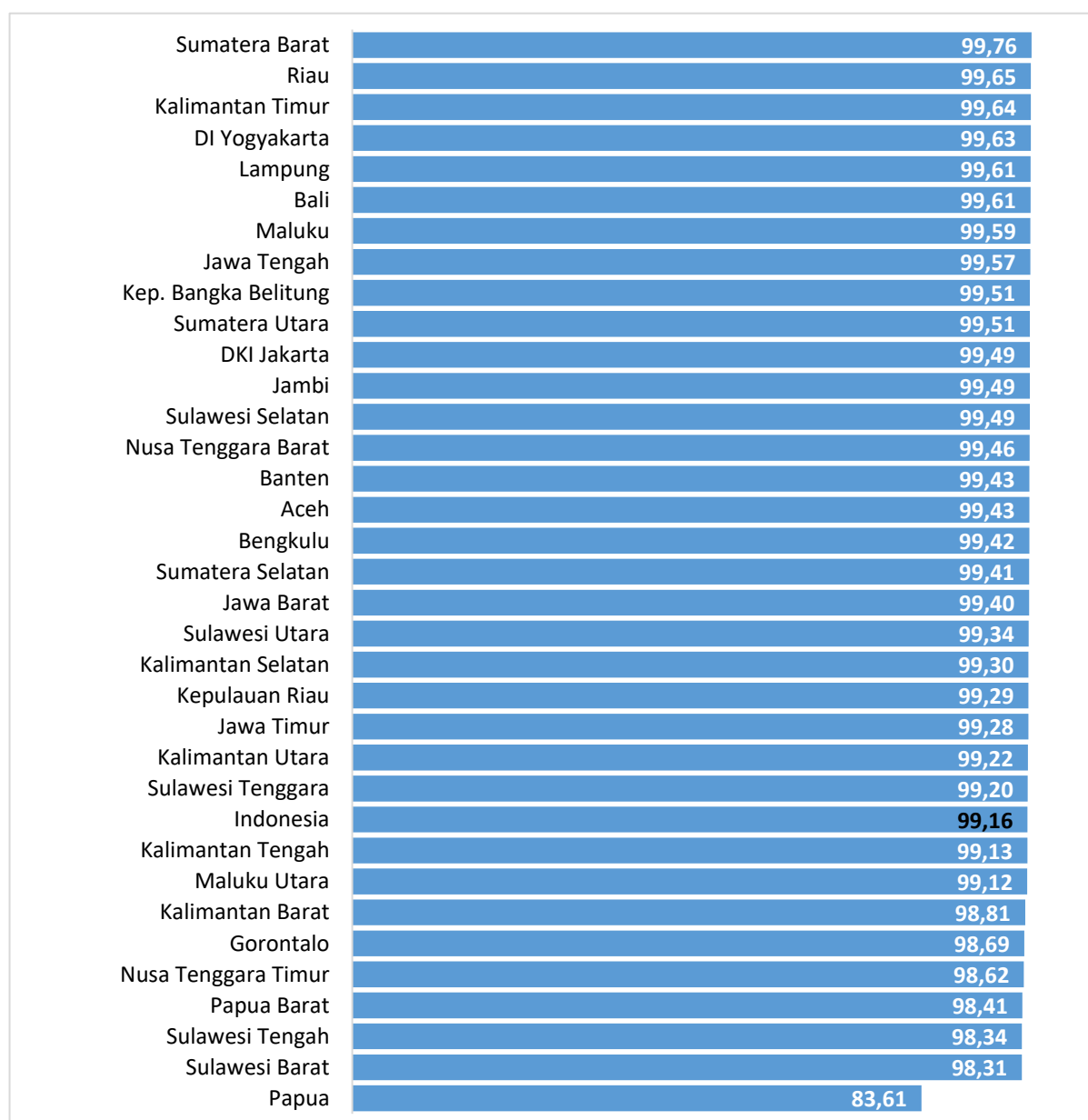
Indikator ini menghitung proporsi dari penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia 7-12 tahun, atau dengan kata lain untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100, makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

$$APS\ 7-12 = \frac{\text{Jumlah penduduk kelompok umur 7 - 12 yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk kelompok umur 7 - 12}} \times 100$$

Tren APS 7-12 Tahun, 2019-2023



APS 7-12 tahun telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, namun belum sepenuhnya pulih apabila dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Selain itu pencapaian ini masih belum memenuhi target 2023 yakni sebesar 99,32. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra baru mencapai 99,81% dari target 99,34 masih diperlukan strategi dan upaya serta inovasi untuk dapat mencapai target akhir Renstra tersebut. Ketidaktercapaian APS 7-12 tahun ini disebabkan karena Kemendikbudristek fokus kepada pemberian bantuan, sehingga belum maksimal dalam penanganan anak tidak sekolah serta penanganan akses pendidikan jenjang SD.



Apabila dibandingkan dengan Provinsi di Indonesia terkait APS 7-12 tahun, terdapat 9 provinsi yang masih dibawah APS Nasional. Provinsi Papua masih menjadi Provinsi yang paling rendah pencapaiannya, dengan hasil capaian 83.61. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi yang memiliki hasil capaian APS 7-12 tahun paling tinggi dengan capaian 99.76.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD/Paket A
2. Program Kejar Mutu Sekolah Dasar

Program Kejar Mutu Sekolah Dasar merupakan program yang dilakukan dalam rangka menyukseskan program Kampanye Sekolah Sehat (KSS) Tahun 2023. Pelaksanaan program dilakukan melalui Pendampingan Kampanye Sekolah Sehat di daerah afirmasi. Program tersebut dilaksanakan melalui mekanisme bantuan pemerintah kepada Perguruan Tinggi/Lembaga/Yayasan/Organisasi Masyarakat.



BANTUAN PROGRAM KEJAR MUTU KAMPANYE SEKOLAH SEHAT (KSS) TAHUN 2023

Kriteria

1. Perguruan Tinggi/Lembaga/Yayasan/Organisasi Masyarakat yang telah berdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan memiliki pengalaman melaksanakan pendampingan di bidang pendidikan;
2. Memiliki visi, misi, dan program kerja yang relevan dengan pembangunan di bidang pendidikan dan/atau kesejahteraan masyarakat;
3. Berbadan Hukum atau sekurang-kurangnya memiliki akta dan notaris;
4. Memiliki struktur organisasi dan susunan pengurus;
5. Sanggup mengelola Bantuan Pemerintah Program Kejar Mutu Kampanye Sekolah Sehat (KSS) Tahun 2023;
6. Sanggup melakukan pendampingan kepada minimal 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar Binaan (untuk setiap paket bantuan) di kabupaten yang berada di daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
7. Memiliki rekening bank dan NPWP atau nama lembaga (bukan rekening atas nama pribadi); dan
8. Memiliki tenaga ahli yang memadai dan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.

Persyaratan

Organisasi mitra mengampun permohonan tertulis kepada Direktur Sekolah Dasar, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbudristek (format permohonan/proposal sebagaimana lampiran 1 Paturjuk Pelaksanaan) dengan melampirkan:

1. Profil Organisasi;
2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. Pakta Integritas;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
6. Foto copy akta notaris atau legalitas organisasi;
7. Fotokopi rekening atas nama organisasi; dan
8. Fotokopi NPWP atas nama organisasi.

Daftar Segera

Paling lambat 6 Agustus 2023 Pukul 23.59 WIB
Pengumuman 8 Agustus 2023

Unduh KAK Kejar Mutu

<http://ringkas.kemdikbud.go.id/kejar mutu2023>

Kirim Dokumen

Dokumen dalam bentuk file dikirim ke email:
subditprogram@kemdikbud.go.id

Dokumen dalam bentuk cetak dikirim ke:
Direktorat Sekolah Dasar,
Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
Gedung E Lantai 18 Kemendikbudristek
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

Narahubung

Nastiyawati 0813-8102-2956
Yono 0812-1271-5553

3. Pemberian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi 146.903 Satuan Pendidikan SD

4. Pembinaan Afirmasi Sekolah Dasar

Program afirmasi adalah program pendidikan bagi daerah-daerah tertentu, sekolah-sekolah dan peserta didik tertentu yang membutuhkan perhatian khusus dalam memperoleh akses dan layanan pendidikan. Tujuan afirmasi pendidikan sekolah dasar adalah mewujudkan hak yang sama terkait akses dan mutu pendidikan kepada semua anak dalam kondisi apapun tanpa terkecuali dalam memperoleh akses dan layanan pendidikan yang layak. Afirmasi pendidikan sekolah dasar dapat diselenggarakan antara lain, melalui:

- a. Pendidikan Inklusif
- b. Pendidikan Layanan Khusus
- c. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
- d. *Community Learning Centre* (CLC)

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik Tahun Pelajaran 2023/2024 pada dapodik;
2. Data valid Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai basis data penanganan anak tidak sekolah belum tersedia;
3. Terdapat penduduk usia 7-12 tidak memiliki waktu untuk sekolah, karena harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga;
4. Lokasi sekolah yang jauh dari tempat tinggal siswa, hal ini disebabkan karena belum meratanya sebaran satuan pendidikan;

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK yang Valid Dukcapil;
2. Melakukan kerjasama dengan Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan basis data penanganan anak tidak sekolah (ATS)
3. Melaksanakan program BOS, PIP, serta afirmasi agar meringankan biaya orang tua/wali penduduk usia 7-12 tahun untuk mengikuti pendidikan SD/ sederajat
4. Memetakan kondisi dan lokasi SD di seluruh Indonesia sebagai bahan perbaikan sebaran SD (zona) dengan memprioritaskan daerah-daerah tertinggal.

IKSS 1.3 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target PK	Realisasi	%		
95,99	95,92	96,34	96,10	99,75	96,55	99,53

Indikator ini menghitung proporsi dari penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia 13-15 tahun, atau dengan kata lain untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

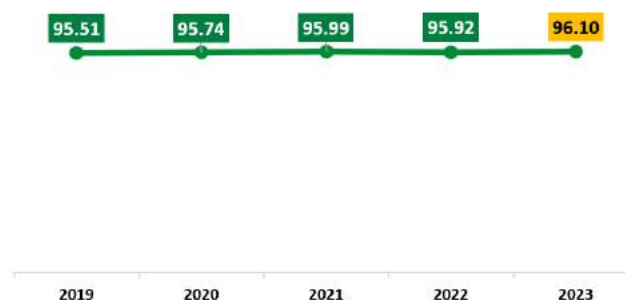
Nilai APS berkisar antara 0-100, makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara

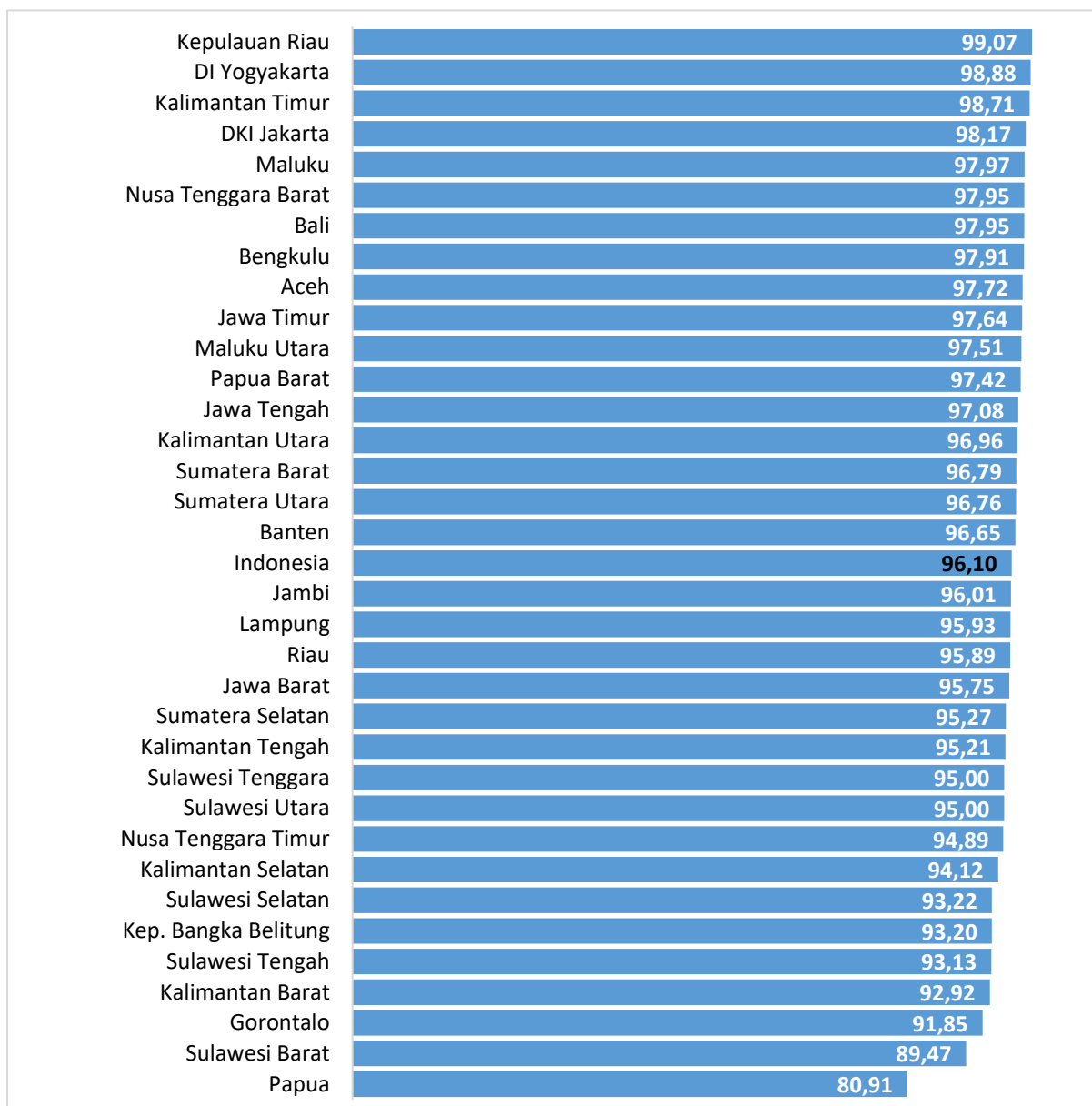
umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

$$APS\ 13 - 15 = \frac{\text{Jumlah penduduk kelompok umur 13 - 15 yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk kelompok umur 13 - 15}} \times 100$$

APS 13-15 tahun telah mengalami kenaikan pada tahun ini setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Pencapaian ini masih belum memenuhi target 2023 yakni sebesar 96,34. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra baru mencapai 99,53% dari target 96,55 sehingga diperlukan strategi dan upaya lebih untuk dapat mencapai target akhir Renstra tersebut.

Tren APS 13-15 Tahun, 2019-2023





Sama halnya dengan APS 7-12 tahun, ketidaktercapaian APS 13-15 tahun ini juga disebabkan karena Kemendikbudristek lebih banyak fokus kepada pemberian bantuan sehingga belum maksimal terhadap penanganan anak tidak sekolah serta penanganan akses pendidikan jenjang SMP. Apabila dibandingkan dengan seluruh Provinsi di Indonesia APS 13-15 tahun, terdapat rentang yang cukup jauh dari Provinsi tertinggi yaitu Kepulauan Riau dengan capaian sebesar 99,07 dan yang paling rendah Provinsi Papua dengan hasil capaian 80,91.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan Program Indonesia Pintar jenjang SMP/Paket B
2. Pemberian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi 40.969 Satuan Pendidikan SMP
3. Pendampingan penguatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP bertujuan untuk memberikan bimbingan, penguatan melalui proses identifikasi, refleksi dan benahi berdasarkan rapor pendidikan daerah sebagai dasar perencanaan yang tepat, dalam rangka pemenuhan SPM SMP pada layanan pendidikan afirmasi.
4. Pemberian bantuan penyelenggara layanan CLC SMP yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan serta meningkatkan keberlangsungan proses pembelajaran yang berkualitas pada CLC SMP.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik Tahun Pelajaran 2023/2024 pada dapodik;
2. Data valid Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai basis data penanganan anak tidak sekolah belum tersedia
3. Terbatasnya daya tampung siswa SMP di daerah afirmasi, hal ini disebabkan oleh belum meratanya sebaran satuan pendidikan di daerah 3T
4. Faktor ekonomi keluarga masih menjadi pertimbangan untuk dapat menyekolahkan anaknya pada SMP/ sederajat.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK yang Valid Dukcapil
2. Melakukan kerjasama dengan Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan basis data penanganan anak tidak sekolah (ATS)
3. Memetakan sebaran SMP di daerah 3T, dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah serta penduduk usia sekolah
4. Melaksanakan program BOS, PIP, serta afirmasi agar meringankan biaya orang tua/wali penduduk usia 13-15 tahun untuk mengikuti pendidikan SMP/ sederajat

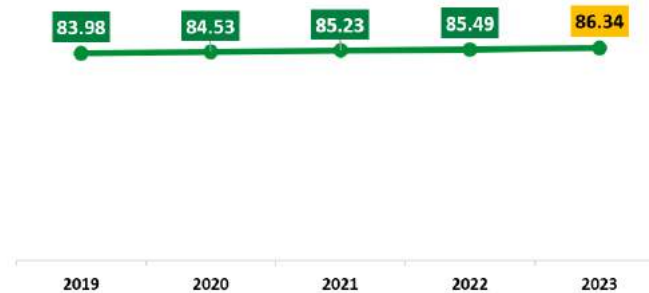
IKSS 1.4 : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target PK	Realisasi	%		
85,23	85,49	92,80	86,34	93,04	95	90,88

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat, negeri maupun swasta terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Penghitungan APK SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

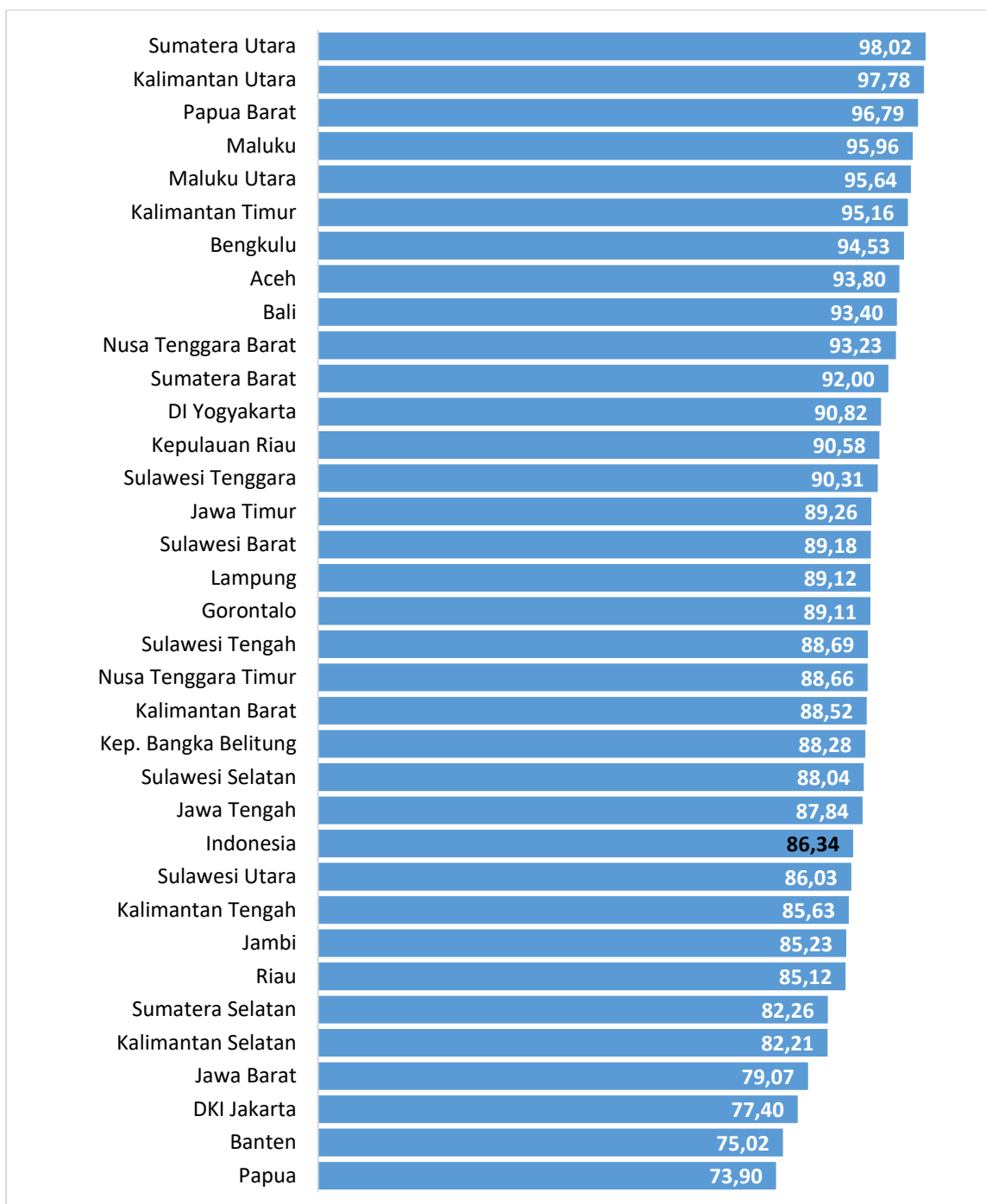
$$APK\ SM = \frac{\text{Jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang SM/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100$$

Tren APK SM/sederajat, 2019-2023



Dalam lima tahun terakhir, capaian APK SM/sederajat cenderung meningkat. Pada tahun 2023, APK SM/sederajat sebesar 86,34 poin (naik 0.85 poin dari tahun 2022). Walaupun peningkatan terjadi dalam lima tahun terakhir APK SM/sederajat belum memenuhi target tahun 2023 yaitu 92,80 atau baru terpenuhi 93,04% dari target tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pun baru terpenuhi 90,88% dari target 95.

Terdapat 6 Provinsi yang capaian APK SM/sederajatnya diatas 95% atau baru 17.6% dari seluruh Provinsi di Indonesia. Selain itu terdapat 10 Provinsi yang capaian APK SM/sederajatnya dibawah capaian Nasional. Salah satu faktor ketidaktercapaian dari APK SM/Sederajat ini adalah keterbatasan daya tampung satuan pendidikan serta kondisi geografis dan letak satuan pendidikan yang sulit di akses untuk bersekolah terutama pada daerah tertinggal.



Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan Program Indonesia Pintar jenjang SMA/SMK/Paket C/Sederajat.

2. Optimalisasi Kemitraan dan Pemberdayaan Komunitas Jenjang SMA, salah satunya dengan Penguatan Kemitraan Daerah Mendukung KMB Wilayah Papua
3. Pembinaan pendidikan kesetaraan berupa Pengembangan Aplikasi Pendidikan Kesetaraan, Kurasi Perangkat Ajar Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Kesetaraan, Pendampingan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar
4. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Implementasi Gerakan Pencegahan Anak Rentan agar tidak Putus Sekolah (ARPS) dan Gerakan kembali Bersekolah



5. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Inklusif sebanyak 245 satuan Pendidikan, serta pendampingan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif jenjang SMA/Sederajat
6. Program SPAB berupa pendampingan terkait mitigasi bencana ke satuan Pendidikan serta penyaluran bantuan sosial darurat bencana

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik Tahun Pelajaran 2023/2024 pada dapodik;

2. Data valid Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai basis data penanganan anak tidak sekolah belum tersedia;
3. Minimnya jumlah satuan pendidikan jenjang SM/Sederajat, sehingga masih ditemukan siswa yang letak satuan pendidikan jauh dari tempat tinggal (terutama daerah terpencil);
4. Faktor ekonomi keluarga masih menjadi pertimbangan untuk dapat menyekolahkan anaknya pada SM/ sederajat;

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

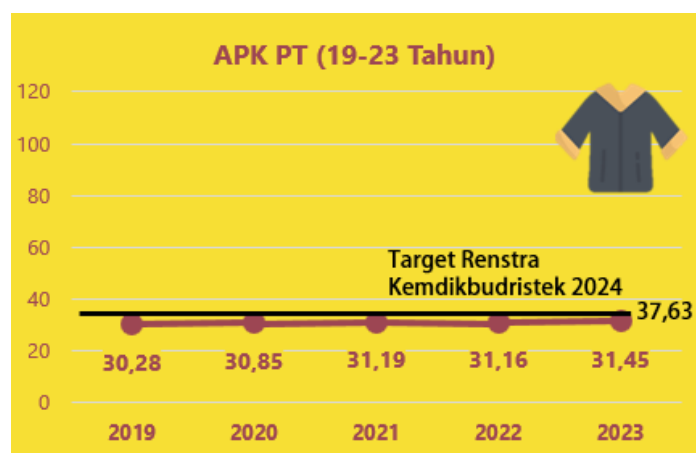
1. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK yang Valid Dukcapil
2. Melakukan kerjasama dengan Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan basis data penanganan anak tidak sekolah (ATS)
3. Memetakan sebaran SM/sederajat, dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah serta penduduk usia sekolah sebagai dasar penentuan pembangunan USB maupun RKB
4. Melaksanakan program BOS, PIP, serta afirmasi agar meringankan biaya orang tua/wali penduduk usia 16-18 tahun untuk mengikuti pendidikan SM/sederajat

IKSS 1.5 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
31,19	31,16	31,89%	31,45%	98,62%	37,63	83,57

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang berusia 19 s.d 24 tahun. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi Perguruan Tinggi, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan tinggi. APK PT dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$APK\ PT = \frac{\text{Jumlah mahasiswa aktif seluruh jenjang PT}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$



Selama lima tahun terakhir APK PT mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak signifikan. Jika dibandingkan dengan target PK 2023 dan target Renstra Kemendikbudristek 2024 ketercapaian APK PT Tahun 2023 masih dibawah target yang ingin dicapai.

Ketidaktercapaian APK PT ini masih sangat bergantung kepada faktor ekonomi. Biaya pendidikan yang relatif besar, terlebih pada pendidikan tinggi, membuat

masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah pada umumnya tidak memiliki dana yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya. Oleh karena itu, banyak anak-anak yang lebih memilih untuk bekerja membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemendikbudristek berupaya menanggulangi hal tersebut salah satunya dengan pemberian bantuan melalui KIP Kuliah Merdeka.



Jumlah mahasiswa penerima manfaat Bidikmisi dan KIP Kuliah



Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Dukungan pendanaan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum kepada

- PTN. Program Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) merupakan bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN dan diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat pembatasan sumbangan pendidikan pada Perguruan Tinggi
2. Dukungan bantuan pengembangan sarana dan prasana bagi perguruan tinggi negeri akademik, baik melalui APBN maupun melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta melalui pembiayaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).
 - a. Pemberian bantuan SBSN kepada Perguruan Tinggi Negeri: yaitu Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Banyuwangi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Maritim Negeri Indonesia, dan Politeknik Negeri Balikpapan, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, dan Institut Teknologi Sumatera
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana melalui pembiayaan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai berikut: Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Palangka Raya, Universitas Sriwijaya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Universitas Mataram
 3. Pendirian program studi baru dan Perubahan Program Studi yang telah diproses di tahun 2023 sebanyak 871 program studi
 4. Merekomendasi pendirian perguruan tinggi swasta dan rekomendasi untuk penataan kelembagaan perguruan tinggi yang terdiri dari penggabungan, penyatuan, perubahan bentuk, perubahan badan penyelenggara, perubahan lokasi, alih kelola, dan perubahan nama perguruan tinggi swasta akademik.

5. Pelaksanaan Prodi Diluar Domisili (PDD) atau Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) pada beberapa PTN
6. Mempublikasikan hasil produk dan prestasi yang diraih oleh insan vokasi pada laman resmi dan media sosial untuk menarik perhatian peserta didik agar memilih melanjutkan pendidikannya ke vokasi.
7. Pemberian bantuan Program KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan, AdIK, dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Terbitnya Kepmendikbudristek Nomor 210 Tahun 2023 tentang IKU Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI pada akhir Juli 2023 memperlambat proses penyaluran penambahan BOPTN terutama untuk PT Vokasi
2. Pelaksanaan SBSN, perencanaan dan pengajuan untuk proses tender membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga memperlambat proses lelang
3. Sarana dan prasarana belum memadai pada PSDKU baik kelengkapan gedung belajar maupun sarana pembelajaran.
4. Masih belum meratanya pembangunan perguruan tinggi terutama didaerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar);
5. Faktor ekonomi merupakan penyebab utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; dan
6. Kebijakan terkait persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menyebabkan pembangunan sarana di beberapa PTN menjadi terhambat dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Vokasi terkait IKU Perguruan Tinggi Negeri Vokasi untuk mempercepat proses penetapan SK penerima penambahan BOPTN.
2. Mempercepat perencanaan dan pengajuan proses tender agar proses lelang tepat waktu
3. Mengupayakan penambahan biaya operasional khusus untuk PSDKU serta melanjutkan pembiayaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi baik melalui APBN, Non APBN, maupun melalui partisipasi masyarakat;
4. Membuka program studi baru yang relevan untuk memperbesar ketersediaan program studi yang diminati dan dibutuhkan;
5. Sosialisasi pentingnya jenjang pendidikan tinggi melalui media massa, kerja sama antar instansi/lembaga, dan dunia kerja dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
6. Mengakselerasi pelaksanaan proyek-proyek yang menggunakan sumber dana SBSN dan PHLN serta menyesuaikan dengan kebijakan terkait TKDN dan menyelesaikan persyaratan administrasi untuk bahan baku yang tidak dapat disubstitusi; dan
7. Melanjutkan program-program inovasi pada Pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan Kampus Merdeka untuk menarik minat masyarakat untuk melanjutkan ke Pendidikan Tinggi.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang

Ringkasan Kinerja

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD	0,52	0,52	100%
Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum			
a. Literasi	59,49%	68,13%	114,52%
b. Numerasi	45,24%	62,51%	138,17%
Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik	30%	33,03%	110,10%
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	48,83%	51,23%	104,91%
Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya	5,5%	9,82%	178,54%
Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP	45%	47,88%	106,40%
Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang Dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1.2X UMP)	20%	31,24%	156,20%

Ketercapaian Sasaran Strategis terkait Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang ditandai dengan meningkatnya nilai capaian pembelajaran yang dimiliki oleh peserta didik pada

masing-masing jenjang pendidikan. Asesmen Nasional (AN) mengukur karakter serta kualitas pembelajaran dan iklim sekolah. Berdasarkan hasil AN tersebut, pada Tahun 2023 ini terdapat peningkatan yang signifikan pada beberapa aspek, salah satunya pada aspek Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi.

Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Literasi meningkat sebesar 8.64 % dari tahun 2022 sebesar 59.49% pada tahun 2023 menjadi 68.13%. Sedangkan, Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi meningkat sebesar 17.27% dari tahun 2022 sebesar 45.24% pada tahun 2023 menjadi 62.51%. Disamping itu peningkatan kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang juga terlihat dari peningkatan jumlah Satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik, peningkatan jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan profesional, serta peningkatan jumlah Peserta Didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya, dan juga jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun selama tahun 2023 ini.

Kemendikbudristek terus berupaya melakukan inovasi dan perbaikan kinerja pendidikan dengan memberikan prioritas pada peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi diseluruh jenjang melalui program-program Merdeka Belajar. Sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka untuk menyusun kurikulum sekolah yang sesuai kondisi, menerapkan asesmen diagnostik dan pembelajaran terdiferensiasi, dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang mengasah karakter Profil Pelajar Pancasila. Guru Menggunakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) Guru menggunakan PMM untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru



dengan mengakses materi Kurikulum Merdeka, ikut pelatihan pembelajaran, dan berbagi dan belajar dari sesama guru dalam komunitas belajar guru. Sekolah dan Pemda Menggunakan Platform Rapor Pendidikan Sekolah dan pemda menggunakan hasil Asesmen Nasional di Platform Rapor Pendidikan untuk identifikasi masalah pembelajaran, merefleksikan penyebab masalah tersebut, dan merancang serta menerapkan kegiatan/program untuk membenahi masalah pembelajaran. Selain itu, Pemda Mengangkat Guru Penggerak menjadi Kepsek dan Pengawas Guru Penggerak diseleksi dan dilatih menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mentransformasi sekolah menjadi lingkungan belajar yang aman, efektif, inklusif dan menyenangkan.

Ketercapaian Sasaran Strategis kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang tersebut didukung oleh 7 IKSS. Adapun tingkat ketercapaian dari IKSS tersebut adalah sebagai berikut.

IKSS 2.1 : Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
0,50	0.53	0.52	0.52	100%	0.53	98.11%

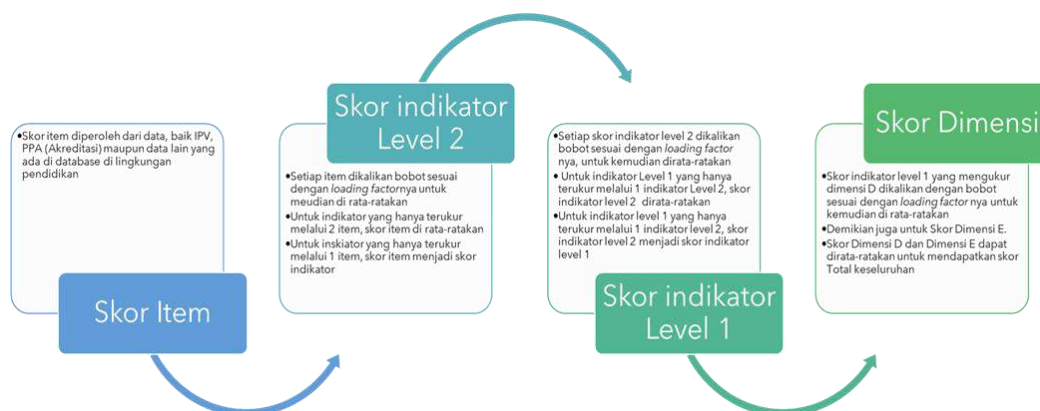
Nilai kualitas lingkungan belajar adalah perhitungan dari sejumlah indikator yang tergabung dalam dua kategori, yaitu:

1. Kualitas proses pembelajaran, meliputi dimensi perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif, Pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, muatan pengembangan yang sesuai kurikulum, dan asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Kualitas pengelolaan satuan berdasarkan kerangka profil pendidikan anak usia dini, meliputi dimensi Indeks ketersediaan sarana prasarana esensial, Indeks iklim keamanan dan keselamatan sekolah, Indeks iklim inklusivitas sekolah, Indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik, Indeks kepemimpinan & kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan layanan, Indeks kemitraan dengan orang tua/wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah, Indeks kapasitas perencanaan, Indeks akuntabilitas pembiayaan, dan pemanfaatan sumber daya satuan.

Kualitas Lingkungan Belajar PAUD dihitung dari sejumlah indikator terkait Kualitas Proses Pembelajaran dan Kualitas Pengelolaan Layanan PAUD butir akreditasi (PPA dan IPV) maupun data dapodik (data terkait sarpras). Pengukuran kualitas lingkungan belajar dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari kegiatan evaluasi sistem PAUD yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan mekanisme yang diatur dalam PP No 57 Tahun 2021 tentang SNP pasal 45. Aspek kualitas proses pembelajaran PAUD berdasarkan PP 57 Tahun 2021 terdiri dari Dimensi D yang mengukur kualitas proses pembelajaran dan Dimensi E yang mengukur kualitas pengelolaan satuan. Masing-masing dimensi tersusun atas beberapa indikator Level 1 dan Level 2.

Skor masing-masing dimensi merupakan nilai komposit dari skor-skor indikator level 1, yang berasal dari sekumpulan skor indikator level 2, yang diperoleh dari sekumpulan butir atau item data yang digunakan. Proses penskoran untuk setiap Dimensi dari data yang tersedia sebagai berikut:



Berikut pencapaian indikator di setiap Dimensi:

Dimensi D	Rata-rata Skor 2022	Rata-rata Skor 2023
D.1. Perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif	0,98	0,98
D.2. Pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini	0,65	0,64
D.3. Muatan pengembangan yang sesuai kurikulum	0,83	0,84
D.4. Asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran	0,98	0,69

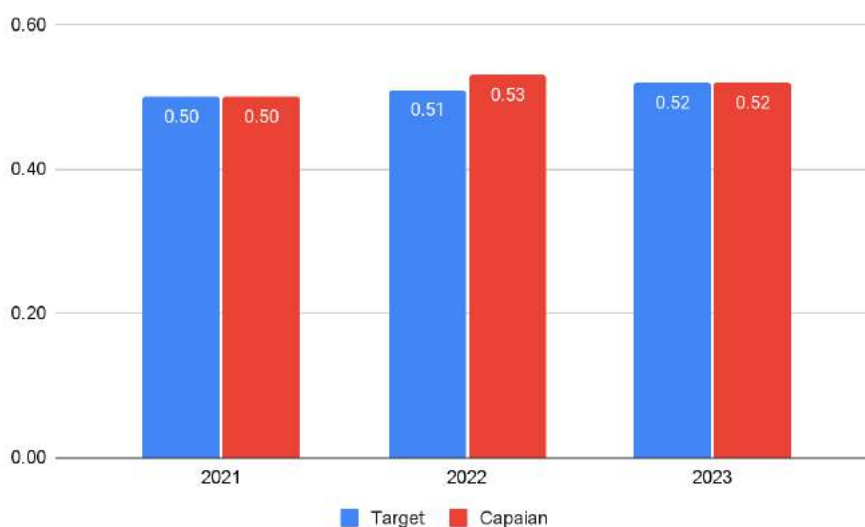
Dimensi E	Rata-rata Skor 2022	Rata-rata Skor 2023
E.1. Indeks ketersediaan sarana prasarana esensial	0,75	0,70
E.2. Indeks iklim keamanan dan keselamatan sekolah	0,40	0,36
E.3. Indeks iklim inklusivitas sekolah	0,60	0,67

E.4. Indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik	0,41	0,42
E.5. Indeks kepemimpinan & kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan layanan	0,73	0,69
E.6. Indeks kemitraan dengan orang tua/wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah	0,51	0,57
E.7. Indeks kapasitas perencanaan	0,75	0,80
E.8. Indeks akuntabilitas pembiayaan	0,87	0,67
E.9. Pemanfaatan sumber daya satuan	0,80	0,78

Tahun 2020 merupakan baseline yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan belajar PAUD. Data ini diperoleh dari hasil *piloting* instrumen BAN yang representatif terhadap populasi dan berdasarkan kategorisasi kualitas satuan. Skor *baseline* (0,49) dihitung dari hasil *lower limit* (batas bawah) dari nilai empiris yang diperoleh untuk mengantisipasi adanya variasi sampel acak di tahun-tahun depan karena jumlahnya akan jauh lebih besar. Target nilai kualitas lingkungan belajar PAUD ditetapkan dengan mempertimbangkan kenaikan skor sebesar 0.01% setiap tahun. Data yang digunakan tahun 2021 sebanyak 3.148 satuan PAUD yang diperoleh dari perhitungan sampel acak di 10 kab/kota dan satuan pelaksana program sekolah penggerak serta kontrol di 110 kab/kota, berdasarkan perhitungan, diperoleh capaian sebesar 0,51. Pada tahun 2022, data yang digunakan sebesar 34.760 satuan PAUD yang telah diakreditasi. Data ini diperoleh dari populasi satuan sasaran akreditasi 2022. Berdasarkan hasil perhitungan

diperoleh nilai capaian sebesar 0,53. Nilai capaian tahun 2022 memiliki persentase 103,92% dibandingkan target di tahun yang sama.

Data yang digunakan tahun 2023 sebanyak 37.093 Satuan PAUD yang terakreditasi dan memiliki nilai capaian sebesar 0,52. Nilai capaian ini memiliki persentase capaian sebesar 100% dibandingkan target di tahun yang sama. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, nilai capaian 2023 memiliki penurunan 0,01 poin, hal tersebut dikarenakan tahun 2023 menggunakan dua mekanisme akreditasi yaitu secara wajib (*compulsory*) dan sukarela (*voluntary*). Satuan yang terpilih (secara acak) sebagai sasaran akreditasi *compulsory* diwajibkan untuk mengikuti akreditasi meskipun satuan tersebut merasa belum siap untuk diakreditasi. Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek No 038/2023 tentang akreditasi yang mewajibkan seluruh satuan pendidikan untuk diakreditasi. Dengan demikian, capaian tahun 2023 sudah menggambarkan kondisi pencapaian ini mengindikasikan bahwa satuan PAUD yang sudah diakreditasi sudah memenuhi indikator pada dimensi D dan E yang merepresentasikan kualitas lingkungan belajar PAUD. Berikut perbandingan target dan capaian tahun 2021 sampai 2023.



Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akreditasi PAUD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan. Akreditasi dilaksanakan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pada pelaksanaan akreditasi PAUD tahun 2023 terdapat target *compulsory* yang ditetapkan oleh Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal PAUDDASMAN Kemendikbudristek yang bertujuan untuk memberikan potret layanan PAUD yang representatif di tiap daerah, sebagai wujud evaluasi satuan PAUD dalam rangka evaluasi sistem pendidikan. Sasaran *compulsory* ditentukan dari seluruh populasi PAUD yang penarikan sampel dilakukan dari tingkat kabupaten/kota.

2. Program survei lingkungan belajar (sulingjar)

Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) adalah salah satu bentuk evaluasi internal satuan pendidikan yang mengukur kualitas pembelajaran dan iklim satuan yang menunjang pembelajaran pada satuan PAUD. Sulingjar PAUD adalah survei yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas layanan PAUD sebagai bagian dari evaluasi

sistem pendidikan. Hasil Sulingjar PAUD akan menjadi informasi lengkap yang akan menjadi acuan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta satuan PAUD dalam melakukan perencanaan dalam bentuk Perencanaan Berbasis Data. Data yang tepat, akan menghasilkan perencanaan yang tepat, untuk memberikan layanan PAUD yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia.



Manfaat pelaksanaan Sulingjar PAUD antara lain:



- Mendapatkan informasi komprehensif dalam bentuk profil pendidikan yang akan memudahkan satuan PAUD dalam menyusun perencanaan (melalui Perencanaan Berbasis Data) dan melakukan peningkatan kualitas layanan di satuan PAUD;
- Turut mendukung kepemilikan data nasional mengenai proses pembelajaran dan pengelolaan PAUD yang belum pernah ada;

- c. Mengetahui kondisi layanan pada suatu wilayah/daerah dan dapat mengidentifikasi dukungan yang dibutuhkan oleh satuan PAUD;
- d. Pemanfaatan profil pendidikan sebagai baseline untuk merancang bentuk pendampingan yang paling sesuai dengan kebutuhan satuan PAUD; dan
- e. Memahami kondisi satuan PAUD sehingga mengetahui bentuk pembinaan seperti apa yang dibutuhkan oleh satuan PAUD.

3. Program perencanaan berbasis data (PBD)

Tujuan Utama Perencanaan Berbasis Data dalam konteks PAUD adalah Perubahan Perilaku satuan PAUD dalam melakukan perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan dengan penguatan kapasitas satuan PAUD dalam melakukan pengelolaan sumber daya melalui perencanaan berbasis data, agar terjadi peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Proses perubahan perilaku tersebut dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Identifikasi kondisi satuan PAUD berdasarkan indikator target kinerja layanan (dimensi D dan E) yang menjadi rujukan evaluasi dan ditampilkan di dalam Rapor Pendidikan.
- b. Refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing
- c. Pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan melalui RKT dan RKAS

4. Pelaksanaan *Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education* (SEA PD on ECCE)



Kemendikbudristek akan melaksanakan *Regional Consultation Meeting on Declaration on Early Childhood Care and Education* sebagai bagian dari forum *Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education* (SEA PD on ECCE) yang melibatkan para menteri pendidikan dari negara-negara anggota ASEAN.



Pendidikan berbasis konteks lokal yang muncul dari budaya dan Sejarah local dapat membawa sejarah tersendiri dalam meningkatkan PAUD dan pengasuhan di wilayah negara-negara ASEAN. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya memberikan Pendidikan anak usia dini yang berkualitas;
- b. Menyediakan platform untuk berbagi pengalaman dan praktik sukses dalam implementasi PAUD dan pengasuhan anak di antara mitra akademik, pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan;
- c. Mengumpulkan dan membagikan laporan negara-negara Asia Tenggara tentang PAUD dan pengasuhan anak di masing-masing negara; dan
- d. Mendiskusikan kebijakan yang berkaitan dengan pengasuhan anak dan PAUD di Asia Tenggara.

5. PAUD *Holistik Integratif* (HI)



PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Program Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dimaksudkan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap layanan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* agar

semakin meningkatkan layanan menuju PAUD berkualitas melalui berbagai strategi.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Pemahaman dasar yang lemah terkait PBD;
2. Belum maksimalnya pelaksanaan Sulingjar PAUD pada beberapa wilayah;
3. Terdapat satuan PAUD yang belum lengkap dalam pemutakhiran data terkait indikator layanan esensial, untuk pemenuhan indikator dalam rangka mewujudkan layanan PAUD berkualitas;
4. Masih minimnya pengetahuan orang tua terhadap kesehatan, gizi, psikososial anak usia dini.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Sosialisasi serta penguatan pemahaman dasar terkait PBD kepada seluruh *stakeholder* terkait;
2. Pendampingan Sulingjar PAUD untuk beberapa lokasi agar pelaksanaan Sulingjar pada Pelaksana Tingkat Kab/Kota dan Satuan PAUD terpantau serta memperoleh gambaran yang komperhensif terkait Praktik baik, kendala dan tantangan dalam pelaksanaan Sulingjar PAUD;
3. Meningkatkan koordinasi antar unit pelaksana program PAUD HI hingga ke daerah serta pemantauan berkesinambungan terhadap pengisian data jenjang PAUD oleh tim Dapodik;
4. Sosialisasi melalui pembuatan video tutorial, video layanan PAUD berkualitas, dan sosial media lainnya untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai perkembangan dan pendidikan anak usia dini.

IKSS 2.2 : Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum Dalam Asesmen Kompetensi Minimum

Asesmen Nasional (AN) merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama AN, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Pada AN, AKM mengukur dua macam literasi, yaitu Literasi Membaca (Baca: Literasi) dan Literasi Matematika (Baca: Numerasi). Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua peserta didik. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran.

Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak terkait untuk melakukan intervensi pendidikan sesuai dengan kondisi sekolah. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Hasil Asesmen Nasional dapat dilihat baik oleh satuan pendidikan maupun pemerintah daerah melalui platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek.

a. Literasi

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
53,39	59,49	59,49	68,13	114,52	52,00	131,02

Kompetensi minimum literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Kemampuan literasi peserta didik dibagi menjadi empat kategori/level yang ditentukan berdasarkan hasil *standard setting* yang dilakukan bersama guru, dosen, dan praktisi penilaian. Berikut adalah level kompetensi literasi.

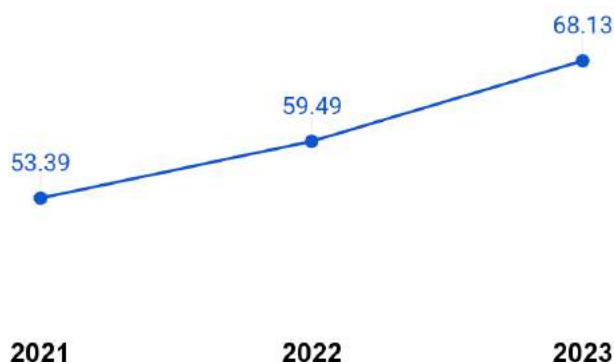
Level peserta didik belum mencapai kompetensi minimum		Level peserta didik yang mencapai kompetensi minimum	
Jauh di bawah kompetensi minimum	Di bawah kompetensi minimum	Mencapai kompetensi minimum	Di atas kompetensi minimum
Peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana.	Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana.	Peserta didik mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks; mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks.	Peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks; mengevaluasi isi; kualitas; cara penulisan suatu teks; dan bersikap reflektif terhadap isi suatu teks.

Kompetensi literasi minimum dimaksud adalah kompetensi literasi membaca sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (grade expected level) dimana peserta didik dinilai telah memenuhi kompetensi minimum, apabila peserta didik pada level mencapai kompetensi minimum dan di atas kompetensi minimum. Perhitungan persentase peserta didik telah memenuhi kompetensi minimum yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah peserta didik mencapai kompetensi minimum} + \text{Jumlah peserta didik di atas kompetensi minimum}}{\text{Jumlah peserta didik peserta AKM numerasi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum bidang Literasi sebesar 68,13%, lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni sebesar 59,49%, dengan persen capaian sebesar 114,52%. Tercapainya target ini melebihi target disebabkan satuan pendidikan sudah mengalami pemulihan pembelajaran setelah pandemi Covid-19 dan Pemerintah melaksanakan program intervensi peningkatan mutu pembelajaran yang sangat masif, melalui program Merdeka Belajar meliputi, implementasi Kurikulum Merdeka, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Merdeka Mengajar, Kampus Mengajar, SMK-Pusat Keunggulan, dan lain sebagainya. Program tersebut memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan capaian AN tahun 2023.

Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum Dalam Asesmen Kompetensi Minimum: Literasi



b. Numerasi

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
32,93	45,24	45,24	62,51	138,17	30,10	207,67

Asesmen Kompetensi Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Kemampuan numerasi peserta didik dibagi menjadi empat kategori/level yang ditentukan berdasarkan hasil *standard setting* yang dilakukan bersama guru, dosen, dan praktisi penilaian. Berikut adalah level kompetensi numerasi.

Level peserta didik belum mencapai kompetensi minimum		Level peserta didik yang mencapai kompetensi minimum	
Jauh di bawah kompetensi minimum	Di bawah kompetensi minimum	Mencapai kompetensi minimum	Di atas kompetensi minimum
Peserta didik hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Peserta didik menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas.	Peserta didik memiliki keterampilan dasar matematika: komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin.	Peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang beragam.	Peserta didik mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya.

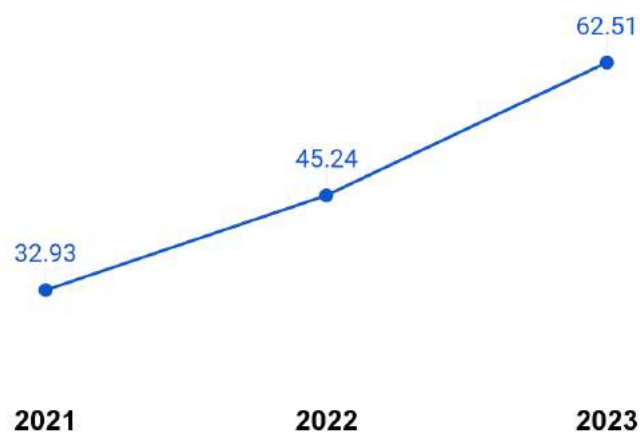
Kompetensi numerasi minimum dimaksud adalah kompetensi literasi membaca sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*) dimana peserta didik dinilai telah memenuhi kompetensi minimum, apabila peserta didik pada level mencapai kompetensi minimum dan di atas kompetensi minimum. Perhitungan persentase peserta didik telah memenuhi kompetensi minimum yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah peserta didik mencapai kompetensi minimum} + \text{Jumlah peserta didik di atas kompetensi minimum}}{\text{Jumlah peserta didik peserta AKM numerasi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum bidang Numerasi sebesar 62,51%, lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni sebesar 45,24%, dengan persen capaian sebesar 138,17%. Tercapainya target ini melebihi target disebabkan satuan pendidikan sudah mengalami pemulihan pembelajaran setelah pandemi COVID-19 dan Pemerintah melaksanakan program intervensi

peningkatan mutu pembelajaran yang sangat masif, melalui program Merdeka Belajar meliputi, implementasi Kurikulum Merdeka, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Merdeka Mengajar, Kampus Mengajar, SMK-Pusat Keunggulan, dan lain sebagainya. Program tersebut memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan capaian AN tahun 2023.

Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum Dalam Asesmen Kompetensi Minimum: Literasi



Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Penetapan literasi sebagai standar kompetensi lulusan

Penyusunan Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah merupakan upaya untuk memastikan bahwa peserta didik di Indonesia memiliki keterampilan literasi dan numerasi yang baik. Permendikbudristek ini menetapkan bahwa literasi dan numerasi merupakan kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada akhir jenjang pendidikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Permendikbudristek ini memuat beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Literasi dan numerasi diintegrasikan dalam kurikulum pada setiap jenjang pendidikan
- b. Pengembangan literasi dan numerasi dilakukan melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif
- c. Pengukuran literasi dan numerasi dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan peserta didik

Dengan ditetapkannya Permendikbudristek tersebut, keterampilan literasi dan numerasi peserta didik di Indonesia diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas pendidikan dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penetapan literasi dan numerasi sebagai standar kompetensi lulusan, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan
- b. Meningkatkan daya saing bangsa
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- d. Menciptakan masyarakat yang cerdas dan berpengetahuan

2. Literasi murid sebagai indikator kinerja Pemda dan satuan pendidikan (Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan)

Asesmen Nasional memetakan kualitas dan kesenjangan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan daerah. Pelaksanaan AN ditargetkan mampu mencapai seluruh sasaran satuan pendidikan dalam memotret mutu Pendidikan.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan AN pada jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, SMA/MA sederajat, dan SMK pada sebanyak 283.567 satuan pendidikan dari total 289,087 satuan pendidikan yang terdaftar pada pendataan AN.

Jenjang	AN 2023		
	Populasi	Melaksanakan AN	%
SMK	13.904	13.822	99,41%
SMA/MA/Paket C/SMALB	32.446	31.312	96,50%
SMP/MTs/Paket B/SMPLB	68.482	66.865	97,64%
SD/MI/Paket A/SDLB	174.255	171.568	98,46%
Total	289.087	283.567	98,09%

Hasil dari Asesmen Nasional akan ditampilkan dalam platform Rapor Pendidikan, yaitu Rapor Pendidikan Daerah dan Rapor Satuan Pendidikan. Pada Tahun 2023 juga diluncurkan Rapor Publik yang ditujukan bagi masyarakat umum. Informasi pada rapor pendidikan menjadi input bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, pemda, dan pemerintah pusat.

- A. Rapor Pendidikan Daerah menggambarkan kondisi layanan pendidikan di daerah dan pencapaian daerah terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan. Rapor Pendidikan Daerah juga memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan yang paling membutuhkan sesuai dengan capaian mutunya di Rapor Pendidikan.
- B. Rapor Satuan Pendidikan memberikan gambaran kondisi layanan Pendidikan di satuan Pendidikan. Rapor Satuan Pendidikan dapat

dimanfaatkan satuan pendidikan dalam menentukan langkah perbaikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan dengan Perencanaan Berbasis Data (PBD).

- C. Rapor Publik memberikan gambaran kondisi layanan pendidikan di tingkat nasional. Rapor Publik diharapkan dapat menjadi media bagi masyarakat untuk bisa bersama-sama menjaga kualitas pendidikan kita.

3. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)

Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dan dukungan bagi pendidik untuk bergotong-royong menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Berdasarkan hasil PISA 2022, peringkat Indonesia untuk literasi membaca, matematika, dan sains naik 5-6 posisi dibandingkan dengan PISA 2018. Walaupun skor rata-rata Indonesia untuk ketiga bidang tersebut turun 12-13 poin, tetapi penurunan skor Indonesia lebih baik dibandingkan penurunan nilai rata-rata PISA Internasional. Penurunan skor ini terjadi di hampir semua negara peserta PISA 2022, kemungkinan akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap pembelajaran.

Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan dalam proses akumulasi sumber daya manusia, yang berdampak terhadap perkembangan modal peserta didik dalam proses belajar mengajar. Selama pandemi Covid-19 sebagian besar sekolah harus menutup sekolah (menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka, baik secara terbatas maupun penuh) dengan total durasi penutupan sekolah sebanyak 644 hari atau lebih dari 21 bulan. Berdasarkan laporan enam bulanan Bank Dunia Indonesia Economic Prospects menunjukkan walaupun Indonesia mengalami penutupan

sekolah paling lama di dunia, tetapi kehilangan pembelajaran (*learning loss*) yang dialami Indonesia lebih baik dari tren kehilangan pembelajaran di dunia.

Meningkatnya peringkat PISA Indonesia dan angka kehilangan pembelajaran (*learning loss*) yang relatif kecil menunjukkan ketangguhan guru, yang didukung oleh berbagai program penanganan pandemi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), salah satunya penyederhanaan materi kurikulum sehingga guru dapat fokus pada pembelajaran yang lebih mendalam, terutama untuk literasi dan numerasi peserta didik. Pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka tidak lagi berorientasi pada penyampaian materi, tapi mengasah kompetensi dan karakter peserta didik. Kurikulum Merdeka mengurangi materi wajib di berbagai mata pelajaran agar guru punya waktu lebih untuk menggunakan pembelajaran yang mendalam, interaktif, dan berbasis proyek. Sampai Tahun Ajaran 2023/2024 hampir 337 ribu (80%) satuan pendidikan umum dengan level implementasi yang bervariasi.

4. Bahan bacaan yang bermutu dan menarik bagi murid

a. Kriteria dan instrumen perbukuan, termasuk standar penilaian dan perjenjangan buku.

Buku bermutu adalah buku yang memenuhi standar mutu buku yang mencakup aspek materi, pembelajaran, desain dan grafika dan juga pedoman perjenjangan buku yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan NOMOR 030/P/2022 tentang pedoman perjenjangan buku

b. Buku teks yang lebih menarik dan sesuai jenjang.

Buku teks utama yang saat ini disusun oleh Pusat Perbukuan lebih menarik karena ada materi pembelajaran berbasis aktifitas yang

ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan materi yang disajikan mengikuti pedoman perjenjangan buku. Kegiatan pembelajaran dan materi disajikan dalam berbagai bentuk, seperti membaca, menulis, mengamati, menggambar, menghitung, mencoba, bernyanyi, berdiskusi, dan bermain peran, materi disajikan secara kontekstual yang terkait perkembangan ipteks dan sosial budaya, dan untuk SMK materi harus memperhatikan relevansi dengan dunia kerja, serta materi baik pengetahuan, keterampilan atau sikap disajikan dalam bentuk teks, gambar, atau akses tautan ke media lain seperti audio, video

c. Penyusunan dan penyediaan buku bacaan berkualitas.

Selain buku teks pelajaran, Pusat Perbukuan juga menyusun buku nonteks pelajaran atau buku bacaan berupa buku model perjenjangan, mulai dari jenjang A (pembaca Dini) B1, B2, B3 (Pembaca Awal), C (Pembaca Semenjana) dan D (Pembaca Madya). Bahkan, salah satu judul buku model perjenjangan ini yang berjudul Pencurian di Rumah Bernyanyi karya Erlita Pratiwi masuk nominasi Scarlett Award.



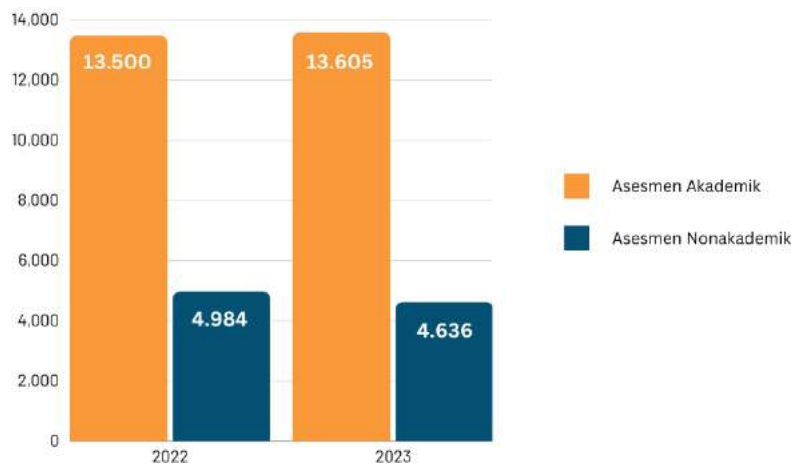
5. Tenaga kependidikan yang kompeten dalam pembelajaran literasi:
 - a. Modul pelatihan Kurikulum Merdeka di Platform Merdeka Mengajar.
 - b. Pelatihan dan pendampingan melalui Program Sekolah Penggerak.
 - c. Pelatihan calon kepek dan pengawas melalui Pendidikan Guru Penggerak

6. Pengembangan soal Akademik dan Non akademik.

Butir soal AKM terdiri dari literasi membaca dan numerasi yang bertujuan untuk mengukur aspek kognitif sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran di satuan pendidikan. Pengembangan Soal Survei Karakter mengukur kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong-royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, serta kemandirian. Sementara itu, pengembangan soal survei lingkungan belajar mengukur berbagai aspek pendukung kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan, sehingga secara komprehensif memberikan profil satuan pendidikan dari kualitas proses pembelajaran.

Pada Tahun 2023, soal yang dikembangkan sejumlah 18.211 butir soal, yang terdiri dari soal akademik (Asesmen Kompetensi Minimum) sejumlah 13.605 butir dan soal non akademik (Survei lingkungan belajar dan survei karakter) sejumlah 4.636 soal.

Butir Soal Dihasilkan



7. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Pelaksanaan Asesmen ditargetkan menghasilkan dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen. Dokumen rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan hasil asesmen nasional yang sudah dilakukan sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Rekomendasi bahan kebijakan dapat digunakan untuk memberikan penguatan mendalam pada peningkatan dan pemetaan mutu pendidikan. Rekomendasi ini juga dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Terdapat satuan pendidikan dalam pelaksanaan AN yang belum mengikuti Prosedur Operasional Standar (POS AN), misalkan masih terdapat pengawasan tidak silang pada saat AN, dan masih terdapat pengisian Survei Lingkungan Belajar yang dilakukan secara tidak mandiri;



2. Belum meratanya sosialisasi dan informasi mengenai pemanfaatan platform AKM Kelas dan asesmen pedia ke seluruh wilayah Indonesia; dan
3. Belum maksimal pemanfaatan hasil AN dalam rapor pendidikan dalam perbaikan pembelajaran

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk melaksanakan AN dengan berintegritas;
2. Melakukan sosialisasi pemanfaatan platform AKM Kelas dan asesmenpedia secara luring; dan
3. Melakukan advokasi kepada sekolah dan pemerintah daerah terkait manfaat asesmen nasional dalam proses refleksi untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran

IKSS 2.3 : Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
-	27,52	30	33,03	110,10	32,50	-

Asesmen Nasional (AN) dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja satuan pendidikan, yang memberikan umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Informasi mengenai

input dan proses pembelajaran diperoleh dari Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) dengan responden peserta didik, pendidik dan kepala satuan pendidikan. Informasi hasil belajar diperoleh dari peserta didik, meliputi hasil belajar kognitif dan hasil belajar non-kognitif. Hasil belajar kognitif diukur melalui AKM sedangkan hasil belajar non-kognitif diukur melalui Survei Karakter.

Survei karakter dan survei lingkungan belajar akan menghasilkan indeks karakter, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan:

- **Indeks karakter** menunjukkan tingkat/ukuran karakter peserta didik dari suatu satuan pendidikan yang dinilai berdasarkan 6 dimensi karakter Profil Pelajar Pancasila.
- **Indeks iklim keamanan** menunjukkan tingkat/ukuran keamanan satuan pendidikan yang dinilai berdasarkan pemahaman atas konsepsi, adanya program kebijakan satuan pendidikan, serta laporan frekuensi terjadinya perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, serta kasus narkoba di satuan pendidikan.
- **Indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan** menunjukkan tingkat/ukuran inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan yang dinilai berdasarkan toleransi antar warga satuan pendidikan, kebebasan berpendapat, dukungan kesetaraan gender dan budaya, komitmen kebangsaan, serta layanan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus baik disabilitas maupun cerdas/ bakat istimewa (CIBI).

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah satuan pendidikan pada semua jenjang dengan indeks karakter, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik terhadap jumlah satuan pendidikan semua jenjang.

Satuan pendidikan dinilai mempunyai indeks iklim keamanan baik apabila satuan pendidikan tersebut berada pada level kondusif. Sementara Satuan Pendidikan yang mempunyai indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan baik apabila satuan pendidikan tersebut berada pada level toleran terhadap keberagaman. Satuan pendidikan dinilai mempunyai indeks karakter baik apabila peserta didik telah terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila.

Berikut adalah level pada indeks indeks karakter, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan.

- **Indeks Karakter**

Kurang	Sedang	Baik
Peserta didik belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global.	Peserta didik telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global, namun masih perlu dukungan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.	Peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.

- **Indeks Iklim Keamanan**

Kurang	Sedang	Baik
Satuan pendidikan belum mendukung terciptanya iklim keamanan dalam aspek kesejahteraan psikologis, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus melakukan intervensi dengan memberikan pengetahuan dan kapasitas kepala satuan pendidikan dan guru untuk mendukung terciptanya iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.	Satuan pendidikan mulai mengembangkan iklim keamanan dalam aspek kesejahteraan psikologis, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Oleh karena itu, satuan pendidikan dapat melanjutkan intervensi dengan meningkatkan kemampuan mencegah dan menangani kasus di lingkungan satuan pendidikan.	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.

• **Indeks iklim kebinekaan**

Kurang	Sedang	Baik
Satuan pendidikan belum mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, budaya, dan gender; memperkuat nasionalisme.	Satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, budaya, dan gender; memperkuat nasionalisme.	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.

• **Indeks iklim inklusivitas**

Kurang	Sedang	Baik
Satuan pendidikan belum mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.	Satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.

Capaian persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik pada tahun 2023 sebesar 33,03%, lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni sebesar 30,00% dengan persen capaian sebesar 110,10%. Tercapainya target ini melebihi target disebabkan satuan pendidikan sudah mulai menerapkan program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi di lingkungan pendidikan.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

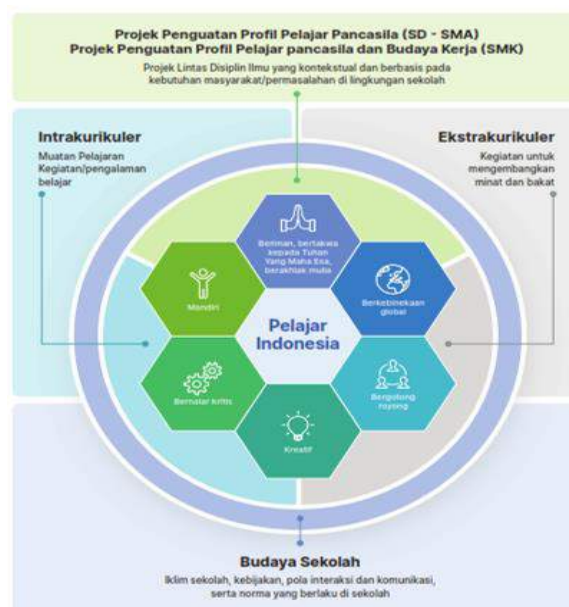
1. Melakukan penyusunan, ujicoba, dan revidi instrumen Sulingjar dan survei karakter pendidikan dasar dan menengah yang terstandar;
2. Melakukan analisis dan pelaporan hasil Sulingjar dan Survei karakter pendidikan dasar dan menengah, sebagai bahan evaluasi pada satuan pendidikan untuk perbaikan kedepannya;
3. Melakukan pendampingan, sosialisasi, dan melaksanakan AN;
4. Supervisi Implementasi dan advokasi Gerakan Sekolah Sehat
Melalui Kampanye Sekolah Sehat yaitu upaya yang dilakukan secara bersama-sama dan terus menerus oleh semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, para mitra, satuan pendidikan, masyarakat pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya penerapan Sekolah Sehat dengan berfokus pada Sehat Bergizi, Sehat Fisik dan Sehat Imunisasi di satuan pendidikan.
5. Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Implementasi Kurikulum Merdeka
Penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila melalui buku saku maupun buku panduan untuk jenjang dasar terutama kepada orang tua jenjang SD.



6. Pendampingan Tindakan Kekerasan di Satuan Pendidikan

Peningkatan kapasitas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan Pendidikan bagi pemangku kepentingan antara lain Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemendikbudristek di daerah, Dinas Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS jenjang SMP, SMA, dan SMK), Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (K3SD), dan Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak (K3TK) Ibu Penggerak, dan Komunitas Guru Mitra Kemendikbudristek.

7. *Workshop 3 Dosa Besar dalam Pendidikan*



8. Pelaksanaan program anti perundungan (*Roots*)

Program Pencegahan Perundungan (*Roots*) ini dikembangkan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan kekerasan antar teman sebaya yang berfokus menciptakan iklim yang aman dan nyaman di sekolah dengan mengaktivasi peran siswa sebagai Agen Perubahan. Program ini dilakukan secara daring untuk menyebarkan pesan tentang bahaya perundungan dan konflik di sekolah. Guru fasilitator memberikan panduan dan pendampingan untuk menyusun materi kampanye anti perundungan yang dapat digunakan oleh siswa sebagai bentuk prakarya.

Terdapat 15 sesi pertemuan yang dilakukan siswa untuk menyusun materi kampanye tersebut sehingga siswa dapat membentuk *soft skill* mereka menjadi remaja yang berperilaku positif.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Keterbatasan kompetensi yang profesional dan pemahaman teknis dalam pengembangan bank soal;
2. Belum maksimal pemanfaatan hasil AN dalam rapor pendidikan dalam perbaikan pembelajaran;
3. Masih belum optimalnya koordinasi Program Gerakan Sekolah Sehat (GSS) lintas Kementerian yang melibatkan Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri;
4. Masih terjadinya perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di tingkat satuan pendidikan baik melalui verbal, tindakan, maupun melalui media sosial;
5. Belum komprehensifnya pemahaman implementasi praktis pengembangan karakter-karakter Profil Pelajar Pancasila dalam kegiatan peserta didik di satuan pendidikan;
6. Program Gerakan Sekolah Sehat (GSS) belum dilaksanakan secara masif sebagai bentuk gerakan bersama dan kesadaran belum terbangun di tingkat pemerintah daerah maupun satuan pendidikan

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan AN dengan baik dan berintegritas;
2. Mensosialisasikan dan menginformasikan dokumen pemanfaatan hasil AN;
3. Membangun koordinasi yang intens dan aktif dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengoptimalkan program GSS;
4. Advokasi kepada satuan pendidikan untuk dapat melakukan pencegahan “Tiga Dosa Besar Pendidikan”;
5. Melaksanakan program-program yang melibatkan langsung peserta didik dalam memberikan ruang-ruang ekspresi pengembangan karakter-karakter profil pelajar pancasila serta mendorong peserta didik untuk berkolaborasi dan mengelaborasi potensi-potensi mereka dalam mengembangkan karakter-karakter profil pelajar pancasila; dan
6. Melibatkan mitra (non pemerintah dan lembaga) dalam program Gerakan Sekolah Sehat dan pencegahan “Tiga Dosa Besar Pendidikan”.

IKSS 2.4 : Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
48,21	50,95	48,83	52,69	107,9	49,83	105,74

Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik terhadap jumlah seluruh guru dan tenaga kependidikan. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan memiliki sertifikat

pendidik terhadap jumlah guru dan tenaga kependidikan. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Guru dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi Guru. Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sertifikat pendidik diberikan pada guru yang sudah memenuhi standar kelayakan dan kemampuan profesional sebagai tenaga pendidik. PPG merupakan perubahan pola sertifikasi bagi guru dalam jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.

Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dalam indikator tersebut adalah:

1. Kepala Sekolah, yaitu Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK/TKLB atau bentuk lain yang sederajat, SD/SDLB atau bentuk lain yang sederajat, SMP/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMK/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN); dan
2. Pengawas Sekolah, yaitu Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Kriteria Guru dan tenaga kependidikan profesional adalah memiliki:

1. Kualifikasi Akademik Minimal S1 atau D-IV

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

2. Sertifikat Pendidik

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional. Proses pemberian sertifikat untuk guru atau tenaga kependidikan adalah melalui sertifikasi. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.

Tahun 2023, capaian terkait persentase guru dan tenaga kependidikan profesional sebesar 52,69%, lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu 48,83%, dengan persentase capaian sebesar 107,90%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 50,95%, terdapat peningkatan capaian sebesar 1,74 poin di tahun 2023. Capaian tahun 2023 ini didukung dengan hasil pencapaian sebagai berikut:

Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2020-2023
Guru mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)	167.784	422.679
Guru mengikuti Pendidikan Guru Penggerak (PGP)	43.896	94.685
<u>Catatan tambahan:</u> Guru yang lulus PGP dan ditetapkan sebagai GP 2023 sebanyak 11.523 orang dan total GP s.d 2023 sebanyak 61.256		



Kegiatan	Capaian 2023	Capaian 2020-2023
Guru mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi secara mandiri	42.174	2.730.767
Guru honorer lulus seleksi guru ASN PPPK	171.410	774.299

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Penandatanganan Dokumen Kerja Sama dengan para Rektor Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG sebagai wujud kesiapan LPTK dalam pelaksanaan PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan di tahun 2023.



2. Pembekalan teknis pelaksanaan Program PPG kepada LPTK penyelenggaran PPG terkait pembaruan sistem dan mekanisme pembelajaran Program PPG tahun 2023. Pembekalan bagi Dosen dan Guru Pamong terkait pelaksanaan PPG Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan, serta Mentoring Skill bagi Guru Pamong dalam rangka penguatan kapasitas Guru Pamong dalam melakukan pembimbingan kepada calon guru dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

WEBCAST

MENTORING SKILL BAGI GURU PAMONG PPG PRAJABATAN

Integrasi Mentoring Skill dengan PPL PPG Prajabatan

1 BATCH 1
Kamis, 14 September 2023
Pukul 13.00 - 15.30 WIB
Tautan Pendaftaran : <https://s.id/WMSGPBATCH1>

2 BATCH 2
Jumat, 15 September 2023
Pukul 13.00 - 15.30 WIB
Tautan Pendaftaran : <https://s.id/WMSGPBATCH2>

3 BATCH 3
Senin, 18 September 2023
Pukul 13.00 - 15.30 WIB
Tautan Pendaftaran : <https://s.id/WMSGPBATCH3>

4 BATCH 4
Selasa, 19 September 2023
Pukul 13.00 - 15.30 WIB
Tautan Pendaftaran : <https://s.id/WMSGPBATCH4>

Speakers:

- Adhika Ganendra, S.Si., M.M.** (Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru)
- Sissy Vidya Paramitasari, S.T., M.T.** (Koord. Pokja Inovasi dan Transformasi Asesmen PPG)
- Concilianus Laos Mbato, M.A., Ed.D.** (Universitas Sanata Dharma)
- Paulus Kuswandono, Ph.D.** (Universitas Sanata Dharma)
- Sheila Salihatunnisa, S.Psi.** (PPGJ Inovasi dan Transformasi Asesmen)
- Yuniawati, S.Pd., M.Pd.** (Universitas Negeri Malang)
- Prof. Anita Triastuti, M.A., Ph.D.** (Universitas Negeri Yogyakarta)
- Puteri Rosati R.D., S.Pd., M.Pd.** (PPGJ Inovasi dan Transformasi Asesmen)
- Dr. Yulia Rahmawati, M.Si.** (Universitas Pendidikan Indonesia)
- Dr. Rika Rafkah Agustin, M.Pd.** (Universitas Pendidikan Indonesia)
- M. Iqbal, S.Pd., M.Si.** (Universitas Pendidikan Indonesia)
- Basikin, Ph.D.** (Universitas Negeri Yogyakarta)
- Prof. Dr. Antuni Wiyarsi, M.Sc.** (Universitas Negeri Semarang)
- Dr. Eva Imania Eliasa, M.Pd.** (Universitas Negeri Yogyakarta)

ppg.kemdikbud.go.id | [f](#) [t](#) [i](#) [d](#) [p](#) [p](#) [p](#) [g](#) [k](#) [e](#) [m](#) [e](#) [n](#) [d](#) [i](#) [k](#) [b](#) [u](#) [d](#) [g](#) [o](#) [i](#) [d](#) | [P](#) [P](#) [G](#) [G](#) [T](#) [K](#) [K](#) [e](#) [m](#) [e](#) [n](#) [d](#) [i](#) [k](#) [b](#) [u](#) [d](#)

3. Penjaminan mutu Program PPG untuk peningkatan kualitas pelayanan LPTK dalam penyelenggaraan PPG serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) untuk melihat kelayakan/kecukupan fasilitas pada pelaksanaan UKMPPG di LPTK penyelenggara PPG.



4. Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong sinergi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diantaranya peningkatan kualitas guru melalui Program Pendidik Guru Penggerak dan memperkuat kapasitas Guru Penggerak menjadi kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik.



5. Koordinasi penataan manajemen ASN Bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan sesuai standar.



Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Masih terdapat kendala sistem pada saat pelaksanaan UKMPPG, karena sistem belum dapat mengakomodir peserta login secara bersamaan dalam jumlah banyak. Selain itu juga masih terdapat indikasi curang dalam pelaksanaan UKMPPG oleh peserta.
2. Keterbatasan Dinas Pendidikan mengakses data ketersediaan kandidat kepala sekolah yang sesuai dengan ketentuan regulasi dan kebutuhan kepala sekolah di daerahnya sesuai kondisi lapangan.

3. Kesulitan guru dalam mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi secara mandiri adalah menemukan prioritas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya dan mengenali kelebihan dan kekurangannya sebagai pendidik.
4. Pemenuhan guru di satuan pendidikan belum berjalan optimal dan kebutuhan guru dibandingkan dengan ketersediaan calon guru yang kompeten tidak berimbang. Di sisi lain, pada saat kebijakan pengadaan ASN guru dibuka, pemerintah daerah belum mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan LPTK penyelenggara PPG agar meningkatkan penjaminan mutu terkait kelayakan/kecukupan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga pengawas dan helpdesk/tim IT untuk membantu peserta sampai peserta dapat langsung login dan mencegah peserta bertindak curang selama pelaksanaan uji kompetensi.
2. Menyiapkan sistem pengangkatan kepala sekolah secara digital yang terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar sebagai bagian dari peta besar transformasi tata kelola dan karir guru, yaitu manajemen talenta guru dan tenaga kependidikan.



3. Menyiapkan fitur Rekomendasi Belajar berbasis Rapor Pendidikan dan Refleksi Kompetensi di Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang bertujuan untuk memudahkan guru menemukan prioritas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan, serta membantu guru-guru dalam mengenali kelebihan dan kekurangannya sebagai pendidik.



4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pemenuhan guru di satuan Pendidikan dapat optimal dan pemerintah daerah dapat mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan sekolah.

IKSS 2.5 : Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
-	7,6	5,5	9,82	178,54	6	163,67

Peserta didik berprestasi adalah peserta didik yang berhasil meraih medali emas, perak, perunggu, atau bentuk penghargaan lainnya pada ajang talenta dan non- ajang talenta yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) atau Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), atau pihak penyelenggara lainnya yang diakui oleh Puspresnas melalui proses kurasi. Proses kurasi adalah proses penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Puspresnas terhadap ajang talenta dan non-ajang talenta yang bukan diselenggarakan oleh BPTI dan Puspresnas.

Ajang Talenta merupakan kegiatan kompetisi atau festival untuk menghasilkan peserta didik berprestasi. Sedangkan, non-ajang talenta merupakan kegiatan pameran atau bentuk kegiatan lainnya di luar kompetisi dan festival yang menghasilkan peserta didik berprestasi.

Fasilitasi karir belajar adalah pemberian manfaat kepada peserta didik berprestasi yang dapat berupa hal-hal material maupun non-material untuk menunjang karir belajar. Adapun yang termasuk dalam fasilitasi karir belajar adalah:

1. Kemudahan bagi peserta didik untuk diterima masuk ke satuan pendidikan lanjutan, yaitu dari jenjang SD/Sederajat ke SMP/Sederajat, serta dari jenjang SMP/Sederajat ke SMA/SMK/Sederajat, melalui program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi atau jalur lainnya yang relevan;

2. Kemudahan bagi peserta didik pendidikan menengah untuk diterima masuk ke perguruan tinggi pilihan melalui jalur prestasi atau jalur khusus/red-carpet yang disediakan oleh lembaga perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. Pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, pelatihan, atau pengembangan keahlian di berbagai bidang ke perguruan tinggi atau institusi lainnya yang berada di dalam ataupun luar negeri.

Fasilitasi karir profesional adalah pemberian manfaat kepada peserta didik berprestasi pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang dapat berupa hal-hal material maupun non-material untuk menunjang karir profesional. Yang termasuk dalam fasilitasi karir profesional adalah:

1. Pemberian akses peningkatan keterampilan atau kekerjaan.
2. Pemberian fasilitasi untuk mengembangkan jiwa wirausaha, magang, inkubator bisnis, mentoring bisnis, modal rintisan, atau pemberian insentif lainnya untuk menunjang kemandirian berwirausaha.
3. Pemberian fasilitasi pengembangan talenta riset, inovasi, bahasa, dan literasi
4. Pemberian fasilitasi pelatihan talenta olah raga dan insentif lainnya yang relevan.
5. Pemberian fasilitasi untuk pengembangan ketalentaan seni budaya untuk berkiprah di industri kreatif.

Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) Puspresnas adalah sistem informasi yang merekam, mengolah dan menyajikan data dan informasi peserta didik berprestasi. Pada tahun 2023 ketercapaian indikator Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya ini tercapai melebihi yang ditargetkan. Adapun dari target 5,5 pada tahun 2023 sudah tercapai 9,82 dengan persentase ketercapaian 178,54. Ketercapaian tahun 2023 ini pun telah melebihi target Renstra tahun 2024 yang menargetkan sebagai 6.

Faktor keberhasilan dari ketercapaian indikator ini dikarenakan realisasi jumlah peserta didik berprestasi yang mendapatkan fasilitas karir belajar dan karir profesional pada tahun 2022 sebanyak 400 orang. Pada Tahun 2023 target yang diusulkan sebanyak 400 orang dan pada realisasinya terjadi penambahan sebanyak 350 orang yang merupakan pengalihan target Tahun 2024 sehingga

menambah capaian pada tahun 2023. Akumulasi hingga tahun 2023 sebanyak 1.150 orang.



Akumulasi jumlah peserta didik berprestasi yang terdokumentasi pada sistem informasi manajemen talenta Puspresnas akumulasi sampai dengan tahun 2023 adalah 11.000 orang yang berasal dari Juara Nasional dan Internasional yang ada di Sistem Informasi Manajemen Talenta serta peserta yang mendapat kurasi bintang 5.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Kursus persiapan komprehensif dengan lembaga kursus persiapan tes TOEFL/IELTS dan tes resmi
2. Kursus persiapan komprehensif dengan lembaga kursus persiapan tes SAT / ACT dan tes resmi

3. Proyek Sosial yaitu proyek kelompok yang dilakukan di masing-masing daerah asal bertujuan untuk memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Penyelenggaraan *boothcamp* sebanyak 8 seri.



4. *Summer Program* yaitu program pengayaan di PT luar/ dalam negeri atau magang di perusahaan dalam negeri untuk meningkatkan kesiapan kuliah dan kerja
5. Seri webinar yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi konsultan pendidikan dan PT luar negeri. Penyelenggaraan webinar series sebanyak 30 seri
6. *College Counselling* yaitu bimbingan dengan konselor berpengalaman untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan pendaftaran ke PT tujuan.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Untuk Peserta BIM yang telah mendapatkan LoA belum berarti mereka lolos mendapatkan beasiswa S1 Luar Negeri dikarenakan mereka tidak lulus dalam seleksi akhir di PTLN seperti nilai IELTS/SAT belum sesuai dan persyaratan lain yang belum terpenuhi hingga batas waktu yang

ditentukan atau sudah lulus di PTLN tersebut tetapi untuk pembiayaan di LPDP nya tidak mendapat kuota.

2. Proses seleksi yang memakan waktu lebih lama dikarenakan pembacaan LoA untuk seleksi bergelar sistem bergelombang
3. Implementasi Kurikulum Nasional menjadi pertimbangan bagi pendaftaran PTLN dikarenakan peserta hanya bisa mendaftar pada universitas yang menerima kurikulum nasional (di wilayah Asia, Amerika, Australia) dengan menggunakan SAT/ACT
4. Peserta didik dari program vokasi atau SMK mengutamakan jadwal PKL, sehingga peserta kurang optimal dalam mengikuti materi pembelajaran dan menyebabkan kemampuan bahasa inggris untuk peserta *Summer/Winter Youth Program* kurang memadai.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Koordinasi dan bekerjasama antara Kemendikbudristek (Puspresnas, Ditjen Diktiristek, Ditjen Vokasi) serta Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama terkait penyaluran penerima BIM program persiapan ke PTDN
2. Pembacaan LoA untuk seleksi bergelar akan melibatkan *College Counselor*
3. Melakukan penyelenggaraan SAT/ACT lebih awal sehingga peserta lebih mudah dalam memilih perguruan tinggi yang mengimplementasikan kurikulum nasional
4. Mendorong peserta olimpiade internasional terutama siswa SMK untuk berkomitmen mengikuti pembinaan olimpiade yang diselenggarakan oleh Puspresnas yang disahkan melalui surat komitmen

IKSS 2.6 : Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
-	45,22	45	47,88	106,40	47,77	100,24

Indikator keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja atau berwirausaha. Lulusan Pendidikan vokasi yang dimaksud pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini berasal dari lulusan SMK dan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi melalui Program Diploma I, II, III, dan IV/Sarjana Terapan. Adapun UMP (Upah Minimum Propinsi) atau Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur. Berikut metode perhitungan dari indikator ini:

$$I = \frac{\text{Jmlh lulusan pendidikan vokasi yg dalam 1th stlh kelulusan, bekerja/berwirausaha dgn upah/gaji/pendapatan min 1x UMP}}{\text{Jumlah lulusan pendidikan vokasi yg dlm 1th setelah kelulusan}} \times 100\%$$

Perhitungan indikator ini didapatkan dari BPS dengan rincian sebagai berikut:

OPSI 2 (Metadata 2)

Persentase lulusan pendidikan Vokasi (SMK dan D1-D4) yang **lulus setahun terakhir dan bekerja maksimal setahun** dengan penghasilan/gaji minimal 1x UMP

INDIKATOR	PERIODE LULUS SETAHUN TERAKHIR	PERIODE BEKERJA	STATUS PEKERJAAN	RUMUS INDIKATOR
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
a) Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Lulus Setahun Terakhir & bekerja setahun terakhir	UNTUK LULUSAN SMK: Juni (tahun sebelumnya) – Mei (untuk data Agustus) UNTUK LULUSAN D1-D4: Agustus – Agustus (untuk data Agustus)	UNTUK LULUSAN SMK: Juni (tahun sebelumnya) – Mei (untuk data Agustus) UNTUK LULUSAN D1-D4: Agustus – Agustus (untuk data Agustus)	Status 3: Berusaha dibantu pekerja tetap/dibayar Status 4: Buruh/karyawan/pegawai	$\frac{\text{Jumlah lulusan pendidikan Vokasi (SMK dan D1-D4) yang lulus dalam 1 tahun terakhir dan bekerja 1 tahun terakhir dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1x UMP}}{\text{Jumlah lulusan pendidikan Vokasi (SMK dan D1-D4) yang lulus dalam 1 tahun terakhir dan bekerja 1 tahun terakhir}} \times 100$



NO	INDIKATOR	2023 Agustus			
		Pendapatan/Penghasilan/ Upah/Gaji Bersih Sebulan			Indikator (%)
		< 1X UMP	>= 1X UMP	Total	
	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Lulus Setahun Terakhir			1,556,048	
a	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Lulus Setahun Terakhir & Bekerja Setahun terakhir	186,073	170,942	357,015	47.88

Ketercapaian indikator ini pada tahun 2023 mencapai 106,40 dengan capaian 47,88 dari yang ditargetkan 45. Capaian 2023 ini telah mencapai target Renstra 2024 yaitu sebesar 47,77. Walaupun target 2024 telah tercapai, harapannya capaian pada tahun 2024 akan lebih meningkat dari tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 2,66 poin.

Adapun salah satu faktor penunjang ketercapaian indikator ini dikarenakan peningkatan pembelajaran, penguatan SDM, penyelarasan kompetensi serta beberapa peningkatan kualitas standar sarana dan prasarana sehingga meningkatkan jumlah lulusan pendidikan vokasi yang bekerja dalam jangka waktu satu tahun kelulusan.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Program SMK Pusat Keunggulan, dimana telah dilakukan penetapan dan penyaluran bantuan kepada 1.851 SMK penerima. Sekolah yang telah berturut-turut selama 3 tahun diberikan intervensi lanjutan didorong untuk memberikan imbas praktik baiknya kepada SMK di sekitarnya. Dengan adanya pengimbasan praktik baik ini diharapkan SMK lainnya mampu

menerapkannya di ekosistem tata kelola institusinya. SMK yang memberikan pengimbasan yaitu sebanyak 1.401 SMK PK lanjutan. Terdapat juga SMK Pusat Keunggulan dengan skema pepadanan dukungan dari industri mitra, dimana harapannya mampu memberikan intervensi yang komprehensif dari sisi fisik maupun non fisik sehingga pendidikan SMK akan mampu mencetak lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

2. Pelaksanaan sertifikasi kepada peserta didik SMK, telah dilakukan kepada 46.960 siswa. Untuk sertifikasi kompetensi keahlian dalam pelaksanaannya sebanyak 30.000 siswa. Untuk bahasa asing sebanyak 16.960 siswa. program ini diharapkan mampu memberikan jaminan terstandar kepada lulusan SMK sehingga mampu mendapatkan kepercayaan dari dunia kerja.
3. Program pengembangan SMK dalam mendukung industri 4.0 bertujuan untuk menciptakan lulusan dengan kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Pada tahun 2023 program pengembangan SMK dalam mendukung industri 4.0 diberikan kepada 80 SMK (31 SMK Baru dan 49 SMK lanjutan). Bantuan digunakan untuk workshop peningkatan pembelajaran, penguatan SDM, penyelarasan kompetensi serta beberapa peningkatan kualitas standar sarpras agar menjadi SMK yang dapat mendukung industri 4.0. Semua kegiatan sudah terlaksana dengan baik di 80 SMK tersebut.
4. Program SMK mendukung produk kreatif dan kewirausahaan. Program ini dilaksanakan untuk menciptakan lulusan SMK dengan kemampuan *entrepreneurship*. Lulusan ditargetkan untuk memiliki peluang mendapatkan penghasilan sesuai dengan standar upah minimal yang ditentukan. Pada tahun 2023 sebanyak 240 sekolah diberikan bantuan untuk mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan dimana 52 sekolah diantaranya diberikan bantuan untuk melaksanakan pembelajaran

teaching factory. Program ini bertujuan untuk meningkatkan lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha.

5. Program Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri (*Competitive Fund*), dengan total 119 Program Studi telah menerima bantuan program dan seluruh dana bantuan yang diterima ditujukan untuk proses penguatan mutu berstandar industri.
6. Program P3TV-PTS tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 52 Perguruan Tinggi Swasta yang lolos verifikasi administrasi dan evaluasi kelayakan sebagai penerima bantuan. Bantuan yang diberikan berupa barang yang relevan dengan pembelajaran pada prodi yang akan ditingkatkan mutunya dan bukan untuk mendukung penelitian dosen.
7. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Industri yang dilaksanakan untuk perancangan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), penerapan kurikulum *link and match*, serta pembahasan terkait pelaksanaan RPL D2 *fast track* dan transformasi D3 ke D4. Bimtek penyusunan kurikulum PTV dilaksanakan dalam 2 tahap, tahap 1 dilakukan ke sebanyak 276 peserta pada 164 perguruan tinggi, dan tahap 2 dilakukan ke sebanyak 118 peserta pada 81 perguruan tinggi.
8. Program Pendidikan Kecakapan Kerja adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk memberikan bekal dan keterampilan kepada anak usia sekolah yang tidak bersekolah di usia 17–25 tahun agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri dunia usaha dan dunia kerja. Pada tahun 2023 menargetkan pemberian bantuan kepada 11.790 peserta didik. Total peserta didik yang telah menerima bantuan PKK sebanyak 38.842 orang peserta didik, dan dari jumlah tersebut peserta didik yang telah bekerja sebanyak 21.859 orang. Jumlah persentase serapan lulusan PKK ini terus berkembang seiring dengan terserapnya lulusan program PKK di DUDIKA.

9. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah salah satu program prioritas nasional yang juga merupakan *Major Program* (MP) yang bertujuan untuk memberikan bekal dan keterampilan kepada anak usia sekolah yang tidak bersekolah di usia 15–25 tahun agar memiliki kompetensi wirausaha dan bisa memulai rintisan usaha sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Adapun standar pelayanan program PKW berdasarkan laman website <https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pkw/> sebagai berikut:



Pada tahun 2023 menargetkan pemberian bantuan kepada 7.910 peserta didik. Total peserta didik yang telah menerima bantuan PKW sebanyak 26.135 orang peserta didik, dari jumlah tersebut peserta didik yang telah merintis usaha sebanyak 21.728 orang. Jumlah persentase lulusan PKW yang telah berwirausaha ini akan terus bertambah seiring dengan waktu selesainya pelatihan.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Industri yang masuk dalam kategori industri 4.0 belum tersebar secara merata sehingga sebagian besar SMK yang didorong untuk melakukan penyelarasan dengan industri kategori 4.0 mengalami kesulitan dalam mencari mitranya.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan jiwa wirausaha kepada anak sehingga kurangnya dukungan dari pihak keluarga bagi siswa untuk berwirausaha.
3. Proses realokasi dana bantuan *competitive fund* bagi Politeknik Negeri dan Akademi Komunitas Negeri memakan waktu hingga 3 bulan sehingga pelaksanaan program terlambat.
4. Banyak peserta Bimtek kurikulum berbasis industri belum bisa merumuskan capaian pembelajaran sesuai program studi berdasar panduan penyusunan kurikulum PTV dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.
5. Berdasarkan data pelaporan pada sistem PDDikti masih cukup banyak PTPPPV yang belum melaporkan data pelaksanaan model pembelajaran PBL secara riil karena terkendala pada format baku yang ada pada sistem PDDikti yang tidak dapat mengakomodir semua kebutuhan data model pembelajaran PBL sesuai Perdirjen Nomor 27 Tahun 2022.
6. Adanya perubahan penempatan kerja peserta didik pada program PKK sehubungan dengan kebutuhan tenaga kerja pada DUDIKA.
7. Pada program PKW, pendampingan rintisan usaha belum dilakukan secara optimal karena tidak adanya anggaran untuk pendampingan rintisan usaha.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Mendorong SMK untuk berkolaborasi dengan dunia kerja baik dalam pembelajaran maupun pengembangan unit usaha dengan membentuk inkubator bisnis sehingga peserta didik dapat merasakan atmosfer budaya kerja. Disamping itu, inkubator bisnis yang dibentuk bersama diharapkan akan mendorong lulusan SMK agar lebih kreatif untuk berwirausaha.
2. Sekolah diarahkan untuk melakukan pembinaan kepada peserta didik yang telah mempunyai usaha/ berwirausaha untuk di kembangkan menjadi lebih baik.
3. Proses Seleksi T.A. 2024 dimulai lebih awal (T-1) untuk mengantisipasi proses realokasi dana bantuan yang kemungkinan masih akan memakan waktu lama.
4. Melakukan reviu dan perbaikan capaian pembelajaran untuk menjadi acuan minimal bagi program studi vokasi.
5. Penyesuaian konten dan format pelaporan data pelaksanaan model pembelajaran PBL pada sistem PDDikti untuk mengakomodir kebutuhan yang sesuai Perdirjen Nomor 27 Tahun 2022, dan diperlukan strategi penghitungan data pelaksanaan model pembelajaran PBL oleh bagian akademik di masing-masing perguruan tinggi.
6. Melakukan pembaharuan data penempatan kerja sehingga peserta didik dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.
7. Mempersiapkan format pendampingan rintisan usaha agar proses pendampingan dapat dilakukan secara terukur dan terencana dengan memanfaatkan *best practice* penyelenggaraan program PKW serta hasil evaluasi dampak program PKW.



IKSS 2.7 : Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1.2X UMP)

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
-	35,89	20	31,24	156,2	20,50	152,39

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan tinggi diindikasikan dengan semakin banyaknya jumlah mahasiswa lulusan pendidikan tinggi langsung bekerja. Lulusan yang dimaksud adalah lulusan Program Sarjana di jenis pendidikan tinggi akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari satu tahun setelah kelulusan. Cakupan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus, termasuk yang sementara tidak bekerja. Mencakup semua status pekerjaan, termasuk yang berwirausaha dengan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP).

INDIKATOR	2023 AGUSTUS			Indikator (%)
	Pendapatan/Penghasilan/ Upah/Gaji Bersih Sebulan		Total	
	< 1,2X UMR	>= 1,2X UMR		
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Lulus Setahun Terakhir			1,065,201	
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Lulus SetahunTerakhir & Bekerja (mulai bekerja kapanpun, bisa sebelum atau sesudah lulus) *(SEMUA STATUS PEKERJAAN 1-7)*	474,428	184,707	659,135	28.02
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Lulus SetahunTerakhir & Bekerja (mulai bekerja kapanpun, bisa sebelum atau sesudah lulus) *(HANYA STATUS PEKERJAAN YANG DITANYAKAN PENGHASILAN/UPAH)*	406,530	184,707	591,237	31.24

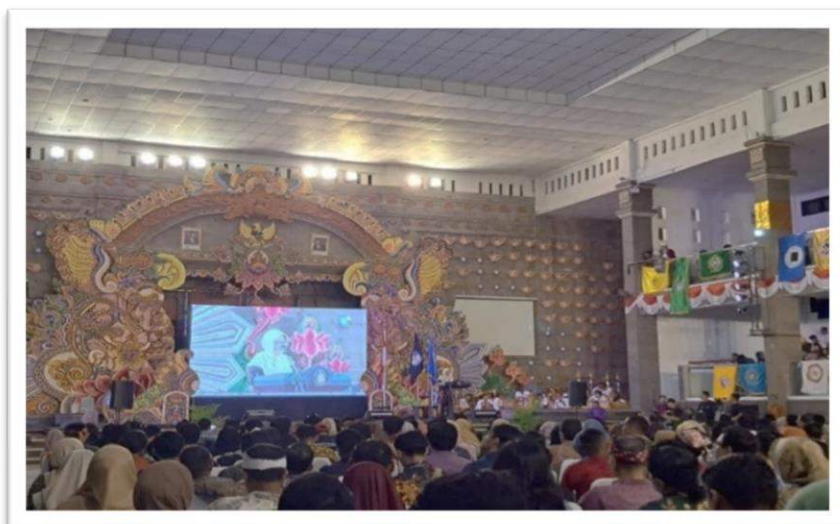
Capaian indikator ini pada tahun 2023 sebesar 31,24. Capaian tersebut mengalami penurunan 4.65% dari tahun 2022 yakni 35,89. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2022, capaian tersebut telah melebihi target 2023 sebesar 20 dan juga melebihi target 2024 sebesar 20.50. Perlu ada strategi serta inovasi yang lebih lagi agar capaian tahun 2024 tidak hanya melebihi target namun dapat menyamakan bahkan lebih dari capaian tahun 2022.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)

P2MW merupakan program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui bantuan dana pengembangan dan pembinaan dengan melakukan pendampingan serta pelatihan (*coaching*) usaha kepada mahasiswa peserta P2MW. Penerima bantuan ini adalah PTN dan PTS akademik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas P2MW maka diselenggarakan program pendukung seperti Pelaksanaan Indonesian Student Entrepreneur Camp (ISEC) pada Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2023 dan Pelaksanaan Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo XIV Tahun 2023.



2. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Program Kreativitas Mahasiswa adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional.



3. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PKK Ormawa)

Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PKK Ormawa) adalah program penguatan kapasitas ormawa melalui serangkaian proses pembinaan ormawa oleh PT yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.



4. Wirausaha Merdeka (WMK)

Program Wirausaha Merdeka berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi Pelaksana Program mengembangkan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa. Program Wirausaha Merdeka diharapkan mampu untuk memantik minat dan semangat mahasiswa dalam berwirausaha, menanamkan mindset dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa, meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa, dan membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan Perguruan Tinggi. Sebanyak 34 PT yang berhasil menjadi pelaksana program Wirausaha Merdeka pada tahun 2023.



5. Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) merupakan bagian dari program Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang atau kursus dengan proyek akhir di perusahaan kelas dunia. Melalui bimbingan mentor profesional, mahasiswa didorong untuk memecahkan masalah nyata dan mengasah keterampilan kerja. MSIB memfasilitasi pengalaman terjun langsung ke dunia industri untuk para mahasiswa sekaligus menyediakan calon talenta yang siap masuk dunia kerja.

6. *Indonesia International Student Mobility Awards (IISMA)*

Program Indonesian International Students Mobility Awards (IISMA) ini diinisiasi dan diselenggarakan oleh Kemendikbudristek yang bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuan serta memberikan pengalaman studi di perguruan tinggi luar negeri. Program yang memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengembangan diri dan belajar di luar kampusnya pada perguruan tinggi terkemuka di luar

negeri berdasarkan QS Ranking dan rekam jejak kolaborasi mitra luar negeri dengan industri di negaranya.

7. Kampus Mengajar (KM)

Program ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang membutuhkan tenaga pengajar yang memiliki keahlian khususnya literasi dan numerasi dengan memberdayakan para mahasiswa untuk membantu para guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Program Kampus Mengajar (KM) menghadirkan mahasiswa untuk menjadi mitra guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek berdasarkan hasil pemetaan yang mengacu pada data Dapodik dan Asesmen Nasional (AN) Tahun 2022. Program KM merupakan program purna waktu yang dilaksanakan secara luring di sekolah sasaran selama satu semester dalam satu angkatan.

8. Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)

Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka berorientasi untuk memberikan pengalaman belajar di perguruan tinggi di Indonesia dan pengalaman kebinekaan melalui aktivitas Modul Nusantara untuk memupuk semangat persatuan dan nasionalisme Indonesia. Peserta mendapatkan nilai tambah dan manfaat pengalaman yang membuat mereka semakin matang menghadapi situasi dan realita hidup berbangsa dan bernegara, memahami keberagaman dan kondisi sosial kemasyarakatan dalam suasana kebinekaan NKRI melalui aktivitas Modul Nusantara untuk memupuk semangat persatuan dan nasionalisme Indonesia.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Tidak meratanya pemahaman atas MBKM pada Perguruan Tinggi karena belum mengoptimalkan sub-sistem Perguruan Tinggi sehingga “jarak dan jangkauan” informasi yang terpusat tidak sampai secara terstruktur dan institusional;
2. Wilayah Indonesia yang luas dengan keragaman yang ada belum dilihat sebagai suatu kondisi yang tidak homogen sehingga implementasi tidak dapat “*one size fits all*” dan masing-masing wilayah memiliki tantangan yang berbeda; dan
3. Wilayah Indonesia memiliki beragam potensi yang belum dioptimalisasi dan dapat menjadi arah pengembangan MBKM sehingga kontribusinya akan jelas dan terukur bukan hanya pada internal pendidikan tinggi, namun juga pada stakeholder eksternal.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi perlu mengkaji ulang relevansi kurikulum dengan perkembangan situasi dan kondisi baik lokal, regional, nasional maupun global;
2. Perguruan Tinggi agar menyiapkan infrastruktur internal (kurikulum, SDM, infrastruktur IT, dan yang diperlukan lainnya); dan
3. Implementasi MBKM memperhatikan situasi dan kondisi Perguruan Tinggi.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan**Ringkasan Kinerja**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	75	88,07	117,04%
Indeks pembangunan kebudayaan	61,20	55,13	90,08%

Ketercapaian Sasaran Strategis terkait meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan ditandai dengan meningkatnya Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia (IKBI) dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Terdapat peningkatan Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia dan Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2023 dari tahun 2022.

Pada tahun 2023, Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia mengalami peningkatan sebesar 7,22 dari tahun 2022. Dengan peningkatan tersebut, implementasi IKBI mencapai 117,04% yang berhasil meraih nilai 88,07 dari target nilai 75. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 dan tahun 2022 lalu, berubah mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023 menjadi 55,13. Angka capaian IPK tersebut lebih tinggi sebesar 3,23 dari IPK pada tahun 2022. Dengan peningkatan tersebut, implementasi IPK mencapai 90,08% dari target 61,20 dapat diraih sebesar 55,13.

Ketercapaian Sasaran Strategis Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan tersebut didukung oleh 2 IKSS. Adapun tingkat ketercapaian dari IKSS tersebut adalah sebagai berikut.



IKSS 3.1 : Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
-	81.86	75	88,07	117,04	81	108,70

Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia merupakan nilai rerata indeks karakteristik peserta uji dalam kemahiran berbahasa Indonesia secara lisan dan tulis serta dalam pemahaman kaidah bahasa Indonesia yang dihitung dalam setiap tahun. Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia merupakan angka yang menunjukkan rerata kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia lintas profesi dan lintas karakteristik penutur bahasa Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah, baik penutur jati maupun penutur asing.

Angka ini diperoleh dari penjumlahan nilai skor peuji dibagi jumlah peuji yang menghasilkan rerata skor, lalu rerata skor tersebut dibagi skor acuan tertinggi yang terdapat dalam permendikbud untuk setiap karakteristik peserta uji. Kemudian, nilai untuk setiap karakteristik peserta uji dikali seratus per jumlah karakteristik peserta uji.

Formula penghitungan indeks:

$$IKBI = \frac{100}{n} \sum_{n=1}^n \left(\frac{\sum \text{Jumlah skor penguji} : \sum \text{Jumlah penguji}}{\text{Skor acuan tertinggi}_n} \right)$$

*n: jumlah karakteristik penguji

Tabel Penghitungan Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia Setiap Profesi

Tabel Penghitungan Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia

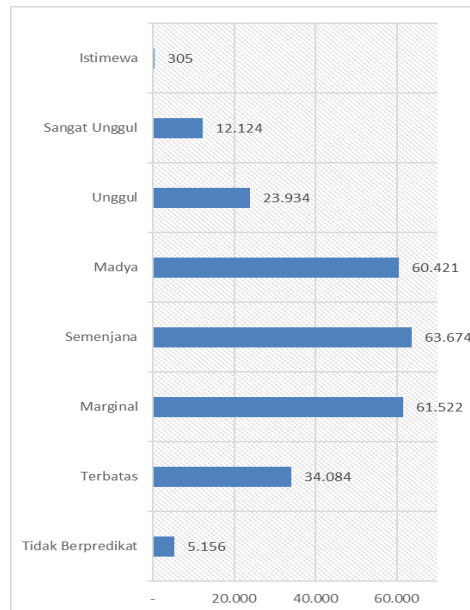
Profesi	Jumlah Skor	Jumlah Peserta	Rata-Rata Kemahiran	Predikat Standar	Acuan Nilai Tertinggi	IKBI
Pimpinan Lembaga	4498	9	499,8	Sangat Unggul	724	69,03
Guru Honorer	105988	208	509,6	Unggul	640	79,62
Manajer	8361	17	491,8	Unggul	640	76,85
Anggota TNI/Polri	4923	11	447,5	Unggul	640	69,93
Peneliti	13918	23	605,1	Sangat Unggul	724	83,58
Juru bahasa	5865	9	651,7	Unggul	640	101,82
Dosen	154796	270	573,3	Unggul	640	89,58
Penerjemah	72235	114	633,6	Unggul	640	99,01
Guru	974452	1981	491,9	Unggul	640	76,86
ASN	440090	814	540,7	Unggul	640	84,48
Kepala sekolah	524695	1121	468,1	Unggul	640	73,13
Pramuwisata	1243	2	621,5	Madya	577	107,71
Wartawan	43149	80	539,4	Unggul	640	84,28
Direktur	4648	8	581,0	Unggul	640	90,78
Editor	7196	12	599,7	Unggul	640	93,70
Sekretaris	2502	4	625,5	Sangat Unggul	724	86,40
Teknisi	4791	10	479,1	Semenjana	481	99,60
Pewara	1213	2	606,5	Unggul	640	94,77
Dokter	4597	8	574,6	Unggul	640	89,79
Penyuluh	1199	2	599,5	Sangat Unggul	724	82,80
Pengacara	3676	7	525,1	Unggul	640	82,05
Jaksa	1154	2	577,0	Madya	577	100,00
Hakim	1299	2	649,5	Unggul	640	101,48
Anggota DPR/DPRD	471	1	471,0	Madya	577	81,63
Pelajar SD	335784	814	412,5	Marginal	404	102,11
Mahasiswa	10696960	19217	556,6	Unggul	640	86,98
Pelajar SMP	42285574	104801	403,5	Semenjana	481	83,88
Pelajar SMK	11950935	26828	445,5	Madya	577	77,20
Pelajar MTS	1633065	3745	436,1	Semenjana	481	90,66
Pelajar MA	3059617	6428	476,0	Madya	577	82,49
Pelajar MAK	2491	5	498,2	Madya	577	86,34
Pelajar SMA	43728683	93824	466,1	Madya	577	80,77
Pelajar MI	472	1	472,0	Marginal	404	116,83

Nilai Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia: **88,07**

Indeks kemahiran berbahasa Indonesia pada tahun 2023 berada pada angka 88,07 dengan ketercapaian sebesar 117,04% dari target sebesar 75. Capaian tahun 2023 ini meningkat 7.22 poin dari tahun 2022. Selain itu capaian tahun 2023 pun telah melebihi yang ditargetkan pada Renstra tahun 2024, yakni sebesar 81.



Jumlah Peserta Berdasarkan Predikat UKBI



Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia memuat unsur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, seperti kemahiran mendengarkan, kemahiran berbicara, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis serta pemahaman atas kaidah bahasa Indonesia setiap peserta uji dari berbagai profesi.

Peningkatan dalam setiap kemahiran berbahasa pada setiap penutur dari berbagai profesi tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, pencapaian Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia didukung oleh program atau kegiatan yang relevan dengan kemahiran mendengarkan, kemahiran berbicara, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis serta pemahaman atas kaidah bahasa Indonesia dalam bentuk sasaran program (1) Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan dan (2) Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

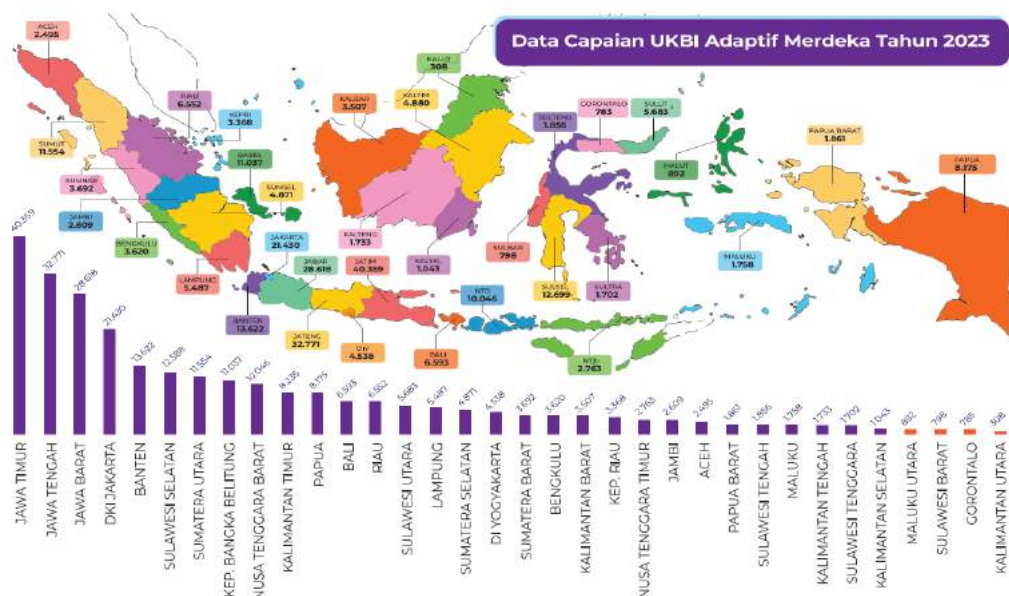
1. ***Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan***

Sasaran program tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan di kalangan penutur bahasa Indonesia dengan uraian sebagai berikut.

- a. Penyusunan instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang menghasilkan 705 butir soal UKBI Adaptif Merdeka serta pengembangan laman aplikasi UKBI Adaptif untuk mempermudah peuji dalam melakukan simulasi UKBI.
- b. Penyusunan bahan penguatan literasi berupa 100 buku bacaan literasi yang terdiri atas 80 buku bacaan bergambar (*pictured book*) dan 20 buku komik, berupa buku nonteks yang digunakan untuk menunjang pembelajaran formal sekaligus meningkatkan kemampuan literasi siswa di Indonesia.
- c. Penyediaan produk kodifikasi Bahasa berupa satu KBBI termutakhirkan, empat kamus bidang ilmu, empat kamus etimologi, empat produk integrasi kosakata dengan TIK, dan dua produk pedoman kebahasaan dengan jumlah usulan entri terverifikasi sebanyak 13.380 kosakata tahun 2023.
- d. Penerbitan 30 buku Peta Kemahiran Berbahasa Indonesia tahun 2023 dari setiap provinsi yang merupakan peta hasil UKBI penutur bahasa Indonesia
- e. Pelaksanaan layanan UKBI kepada 261.220 peserta uji selama tahun 2023.



- f. Pelaksanaan Diseminasi Nasional Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan menghadirkan 813 pemangku kepentingan yang mewakili berbagai lembaga di seluruh Indonesia secara luring dan daring.
- g. Pembinaan dan pemberdayaan 1.138 komunitas literasi melalui pengelolaan, pemutakhiran profil, dan pemberdayaan komunitas.
- h. Pelaksanaan program Apresiasi Giat UKBI dengan total pendaftar berjumlah 170 sekolah. Berdasarkan hasil penjurian ditetapkan 20 sekolah terbaik penerima Apresiasi Giat UKBI.
- i. Tercapainya target persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas berbahasanya pada tahun 2023, yaitu sebesar 75,99%, yang ditandai dengan peningkatan kualitas berbahasa melalui berbagai kegiatan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara.
- j. Pemberdayaan generasi muda terbina program literasi melalui program Krida Duta Bahasa sebanyak 35 orang perwakilan duta bahasa dari seluruh Indonesia.
- k. Interkoneksi laman UKBI dengan aplikasi Simponi dari Kementerian Keuangan yang mempermudah proses pembayaran peserta uji berbahar.



Gambar Peta Sebaran Jumlah Peserta Uji Tahun 2023 Setiap Provinsi
Gambar Jumlah Peserta UKBI Tahun 2023 Berdasarkan Provinsi



Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kepala Badan Bahasa dalam Diseminasi Nasional Kemahiran Bahasa Indonesia dengan tema “Perkuat Kedudukan Bahasa Indonesia” pada tanggal 1 Maret 2023

2. *Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional*

Sasaran program tersebut didukung dengan berbagai kegiatan peningkatan peran bahasa Indonesia di kancah internasional dengan uraian sebagai berikut.

- a. Peningkatan jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia. Pada tahun 2023 jumlah negara ditargetkan secara kumulatif sebanyak 49 negara. Pada tahun 2022, capaian jumlah negara yang menyelenggarakan program BIPA sebanyak 52 negara. Secara tidak langsung, capaian tahun 2022 sudah melampaui target jumlah negara penyelenggara program BIPA. Pada tahun 2023, terdapat penambahan dua negara baru yang terfasilitasi penyelenggaraan program BIPA. Dengan demikian, capaian jumlah negara penyelenggara program BIPA menjadi 54 negara.
- b. Penugasan pengajar BIPA untuk luar negeri di kawasan Asia Tenggara melibatkan 28 pengajar yang bertugas di 31 lembaga dan melayani sekitar 6.593 pemelajar BIPA.

- c. Kegiatan Apresiasi Ke-BIPA-an dengan memberikan penghargaan dan kegiatan kompetisi bagi para pemelajar BIPA. Pada tahun 2023, kegiatan Apresiasi Ke-BIPA-an dilaksanakan dalam bentuk Festival Handai Indonesia (FHI) dan Apresiasi Pemenang Festival Handai Indonesia (APFHI).
- d. Penerjemahan cerita anak bahasa asing ke bahasa Indonesia (lisensi berbayar) yang menghasilkan sebanyak 1250 produk.
- e. Penerjemahan antologi cerita anak dari negara anggota ASEAN ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang menghasilkan capaian sebanyak 11 produk.
- f. Penerjemahan buku cerita dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ke 28 bahasa daerah yang menghasilkan 250 produk.
- g. Pengusulan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Pada 8 November 2023 delegasi Indonesia yang terdiri atas Kepala Badan Bahasa, Kemendikbudristek, E. Aminudin Aziz; Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Ismunandar; dan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Iwa Lukmana mempresentasikan usulan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO di hadapan Legal Committee UNESCO di Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis. Sidang Legal Committee akhirnya menyetujui ajuan Pemerintah Indonesia tersebut tanpa keberatan dari anggota komisi. Selanjutnya, hasil sidang Legal Committee diajukan untuk disidangkan secara pleno. Pada 20 November 2023, Sidang pleno UNESCO memutuskan untuk menerima usulan Pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 pada Sidang Umum UNESCO.



Pada 20 November 2023, sidang pleno UNESCO memutuskan untuk menerima Pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa resmi Sidang Umum UNESCO

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Persebaran profesi penutur bahasa Indonesia yang mengikuti UKBI di setiap wilayah belum merata sehingga belum sepenuhnya mewakili keterukuran kemahiran berbahasa profesi di suatu wilayah, khususnya untuk profesional di bidang kesehatan, hukum, teknik, dan teknologi informasi
2. Belum optimalnya peran pemangku kepentingan mewajibkan UKBI untuk peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia di lembaganya.
3. Belum banyak lembaga yang memanfaatkan hasil UKBI sebagai instrumen untuk perencanaan kebijakan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia.
4. Ketersediaan bahan literasi yang dapat diakses bagi pelajar tingkat atas atau bagi kalangan remaja yang masih terbatas, baik buku kebahasaan dan kesastraan maupun buku ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Bahan literasi berbahasa Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam upaya penginternasionalan bahasa Indonesia.

Langkah Antisipasi

1. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Pengoptimalan UKBI untuk penerima beasiswa dan seleksi pejabat fungsional.
3. Penyusunan kebijakan instansi dalam pemanfaatan UKBI di lingkungan kementerian dan Lembaga serta asosiasi profesi.
4. Pemberian apresiasi kepada sekolah pegiat UKBI yang telah menerapkan kebijakan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia pada tingkat sekolah SMP/SMA sederajat.
5. Kolaborasi kegiatan yang dapat meningkatkan literasi di kalangan remaja dengan berbagai Kementerian dan Lembaga.
6. Penyusunan kamus pemelajar dan pelaksanaan diseminasi Kemahiran berbahasa Indonesia di kalangan penutur asing.

IKSS 3.2 : Indeks Pembangunan Kebudayaan

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
54,65	51,90	61,20	55,13	90,08	62,70	87,93

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) berperan sebagai alat ukur pencapaian dalam pembangunan kebudayaan bagi pemerintah pusat dan daerah. Fungsi ini tidak hanya memandu perencanaan pembangunan, tetapi juga memantau kinerja program yang tengah berjalan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

1. Dimensi ekonomi budaya;
2. Dimensi pendidikan;
3. Dimensi ketahanan sosial budaya;
4. Dimensi warisan budaya;
5. Dimensi ekspresi budaya;
6. Dimensi budaya literasi; dan
7. Dimensi kesetaraan gender.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Dengan diterbitkannya Indeks Pembangunan Kebudayaan ini, diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas.

Dalam penyusunan IPK, pembobotan dimensi menggunakan metode statistik multivariat / *multivariate statistical methods* melalui analisis faktor dan dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan pendapat para pakar

Dimensi	Bobot
Ekonomi Budaya	10%
Pendidikan	20%
Ketahanan Sosial Budaya	20%
Warisan Budaya	25%
Ekspresi Budaya	10%
Budaya Literasi	10%
Gender	5%

Metode perhitungan IPK:

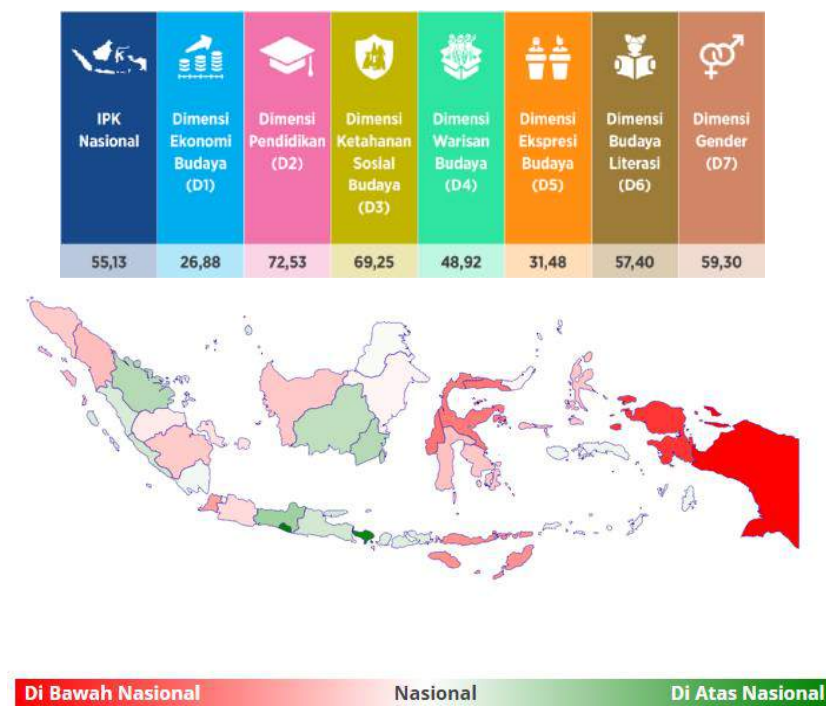
$$IPK = \sum_{j=1}^7 (\text{bobot Dimensi ke } j \times \text{Indeks dimensi ke } j)$$

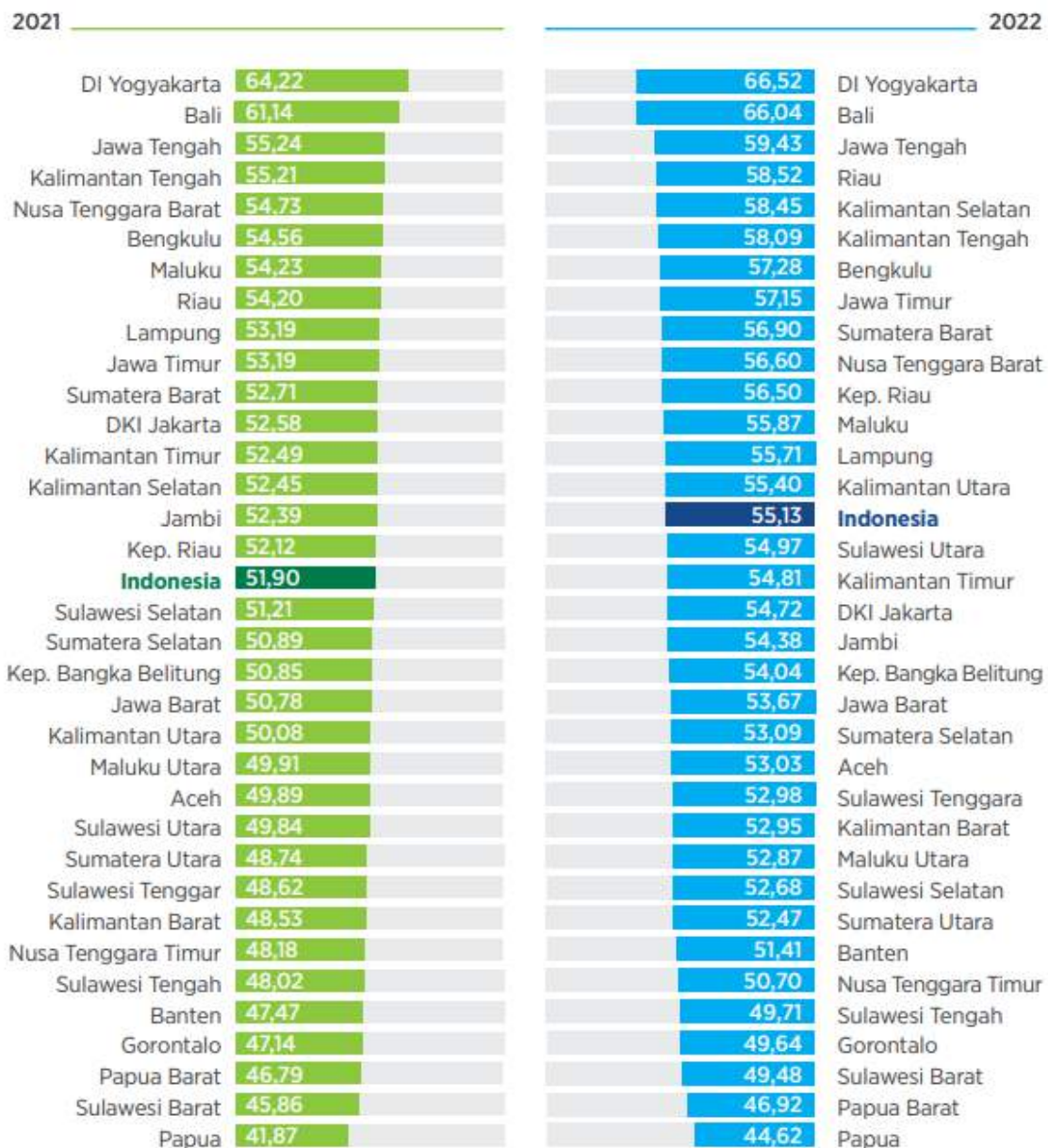


Angka capaian skor IPK yang diluncurkan pada tahun 2023 merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan data tahun 2022 yang bersumber dari hasil survei BPS tahun 2022. Oleh karena itu capaian IKSS IPK di tahun 2023 sebesar 55,13 merupakan angka IPK 2022. Angka ini lebih kecil dibandingkan target renstra tahun 2023 yakni sebesar 61,20 namun mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 kondisi pembangunan kebudayaan sudah mulai tumbuh kembali jika dibandingkan pada masa pandemi.

Perhitungan nilai IPK 2022 yang menjadi nilai realisasi IKSS Kemendikbudristek tahun 2023 dihitung dari data yang dikumpulkan terkait 31 indikator IPK dimana 19 indikator bersumber dari Susenas MSBP yang kesediaan datanya tiga tahun sekali dan tidak tersedia di tahun 2022, 10 indikator IPK bersumber dari Susenas KOR dan Dapodik, serta 2 indikator terkait Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda bersumber pada Dapobud.

Berikut merupakan skor dari masing-masing dimensi dalam IPK. Tampak Dimensi Pendidikan memiliki capaian nilai tertinggi, sementara Dimensi Ekonomi Budaya adalah yang terendah.





Apabila kita bandingkan hasil IPK secara nasional per provinsi terlihat peningkatan yang terjadi dari tahun 2021 ke 2022 disebagian besar provinsi. Selain itu IPK tertinggi pun yang diperoleh oleh Provinsi DI Yogyakarta dari 64,22 menjadi 66,52 telah meningkat, begitu pula IPK terendah pada Provinsi Papua telah meningkat dari 41,87 menjadi 44,62. Adapun berikut dapat dilihat sebaran IPK secara nasional.



Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Mega Event Kebudayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkesenian dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Mega Event Kebudayaan yang berhasil dilaksanakan diantaranya Pekan Kebudayaan Nasional, Film Mega Event, Festival Film Indonesia, Penguatan Ekosistem Musik, Pengembangan Musik Tradisi Indonesia, Festival Komunitas Seni Media, Festival Musik Tradisi Borobudur, Kenduri Swarnabhumi, dan lainnya.
2. Melestarikan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda melalui Penetapan Cagar Budaya dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional bertujuan untuk melakukan pengaturan di tingkat Nasional terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya melalui kebijakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia merupakan kegiatan dalam rangka perlindungan warisan budaya takbenda yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda juga dilakukan melalui Pengelolaan World Heritage, Pengelolaan Intangible Culture Heritage, Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), Pengelolaan Museum, Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi, dan lainnya.
3. Melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan di satuan pendidikan melalui kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS), Penguatan Karakter Siswa Mandiri Melalui Kreasi Seni (Presisi), Pengenalan Budaya Nusantara Animasi Seri, dan Penyusunan materi Pembelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam rangka Merdeka Belajar

4. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan peninggalan sejarah seperti Vredeburg Fair, pameran, revitalisasi museum, pengelolaan koleksi museum, pelestarian cagar budaya, penyebarluasan informasi sejarah, pemanduan secara daring dan media sosial, Jelajah Budaya Borobudur, Sangiran masuk sekolah (SMS), Penguatan Tata Kelola Lembaga Kebudayaan, Standarisasi Lembaga Kebudayaan, dan berbagai kegiatan lainnya.
5. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang kebudayaan melalui sertifikasi tenaga bidang kebudayaan, workshop dan pelatihan, termasuk pemberdayaan terhadap penghayat kepercayaan dan masyarakat adat.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Terhambatnya proses penandatanganan keputusan menteri terkait pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2023 serta kurangnya partisipasi daerah dalam pengusulan cagar budaya.
2. Peralihan sistem WBTb ke sistem DAPOBUD yang belum selesai membuat usulan melalui sistem tersendat yang berakibat pada usulan yang dikirimkan kembali secara manual melalui surat elektronik dan Pos.
3. Dinamika perubahan SDM dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap *Intangible Cultural Heritage* (ICH) setelah restrukturisasi.
4. Buku teks pendamping materi ajar pendidikan kepercayaan sebagai materi pengayaan belum seluruhnya tersedia di masing-masing organisasi kepercayaan.
5. Penyuluh pendidikan kepercayaan belum menguasai materi dari modul ajar yang telah berbasis kurikulum merdeka.



Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat proses penandatanganan keputusan menteri serta melibatkan secara aktif pemerintah daerah melalui sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan insentif untuk mendorong partisipasi mereka dalam pengusulan cagar budaya.
2. Mengadakan sosialisasi tentang Penetapan WBTbI yang mencakup tata cara pengusulan sampai pelestariannya guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem DAPOBUD serta menyediakan bahan panduan dan tutorial online yang dapat diakses oleh pengguna untuk membantu mereka memahami dan menggunakan sistem dengan efektif
3. Mengadakan sosialisasi dan *workshop* reguler untuk pegawai yang terlibat dalam *Intangible Cultural Heritage* (ICH) setelah restrukturisasi.
4. Pembekalan penyusunan buku teks pendamping materi ajar pendidikan kepercayaan.
5. Peningkatan kapasitas untuk penyuluh terkait materi kurikulum merdeka.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat	86.500 Karya	75.382 Karya	87,15%

Ketercapaian Sasaran Strategis terkait meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan diindikasikan oleh indikator keluaran dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat. Pada Tahun 2023 ini, untuk Sasaran Strategis terkait meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan masih belum dapat terlihat peningkatannya jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Walaupun peningkatan masih belum terlihat pada tahun 2023, Kemendikbudristek terus berupaya untuk dapat meningkatkan kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan, salah satu dengan melakukan pemberian insentif kepada dosen/peneliti untuk mendapatkan Kekayaan Intelektual (KI) pada program Insentif Sentra Kekayaan Intelektual, bantuan dana pengabdian kepada masyarakat serta bantuan biaya luaran prototipe. Adapun tingkat ketercapaian dari IKSS tersebut adalah sebagai berikut:

IKSS 4.1 : Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
-	102.993	86.500	75.669	87,48	90.500	83,61

Keluaran penelitian yang dimaksudkan dalam indikator ini meliputi karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni yang dihasilkan oleh PTN dan PTS Akademik yang diterapkan oleh masyarakat.

Kriteria penerapan di masyarakat mengikuti kriteria pada indikator ini, yaitu:

- a. Karya Ilmiah
- b. Karya Terapan
- c. Karya Seni

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Salah satu kewajiban dosen sebagai pengemban tridarma perguruan tinggi berdasarkan UU 14/2005 tentang guru dan dosen ialah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Publikasi ilmiah merupakan luaran penelitian atau pemikiran yang ditulis dan disebarluaskan dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Diseminasi tersebut berguna untuk menyampaikan gagasan dan argumen ilmiah yang dapat dibaca oleh ilmuwan di seluruh dunia. Diseminasi ini juga merupakan bukti tanggung jawab ilmiah untuk memberi kontribusi dan manfaat baik dalam membangun dan mengembangkan iptek maupun dalam menyelesaikan permasalahan aktual atau strategis yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.

Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat berupa karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni yang dihasilkan oleh dosen di PTN dan PTS yang diterapkan oleh Masyarakat. Adapun metode perhitungan dari indikator ini :

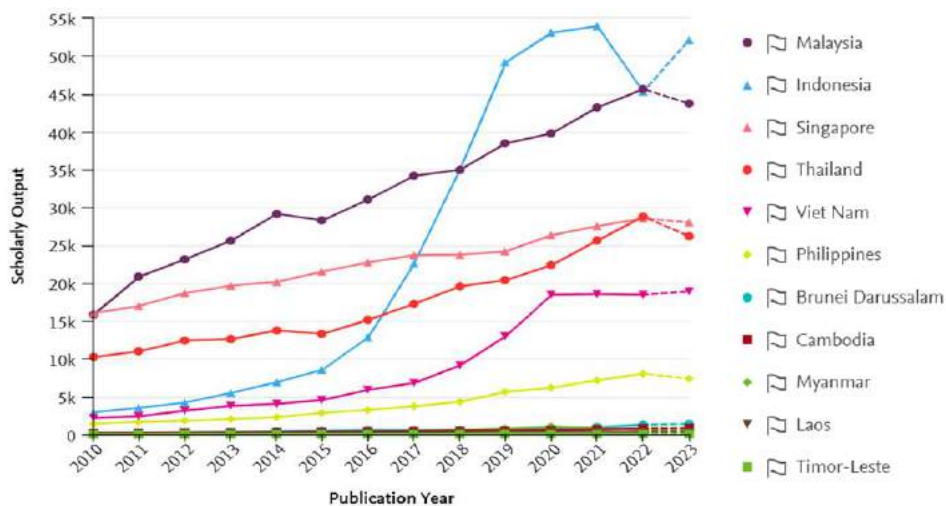
n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis pada jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2023 dengan target 86.500 karya dapat tercapai sebanyak 75.669 karya atau sebesar 87.48% dengan rincian capaian yaitu 46.006 karya tulis ilmiah terbit pada jurnal internasional bereputasi, 20.863 buku yang dihasilkan, 582 produk, 1.382 prototipe, 1.385 kekayaan intelektual berupa paten dan paten sederhana, 1.902 pengabdian kepada Masyarakat dan 105 kosabangsa serta 3.444 karya yang dihasilkan PT Vokasi. Jika dibandingkan dengan target 2024 sebesar 90.500 karya maka persentase capaiannya sudah mencapai 83,61%. Adapun capaian tersebut diperoleh dari aplikasi SINTA Kemendikbudristek per tanggal 10 Januari 2024.

Keterangan	Vokasi	Akademik
Scopus	1536	43688
WOS	161	9300
Jumlah HKI (Paten+ Paten Sederhana)	127	1673
Jumlah Buku	1820	23314
Jumlah Prototype	230	1647
Jumlah Produk	75	728
Pengabdian	48	2007
Total	3997	82357

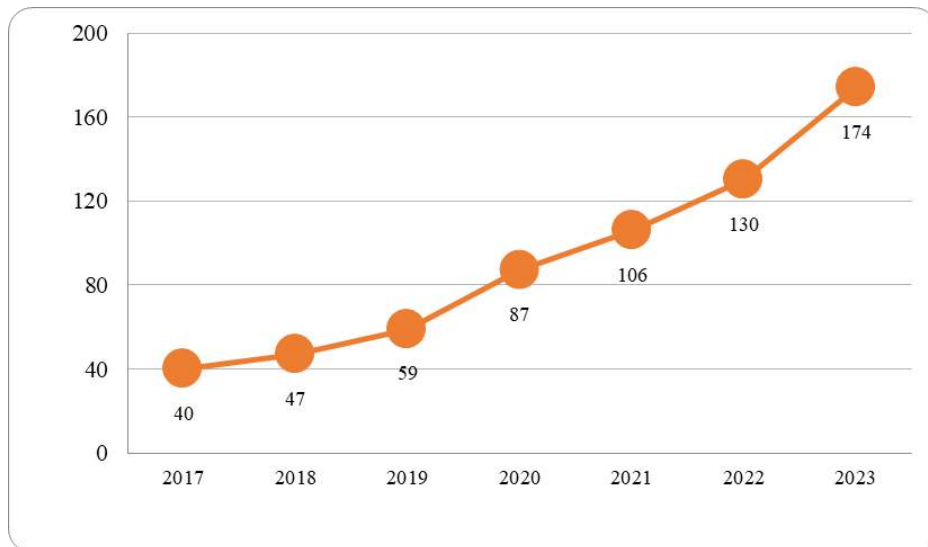
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 102.993 capaian mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah proses penerbitan artikel pada jurnal internasional bereputasi yang memerlukan waktu lebih lama serta kualitas artikel yang mengalami penurunan sehingga banyak yang ditolak. Luaran penelitian yaitu karya tulis ilmiah berupa

artikel yang terbit pada jurnal terindeks internasional bereputasi, buku, prototipe, kekayaan intelektual, produk dan pengabdian kepada masyarakat. Pada tingkat internasional, kuantitas publikasi ilmiah internasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini terus meningkat. Pada tahun 2017 untuk pertama kalinya Indonesia mengungguli Thailand. Pada April 2018 untuk pertama kalinya Indonesia mengungguli Singapura dan di tahun 2019 untuk pertama kalinya Indonesia juga mengungguli Malaysia. Ketercapaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



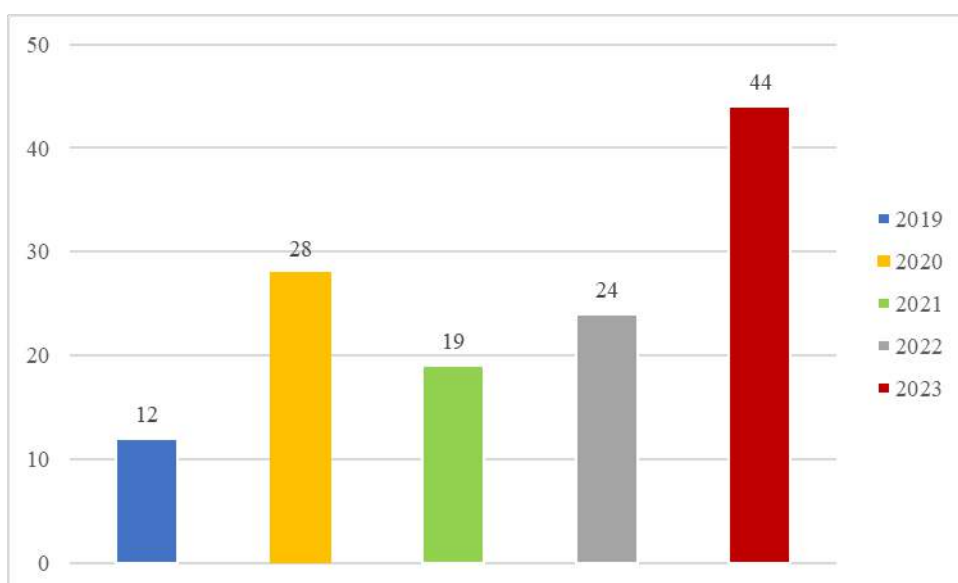
Publikasi internasional di kawasan ASEAN. Semua jenis dokumen (artikel, *review*, konferensi, editorial, dan *book chapter* periode 2010–2023)

Selain karya publikasi yang dihasilkan harus bermutu, wahana publikasi juga harus dipilih sesuai dengan kriteria yang menjamin kelayakan suatu naskah, baik dari segi substansi maupun tampilan, sesuai dengan standar dan kaidah yang telah ditentukan. Karya ilmiah dapat dipublikasikan di berbagai media termasuk surat kabar, majalah, buku, laman, jurnal, atau prosiding. Namun, jurnal ilmiah menjadi standar emas bagi para pengembang ilmu di seluruh dunia untuk mengomunikasikan kontribusinya dalam pengembangan iptek.



Jumlah Jurnal Ilmiah Indonesia Terindeks Bereputasi (indeksasi internasional)

Dari sisi wahana publikasi, jumlah jurnal nasional Indonesia yang telah diakui dalam indeksasi internasional bereputasi meningkat dari 12 jurnal (tahun 2019) menjadi 174 jurnal (tahun 2023) dengan kualitas peringkat Q1 11 jurnal, Q2 23 jurnal, Q3 38 jurnal, Q4 31 jurnal dan No-Q 22 jurnal. Pada tahun 2023, jumlah jurnal ilmiah dari Indonesia yang terindeks bereputasi sebanyak 44 jurnal dimana tahun 2022 yang terindeks sebanyak 24 jurnal.



Jumlah Jurnal Ilmiah Indonesia Diterima Scopus per Tahun

Sedangkan jurnal ilmiah dari Indonesia yang terindeks di lembaga *Directory of Open Access Journal* (DOAJ) terus bertambah jumlahnya dari 2.187 jurnal ilmiah (tahun 2022) menjadi 2.388 jurnal ilmiah (tahun 2023), menduduki peringkat pertama di dunia. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel yang diterbitkan Scopus pada 14 Januari 2024 berikut.

Negara	Artikel		Prosiding		Lainnya		Semua Dokumen
Indonesia	30.398	58%	18.074	35%	3.643	7%	52.115
Malaysia	29.767	68%	6.585	15%	7.370	17%	43.722
Singapore	19.736	70%	3.167	11%	5.127	18%	28.030
Thailand	21.135	81%	2.179	8%	2.893	11%	26.207
Vietnam	14.795	78%	2.420	13%	1.683	9%	18.898
Philippines	5.123	70%	1.132	15%	1.111	15%	7.366
Brunei Darussalam	797	58%	254	18%	331	24%	1.382
Cambodia	500	62%	45	6%	267	33%	812
Myanmar	417	72%	102	18%	60	10%	579
Laos	256	76%	15	4%	67	20%	338
Timor-Leste	56	79%	7	10%	8	11%	71

Dalam rentang lima tahun terakhir jumlah publikasi ilmiah internasional Indonesia meningkat sangat nyata. Berdasarkan data publikasi ilmiah pada tahun 2023 yang dikumpulkan dari basis data dan sitasi lembaga pengindeks global pada tabel 2, jumlah publikasi ilmiah Indonesia berada di peringkat pertama diantara negara-negara ASEAN dengan komposisi 58% berupa artikel ilmiah terbit di jurnal ilmiah, 35% berasal dari artikel ilmiah terbit pada *conference paper* (prosiding) dan 7% dari dokumen ilmiah lainnya. Walaupun berada di peringkat pertama dari negara ASEAN lainnya, namun jumlah publikasi ilmiah berupa artikel ilmiah Indonesia berada di posisi terendah karena sumbangan *conference paper* Indonesia masih tertinggi diantara negara lainnya.

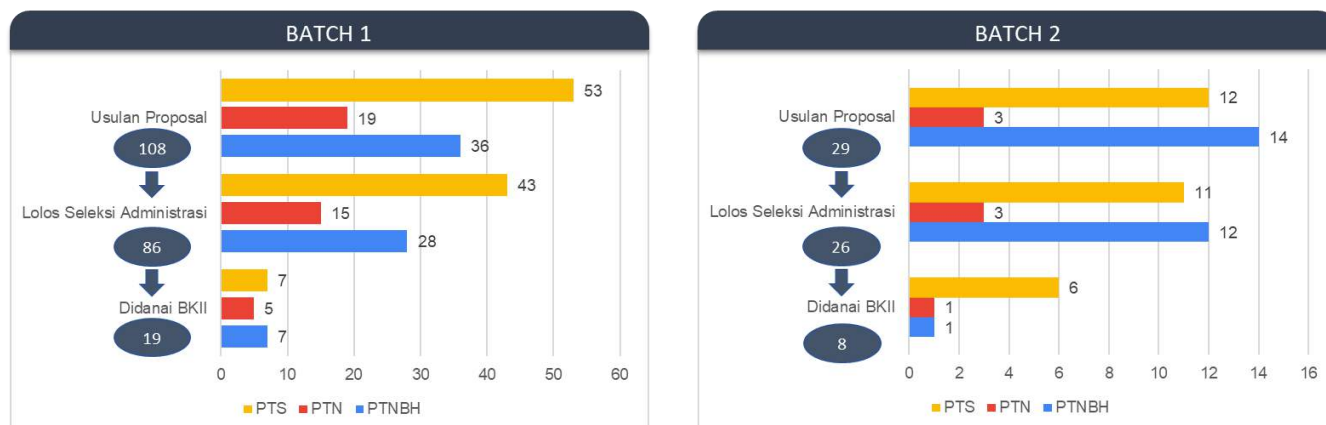
Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. *Matching Fund*, merupakan program dimana diberikan bantuan untuk mendorong kerjasama/kolaborasi yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dan mitra berbasis riset dan/atau kepakaran perguruan tinggi untuk menyelesaikan masalah DUDI atau pemberdayaan masyarakat.
2. Pemberian insentif kepada dosen/peneliti untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) pada program Insentif Sentra Kekayaan Intelektual
3. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dipublikasikan pada aplikasi BIMA dan SINTA/SCOPUS/SCIMAGO
4. Pelaksanaan pelatihan serta *workshop* yang bertujuan untuk peningkatan jumlah dan kualitas publikasi kepada dosen
5. Bantuan konferensi ilmiah internasional (BKII)

Dosen dituntut untuk mampu mendiseminasikan hasil penelitiannya agar reputasinya sebagai peneliti meningkat. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi adalah diseminasi hasil penelitian melalui seminar atau konferensi di tingkat internasional. Melalui konferensi ilmiah internasional para dosen diharapkan dapat bertukar informasi, menjalin kerjasama antar dosen/antar Lembaga/antar negara, serta membuka peluang publikasi ilmiah pada jurnal yang bereputasi baik.

BKII diberikan melalui kompetisi kepada penyelenggara konferensi ilmiah di Indonesia dengan target luaran kegiatan dapat menerbitkan publikasi ilmiah internasional bereputasi baik pada jurnal ilmiah maupun prosiding internasional. Tahun 2023 pemberian bantuan dilakukan sebanyak dua *batch* dengan total penerima adalah 27 penyelenggara konferensi.



6. Akreditasi jurnal ilmiah

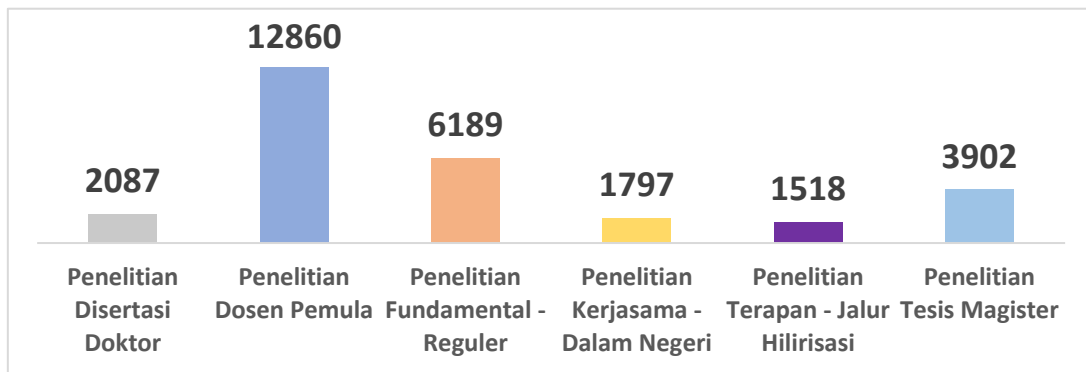
Akreditasi jurnal ilmiah adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu jurnal ilmiah melalui kegiatan penilaian kewajaran, penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan jurnal ilmiah. Penilaian akreditasi jurnal ilmiah dilakukan dengan mekanisme pengusulan pada sistem Arjuna dimana usulan yang masuk akan dilakukan seleksi administrasi syarat pengajuan dan jika lolos seleksi maka dilanjutkan dengan penilaian substansi dan manajemen oleh asesor akreditasi. Untuk menunjang proses penilaian akreditasi jurnal, pada tahun ini telah dilakukan pula seleksi dan *Training of Trainers* asesor substansi dan manajemen, yang melalui SK No.93a/E/KPT/2023 tanggal 26 Januari 2023 menetapkan Asesor Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional sebanyak 442 asesor. Tahun 2023 telah dilakukan penilaian akreditasi, baik untuk akreditasi baru maupun reakreditasi, dengan total 7.288 jurnal yang ditetapkan status akreditasinya.



7. Penyaluran bantuan dana riset/penelitian

Bantuan dana penelitian di salurkan melalui skema hibah penelitian dasar, dan terapan, serta peningkatan ekosistem riset dan inovasi pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi perguruan tinggi (PUI PT). Pada tahun 2023, jumlah penelitian yang didanai sebanyak 8.204 judul (penelitian baru dan lanjutan). Hasil luaran penelitian salah satunya adalah publikasi jurnal, prototipe, produk, desain dan karya lain-lainnya yang akan divalidasi pada awal tahun 2024 serta kuartal ketiga tahun 2024 atau pertengahan tahun 2024.

Bantuan dana bersifat mono tahun dan multi tahun. Untuk program multi tahun, maka terdapat komitmen pendanaan maksimal selama 3 tahun. Untuk program mono tahun maka pendanaannya hanya selama satu tahun. Berikut statistic untuk proposal penelitian dan baru pada tahun 2023:



8. Bantuan dana pengabdian kepada Masyarakat

Bantuan dana pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2023 bersifat mono dan multi tahun. Untuk pendanaan monotahun disalurkan melalui pendanaan usulan baru dengan skema pemberdayaan berbasis masyarakat, sementara untuk pendanaan multitahun, disalurkan melalui pendanaan usulan baru dengan skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan dan skema pemberdayaan berbasis wilayah. Pada pendanaan monotahun, jumlah proposal perguruan tinggi yang mendapatkan bantuan dana pengabdian kepada masyarakat sejumlah 1827 proposal, sedangkan pada pendanaan multitahun, jumlah proposal perguruan tinggi yang mendapatkan bantuan dana pengabdian kepada masyarakat sejumlah 75 proposal.

Pada luaran hasil dari bantuan dan pengabdian masyarakat dapat berupa kebermanfaatan hasil teknologi riset untuk pengelolaan ekonomi atau sumberdaya alam agar dapat meningkatkan pemanfaatannya semaksimal masyarakat. Hasilnya dapat berupa produk, dan atau peningkatan keberdayaan masyarakat

9. Bantuan Biaya Luaran Prototipe

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2023 yaitu dengan memberikan Program Bantuan Biaya Luaran Prototipe bagi sejumlah karya yang terpilih di Indonesia.

Manfaat yang akan diperoleh dengan adanya program ini adalah peningkatan kualitas penelitian terutama penelitian yang terkait isu-isu strategis di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik seluruh Indonesia.

Jumlah luaran prototipe yang berasal dari anggaran BOPTN Penelitian melalui rincian output PT Penerima Bantuan Pendanaan *Competitive Fund* (BOPTN Penelitian) dan Prototipe dari Perguruan Tinggi yang Difasilitasi menghasilkan luaran prototipe sejumlah 142 prototipe yang telah siap diterapkan ke masyarakat.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan baik dalam format maupun isi dari juknis *matching fund* dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga membutuhkan waktu untuk memfinalisasi juknis.
2. Perubahan dalam mekanisme proses seleksi dan beberapa hal teknis *matching fund* dari mekanisme proses seleksi dan teknis program dari tahun sebelumnya.
3. Terkendala sistem dalam identifikasi usulan dari PT vokasi yang berasal dari Unista, sehingga tidak dapat dinilai.

4. Kurang berkembangnya budaya menulis di perguruan tinggi, serta rendahnya kemauan dan kemampuan menulis hasil-hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal bermutu.
5. Bergantinya pengelola jurnal sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengelola jurnal
6. Jangka waktu penelitian menyesuaikan dengan tahun anggaran berjalan, namun proses seleksi hingga pencairan berjalan lama, sehingga waktu penelitian menjadi kurang dari satu tahun yang menyebabkan penelitian tidak berjalan dengan optimal

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan dengan semua tim *matching fund* bersama pihak pereviu dari PT untuk merevisi juknis disesuaikan dengan perubahan yang ada.
2. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan tim Kedaireka, baik tim *Front Office* (FO) maupun *Back Office* (BO), untuk penyesuaian tampilan pada aplikasi di menu seleksi.
3. Melaksanakan koordinasi dan monitoring dalam sistem secara intensif dan berkala kedalam sistem *backoffice.kedaireka.com* serta melakukan penandaan ulang proposal yang salah dan melakukan pemberitahuan atau notifikasi kepada pengusul bersangkutan. Dimana, dalam hal ini, pengusul yang belum bisa melengkapi dokumen administrasi dapat diarahkan pada *batch* selanjutnya.
4. Memberikan pelatihan dan pendampingan penulisan artikel ilmiah hingga artikel di *submit* ke jurnal.

5. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengelola jurnal agar selalu menjaga mutu kualitas artikel dan tata kelola pengelolaan jurnal
6. Luaran penelitian divalidasi 2 kali dalam satu tahun sehingga dosen yang belum tercapai luarannya dapat memaksimalkan perolehan luarannya sampai pertengahan tahun selanjutnya

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Ringkasan Kinerja

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Ristek	WTP	WTP*)	100%
Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	83	86,7	104.45%
Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A	BB	99.44%
Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	83	78,88*)	95.04%

Ketercapaian Sasaran Strategis terkait meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Dari tahun ke tahun, capaian sasaran strategis ini rata-rata mengalami peningkatan. Sampai tahun 2023, hasil peningkatan tata kelola yang ditandai oleh Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholders Satisfaction Survey* (SSS) yang terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh kebijakan Kemendikbudristek untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Peningkatan tata Kelola pun ditandai dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek yang cukup signifikan pada tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Ketercapaian SS tersebut didukung oleh 4 IKSS. Adapun tingkat ketercapaian dari IKSS tersebut adalah sebagai berikut.

IKSS 5.1 : Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
WTP	WTP	WTP	WTP*	100	WTP	100

Kualitas Laporan Keuangan ditentukan oleh Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa (BPK RI) mengenai kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kemendikbudristek. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI dapat memberikan 4 (empat) jenis Opini:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
3. Tidak Wajar (TW); dan
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Opini Laporan Keuangan tahun 2023 masih belum diterbitkan, sehingga capaian terkait indikator ini masih menggunakan capaian tahun 2022. Capaian Tahun 2022 baru diterbitkan pada triwulan kedua tahun 2023. Selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2022, Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan opini tertinggi dari BPK, adapun kriteria untuk mendapatkan Opini WTP antara lain:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian internal;
5. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- 6.



Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

- 1) Penatalaksanaan Laporan Keuangan Kemendikbudristek;
- 2) Analisis dan evaluasi Laporan Keuangan Kemendikbudristek;
- 3) Penyusunan pedoman-pedoman yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan yaitu pedoman kebijakan aset tetap tak berwujud, pedoman akuntansi hibah langsung, pedoman akuntansi piutang di dan pedoman akuntansi atas perlakuan akuntansi atas transaksi timbal balik (Resiprokal);
- 4) Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
- 5) Penguatan Tim SAI Kemendikbudristek.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat yang belum mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- 2) Penataan asset yang belum optimal serta pengelolaan BMN dan aset tak berwujud belum tertib;
- 3) Pengelolaan Piutang yang belum seragam;
- 4) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum sesuai ketentuan

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Melakukan asistensi penyusunan Laporan Keuangan pada satker di lingkungan Kemendikbudristek untuk memantau perkembangan penyusunan Laporan Keuangan pada tingkat satker dan menginventarisasi permasalahan terkait dengan penyusunan LK;
- 2) Melakukan pembinaan pada satker di lingkungan Kemendikbudristek dalam hal pengelolaan BMN serta internalisasi pedoman dan kebijakan terkait aset antara lain pedoman aset tetap tak berwujud dan pedoman akuntansi hibah langsung;
- 3) Mempercepat proses penyelesaian penyusunan pedoman akuntansi piutang dan pedoman akuntansi bantuan pemerintah, serta melaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Kemendikbudristek;
- 4) Melakukan pembinaan terhadap satker dengan melakukan bimbingan teknis sistem akuntansi berbasis akrual, bimbingan teknis sistem akuntansi instansi, maupun bimbingan teknis terkait dengan PNB

IKSS. 5.2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
			Target PK	Realisasi	%		
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek	84,6	85,9	83	86,7	104	84	103



Indikasi keberhasilan program dan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, salah satunya adalah melalui kepuasan dari pemangku kepentingan berupa skor indeks *stakeholder satisfaction*. Sejalan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, unit penyelenggara pelayanan publik dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun. Indeks kepuasan pemangku kepentingan merupakan rata-rata dari nilai indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan layanan ULT

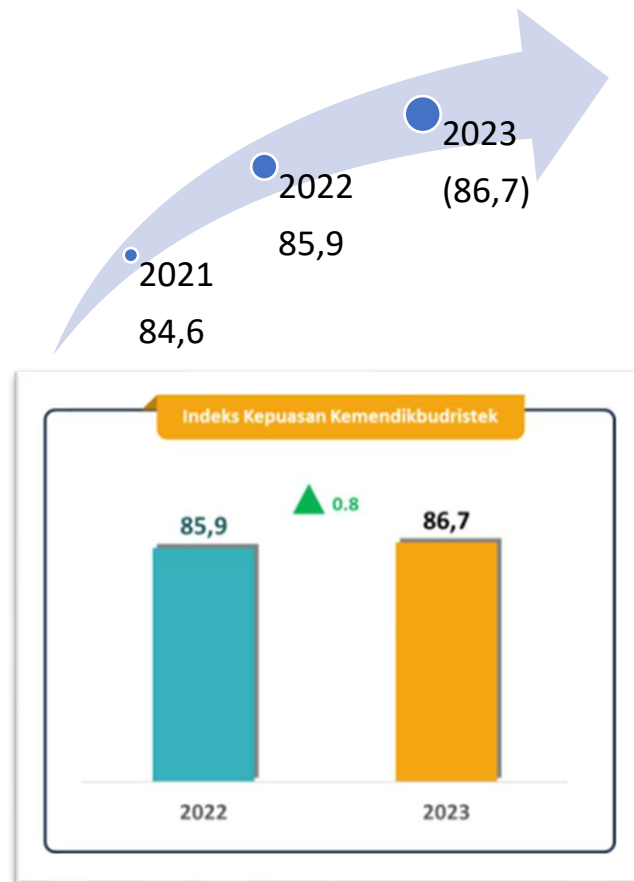
Metode yang digunakan melalui survey kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder satisfaction survey*-SSS) dilaksanakan setahun sekali. Survey ini dilaksanakan oleh pihak eksternal untuk menjamin independensi hasil survey, tetapi pihak eksternal tersebut ditentukan oleh Kemendikbudristek melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Berikut metode perhitungan untuk Indeks kepuasan pemangku kepentingan (IKPK):

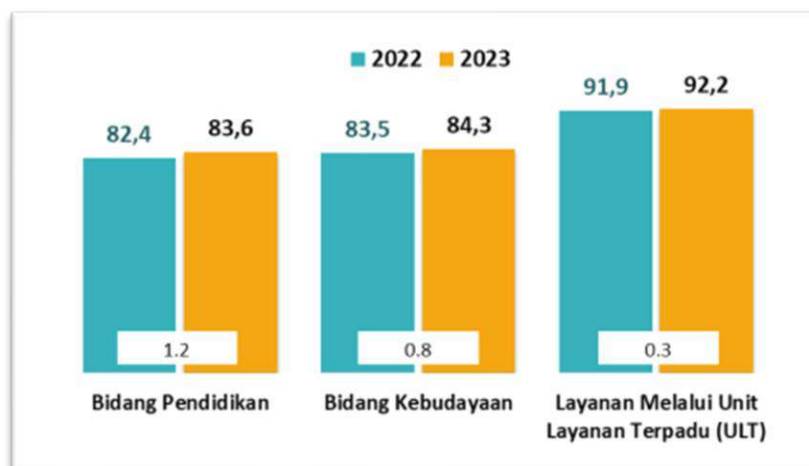
$$IKPK = \frac{IKPK \text{ Bidang Pendidikan} + IKPK \text{ Bidang Kebudayaan} + IKPK \text{ Layanan ULT}}{3}$$

Jumlah target responden kategori penerima manfaat langsung dari Kemendikbudristek dalam survei ini adalah sebanyak 12.340 responden dari 34 Provinsi. Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek 2023 sebesar 86.7, naik 0.8 poin dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan batasan norma Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PermenPANRB No.14/2017, indeks

kepuasan Kemendikbudristek masuk dalam kategori Memuaskan. Ketercapaian ini tentunya melebihi dari yang ditargetkan Kemendikbudristek pada tahun 2023 dan 2024.



Kenaikan indeks kepuasan terjadi di bidang pendidikan dan kebudayaan maupun layanan ULT. Indeks kepuasan bidang pendidikan sebesar 83.6, naik 1.2 poin. Indeks bidang kebudayaan sebesar 84.3, naik 0.8 poin. Sedangkan indeks layanan ULT naik 0.3 menjadi sebesar 92.2. Indeks layanan ULT masuk dalam kategori Sangat Memuaskan.



Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan survei kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek serta survei pelayanan unit layanan terpadu Kemendikbudristek secara berkala;
2. Monitoring media cetak dan sosial terkait isu kebijakan Kemendikbudristek dan publikasi kebijakan Kemendikbudristek melalui media sosial, media elektronik, dan media cetak baik media internal maupun eksternal Kemendikbudristek
3. Fasilitasi layanan hubungan antarlembaga negara, masyarakat, dan lembaga lainnya serta kerja sama dalam dan luar negeri
4. Pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan program prioritas dan kebijakan Kemendikbudristek melalui *Contact Center & Helpdesk*

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Kepuasan pemangku kepentingan terkait kesesuaian waktu mendapatkan hasil penyetaraan ijazah luar negeri dengan SLA dan layanan dengan standar pelayanan dalam penilaian angka kredit dosen belum optimal
2. Terbatasnya pengetahuan petugas layanan pada layanan terpadu terhadap pembaharuan info-info kebijakan Kemendikbudristek

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses layanan penyetaraan ijazah luar negeri dan standar pelayanan penilaian angka kredit dosen
2. Pembekalan SDM layanan terpadu untuk meningkatkan pengetahuan petugas layanan terhadap kebijakan Kemendikbudristek

IKSS 5.3 : Predikat SAKIP Kemendikbudristek

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
BB	BB	A	BB	99,44	A	99,44

Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, Unit Kerja, dan Satker (Unit Kerja Mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.



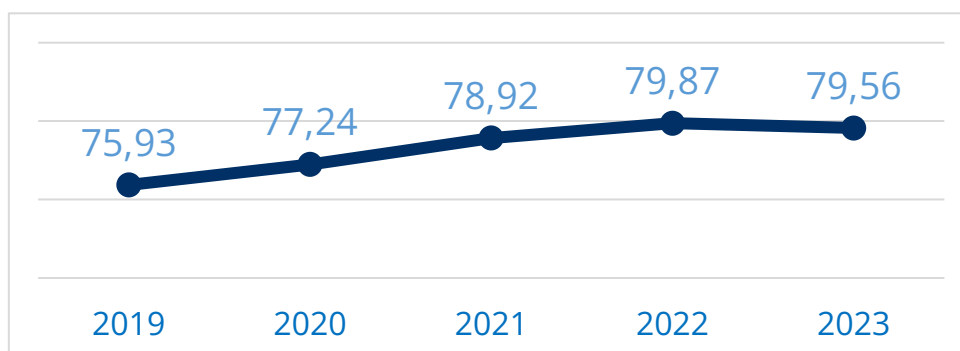
Pelaksanaan evaluasi atas penerapan SAKIP tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kategori penilaian SAKIP adalah sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interprestasi
> 90-100	AA	Sangat Memuaskan
> 80-90	A	Memuaskan
> 70-80	BB	Sangat Baik
> 60-70	B	Baik
> 50-60	CC	Cukup (Memadai)
> 30-50	C	Kurang
> 0-30	D	Sangat Kurang

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Pada tahun 2023 target kinerja dari indikator kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbudristek adalah A, dengan hasil yang ditetapkan oleh KemenpanRB BB dengan nilai 79,56. Capaian tahun 2023 ini tentunya tidak mencapai yang ditargetkan pada Tahun 2023 dan 2024. Selain belum mencapai target, terjadi penurunan nilai dari tahun 2022 sebanyak 0,13 poin.



Ketidaktercapaian target ini terjadi akibat penurunan nilai SAKIP Kemendikbudristek yang salah satunya disebabkan masih banyaknya satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang belum memanfaatkan hasil evaluasi kinerjanya sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Melakukan reviu Indikator Kinerja dan penyesuaian atas Indikator Kinerja pada unit kerja dan UPT yang belum menyajikan indikator kinerja yang berorientasi hasil (*outcome*) dengan memperhatikan keselarasan indikator kinerja pada unit di atasnya, sampai pada tingkat kementerian.
2. Kemendikbudristek sudah memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward* atau *punishment*. Mendikbudristek memberikan sertifikat penghargaan bagi Satuan kerja dengan Kinerja terbaik. Selain itu, Mendikbudristek, melalui Sesjen, memberikan surat teguran kepada Satker yang kinerjanya belum optimal.
3. Melakukan sosialisasi secara berkala untuk memastikan seluruh satker memanfaatkan hasil pengukuran dalam melakukan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan
4. Pelibatan aktif pimpinan satuan kerja dalam pengukuran kinerja, ditandai dengan pemberian rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja berkala
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala untuk perbaikan kinerja periode berikutnya
6. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dengan tim perencanaan dan tim evaluasi di internal kementerian maupun tim eksternal (K/L terkait)

untuk memastikan hasil pengukuran kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan

7. Kemendikbudristek melalui Biro Perencanaan terus melakukan pendampingan kepada seluruh satker baik formal maupun informal terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja yang baik sesuai dengan Permenpan-RB 53 Tahun 2014
8. Verifikasi terhadap data dukung tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP telah dilakukan pada saat evaluasi mandiri/evaluasi internal tahun 2022 yang dilakukan baik oleh satker dengan didampingi oleh tim Biro Perencanaan pada saat evaluasi mandiri, serta pada saat evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Mekanisme verifikasi data dukung dilakukan melalui *platform* SPASIKITA karena seluruh satker melakukan tindak lanjut melalui aplikasi SPASIKITA. Semua data dukung terkait tindak lanjut hasil evaluasi AKIP sudah diupload juga pada aplikasi SPASIKITA sehingga memudahkan evaluator melakukan verifikasi.
9. Kemendikbudristek melakukan pelatihan peningkatan kompetensi SDM SAKIP di unit kerja dan UPT terutama yang nilai AKIP-nya belum optimal. Selain itu tahun 2023 ini untuk pertama kalinya akan dilakukan pelatihan SAKIP tingkat lanjut yang ditujukan untuk pimpinan unit kerja/satuan kerja dalam rangka meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam penyelenggaraan SAKIP.
10. Memberikan surat teguran kepada unit kerja yang Predikat SAKIPnya belum optimal supaya menjadi perhatian bagi Pimpinan Unit Kerja.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran satuan kerja dalam memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja;
2. Masih terdapat satuan kerja yang terlambat dalam menyampaikan laporan kinerja triwulan;
3. Pemahaman evaluator AKIP masih beragam dan belum selaras terkait Kertas Kerja Evaluasi, sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP kurang optimal;
4. Masih kurangnya keterlibatan pimpinan dalam penyelenggaraan SAKIP sehingga hasil evaluasi kurang optimal

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi serta pengembangan aplikasi sehingga satuan kerja dapat memahami dan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja;
2. Memberikan teguran kepada satuan kerja yang terlambat menyampaikan laporan kinerja triwulan;
3. Melakukan sosialisasi kepada evaluator AKIP terkait Kertas Kerja Evaluasi dan menyampaikan pedoman Kertas Kerja Evaluasi;
4. Melakukan pendampingan kepada satuan kerja yang hasil evaluasinya belum optimal dan melaksanakan pelatihan SDM tingkat lanjut yang ditujukan untuk pimpinan satuan kerja dalam rangka meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam penyelenggaraan SAKIP.

IKSS 5.4 : Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		Target PK	Realisasi	%		
78,79	78,88	81	83,79	103,44	87	96,31

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penyimpulan atas hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) mengacu pada PerMenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020.

Untuk capaian indeks RB Kemendikbudristek tahun 2023 mendapatkan hasil sebesar 83,79 dengan kategori A- dengan predikat Memuaskan dengan Catatan yang memiliki interpretasi secara instansional memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Peta jalan reformasi birokrasi Kemendikbudristek telah disempurnakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 136/M/2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024 sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Peta jalan reformasi birokrasi telah dilakukan penajaman dengan memuat sasaran strategis reformasi birokrasi yang disederhanakan menjadi dua aspek yaitu:

- a. sasaran strategis pertama yang berkaitan dengan aspek hard element, yaitu SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel.
- b. sasaran strategis yang kedua yang berkaitan dengan aspek soft element, yaitu SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional.

Tabel Target Kegiatan Utama Kemendikbudristek 2023–2024

No.	Kegiatan Utama	Indikator
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan
		Nilai SAKIP
5	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI
6	Penguatan Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP



No.	Kegiatan Utama	Indikator
7	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
8	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei penilaian integritas (SPI)
9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum
11	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip
12	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
13	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Opini BPK
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
14	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Khusus Kementerian/Lembaga)
		Indeks Pengelolaan Aset (Khusus Kementerian/Lembaga)
15	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan kebijakan transformasi jabatan fungsional
16	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta
17	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN

No.	Kegiatan Utama	Indikator
18	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit
19	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK
		Employeeer/Branding
20	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Indeks Pelayanan Publik

Untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret RB terhadap isu yang ada di hilir, capaian Pembangunan Nasional, dirumuskanlah RB Tematik oleh Kementerian PANRB. Melalui RB Tematik, Kemendikbudristek dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Konsep RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola, Kemendikbudristek diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Terdapat empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu (1) Pengentasan Kemiskinan, (2) Peningkatan Investasi, (3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dan (4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Bobot dan indikator penghitungan indeks RB, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau pegawai kementerian;
2. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
3. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penghitungan indeks reformasi birokrasi tahun 2023 sebagai berikut:

RB General	
KOMPONEN	BOBOT
Staregi Pelaksanaan RB General	10
Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40
Capaian Sasaran Strategis	50
TOTAL	100

RB Tematik	
Kementerian/Lembaga	
KOMPONEN	BOBOT
Capaian RB Tematik	10
Total	10

Total Bobot

Kementerian/Lembaga : $100+10 = 110$

Kebijakan terbaru Penilaian indeks RB berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi General (100)
 - a. Pelaksanaan RB General (10)
 - Rencana Aksi Pembangunan RB General (3)
 - Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General (7)
 - b. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB (40)
 - Hard Element (Sasaran 1) (33)
 - Soft Element (Sasaran 2) (7)
 - c. Capaian Sasaran Strategis RB (50)
 - Hard Element (Sasaran 1) (28)
 - Soft Element (Sasaran 2) (22)
2. Reformasi Birokrasi Tematik (10)

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi Reformasi Birokrasi Internal pada 9 unit utama;
2. Melakukan Reformasi Birokrasi Kementerian, Reformasi Birokrasi General on-going, serta Reformasi Birokrasi Tematik On-Going;
3. Penyusunan road map Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek;

Adanya perubahan yang signifikan pada peta jalan RB Nasional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024, menuntut perubahan road map RB Kemendikbudristek, sehingga dilakukan perubahan road map RB Kemendikbudristek tahun 2023–2024 bahwa pembangunan RB tidak



berdasarkan 8 area perubahan lagi, namun pada penuntasan isu hulu (RB General) dan isu hilir (RB tematik).

4. Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi Kementerian;

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat terwujudnya target yang sudah ditetapkan dalam road map RB Kemendikbudristek, disusun rencana aksi pada masing-masing kegiatan utama, pihak yang terlibat, dan anggaran yang dibutuhkan. Rencana aksi tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 48/O/2023 tentang Rencana Aksi Implementasi Rencana Strategi dan Program Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Rencana aksi tersebut juga telah difasilitasi untuk di-input dalam Portal RB Nasional.

5. Pembentukan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi (*Strategic Transformation Unit*) Kemendikbudristek Tahun 2023–2024;

Pelaksanaan sasaran strategis reformasi birokrasi perlu intens dikawal implementasinya dengan membentuk Unit Pengelola Reformasi Birokrasi (*Strategic Transformation Unit* (STU) di tingkat Kementerian dan masing-masing unit utama. STU Setjen ditetapkan dalam Keputusan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42/P/2023 tentang Unit Pengelola reformasi Birokrasi Internal (*Strategic Information Unit*) Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023–2024.

6. Fasilitasi upaya peningkatan indikator penilaian RB meso;

Evaluasi RB dinilai dari tingkat mikro oleh tim penilai internal terkait dengan pembangunan RB di level Kementerian masing-masing, serta tingkat meso oleh kementerian/lembaga yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk mengukur dan menilai perkembangan aspek-aspek terkait reformasi birokrasi. Beberapa indikator meso yang dilakukan fasilitasi peningkatan indeksnyanya antara lain indeks survei penilaian integritas, tingkat implementasi

penyederhanaan birokrasi, tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai, indeks kualitas kebijakan, indeks reformasi hukum, indeks BerAKHLAK, dan *employee branding* ASN.

7. Fasilitasi pembangunan RB unit utama

Dilakukan fasilitasi pembangunan RB di tingkat unit utama dengan melakukan beberapa pendampingan penyusunan dan evaluasi rencana aksi RB general dan reformasi birokrasi tematik.

8. Fasilitasi pembangunan ZI WBK/WBBM

Fasilitasi pembangunan zona integritas dilakukan kepada satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek dalam bentuk internalisasi pembangunan ZI pada satuan kerja, pendampingan pengisian LKE ZI, pengisian survei eksternal, dan optimalisasi inovasi dan layanan satuan kerja. Pada tahun 2023, telah terdapat 2 satuan kerja yang berpredikat ZI WBK (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V) sehingga sampai saat ini terdapat 57 satuan kerja berpredikat ZI WBK/WBBM di lingkungan Kemendikbudristek.



Gambar 1. Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi ZI kepada Plt. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini oleh Menteri PANRB didampingi Sekretaris Menteri dan Deputi RB Kunwas



Gambar 2. Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi ZI kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V oleh Menteri PANRB didampingi Sekretaris Menteri dan Deputi RB Kunwas

Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi dan antusias satuan kerja dalam membangun ZI WBK/WBBM, diusulkan pemberian penghargaan oleh Mendikbudristek kepada unit kerja yang telah membangun ZI WBK/WBBM Tahun 2023 kepada 58 satuan kerja.

9. Penyusunan kebijakan penugasan unit kerja dalam membangun zona integritas

Melalui penetapan kebijakan ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi wajib melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan sekaligus dilakukan internalisasi kepada satuan kerja yang masih awam dalam pembangunan ZI.



Gambar 3. Sosialisasi Kepmendikbudristek 228 dan internalisasi ZI WBK di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro



Gambar 4. Sosialisasi Kepmendikbudristek 228 dan internalisasi ZI WBK di Setditjen Kebudayaan

10. Fasilitasi evaluasi reformasi birokrasi *ex-ante* dan *on-going*;

Sesuai dengan amanat PerMenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, evaluasi RB dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan (*ex-ante*) dan pelaksanaan (*on-going*). Pelaksanaan fasilitasi evaluasi *ex-ante* telah dilakukan untuk mengevaluasi penyusunan peta jalan dan renaksi RB general dan tematik, sedangkan evaluasi RB *on-going*

dilakukan dan dilaporkan hasilnya kepada Mendikbudristek dengan tembusan kepada Menteri PANRB setiap triwulan.

11. Evaluasi unit kerja berpredikat ZI WBK/WBBM;

Untuk menjaga kualitas pembangunan ZI pada satuan kerja yang telah berpredikat ZI WBK/WBBM, dilakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI WBK/WBBM pada 8 (delapan) unit kerja yang telah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi yaitu BPMP Bali, BPK Bali, Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Bandung, Galeri Nasional, Museum Manusia Purba Sangiran, BPMP Jambi, dan BPMP Banten.

12. Pengelolaan agen perubahan

Agen perubahan merupakan cikal bakal pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat individu sehingga perlu untuk dilakukan pengelolaan di tiap satuan kerja. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan forum agen perubahan. Selain itu, agen perubahan juga diharapkan dapat menjadi katalis dalam penerapan *core values* ASN BerAKHLAK dan *employee branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan mekanisme pembangunan dan evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintahan pada tahun berjalan sehingga diperlukan penyesuaian dan implementasi kebijakan yang dituntut dalam waktu singkat;
2. Kurangnya komitmen tim pelaksana RB General dan RB Tematik dalam pelaksanaan dan evaluasi RB karena prioritas kebijakan unit utama yang beragam;

3. Kebijakan mekanisme pengusulan dan evaluasi ZI berubah setiap tahun sehingga perlu terus koordinasi yang intens antara tim penilai nasional, tim penilai internal, unit utama pengusul, dan satuan kerja pengusul;
4. Satuan kerja yang diusulkan ke Tim Penilai Internal belum memenuhi persyaratan administrasi pengusulan ZI WBK/WBBM;
5. Beberapa unit kerja yang telah mendapatkan predikat ZI WBK tidak melanjutkan pembangunan ZI WBBM karena adanya perubahan struktur dan penataan SDM yang signifikan serta tidak adanya reward bagi satuan kerja yang telah berhasil mendapatkan predikat ZI WBK.
6. Sulitnya mengakses Portal RB Nasional karena pengguna yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi, serta aplikasi yang sering eror ketika digunakan oleh multi-user; serta
7. Evaluasi yang dilakukan terhadap satker yang diusulkan ke Tim Penilai Internal masih terdapat pemenuhan persyaratan yang perlu dipertimbangkan kembali;

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. Menyosialisasikan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi RB serta dampak pembangunan RB kepada seluruh unit utama;
2. Melakukan koordinasi yang intens dengan beberapa Kementerian/Lembaga yang terkait dengan penilaian reformasi birokrasi general dan tematik untuk melakukan pemutakhiran informasi dan kebijakan;
3. Melakukan fasilitasi kepada masing masing penanggungjawab RB General dan RB Tematik agar berkomitmen dalam proses evaluasi Reformasi Birokrasi;

4. Melakukan koordinasi yang intens dengan Kementerian PAN dan RB dan satuan kerja pengusul terkait dengan mekanisme pengusulan dan kebijakan evaluasi ZI terbaru;
5. Mendorong unit kerja dan unit utama pembinanya untuk membangun komitmen melanjutkan pembangunan ZI WBK/WBBM dan melakukan sosialisasi Kepmendikbudristek Nomor 228/O/2023 bahwa seluruh satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek wajib melaksanakan pembangunan ZI WBK;
6. Unit utama perlu melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan administrasi satker sebelum diusulkan ke Tim Penilai Internal; dan
7. Memberikan pendampingan dan fasilitasi secara berkelanjutan terkait pengisian Portal RB Nasional kepada pengguna di tingkat unit utama.

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2023 Kemendikbudristek, merealisasikan 95,49% dari pagu anggaran Rp 84.527.635.111.000,- yaitu sebesar Rp 80.714.414.470.938,- realisasi tersebut bersumber dari Aplikasi OMSPAN dan SatuDJA pertanggal 19 Februari 2024. Berikut rincian penyerapan anggaran tersebut perprogram:

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	10,115,074,918,000	10,104,603,575,724	99.90
Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1,697,473,979,000	1,584,657,236,139	93.35
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	13,271,195,244,000	13,064,493,602,459	98.44
Program Pendidikan Tinggi	35,426,665,203,000	32,791,576,970,315	92.56
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4,719,402,666,000	4,478,577,223,300	94.90
Program Dukungan Manajemen	19,297,823,101,000	18,690,505,863,001	96.85
Total	84,527,635,111,000	80,714,414,470,938	95.49

sedangkan rincian penyerapan anggaran tersebut permasing-masing Unit Eselon I dan sumber dananya, sebagai berikut:

Unit Eselon I	Sumber Dana	Pagu	Blokir	% Blokir	Realisasi	%
TOTAL KL		84,527,635,111,000	302,397,273,000	0.36	80,714,414,470,938	95.49
SETJEN	1. RUPIAH MURNI	35,090,941,406,000	-	0.00	34,735,571,125,030	98.99
	2. PNPB	4,345,297,000	-	0.00	4,344,953,026	99.99
	3. HIBAH LN	339,113,000	-	0.00	339,113,000	100.00
	4. SBSN PBS	122,600,527,000	-	0.00	15,197,041,460	12.40
ITJEN	1. RUPIAH MURNI	198,398,369,000	-	0.00	191,093,049,266	96.32
PAUDDASMEN	1. RUPIAH MURNI	2,343,175,966,000	2,540,189,000	0.11	2,293,687,973,850	97.89
	2. HIBAH DN	7,500,000,000	-	0.00	7,499,495,300	99.99
	3. HIBAH LN	857,221,000	-	0.00	857,219,410	100.00
BSKAP	1. RUPIAH MURNI	938,011,305,000	-	0.00	914,252,214,678	97.47
	2. BLU	76,849,833,000	-	0.00	75,165,417,081	97.81
	3. HIBAH LN	81,100,000	-	0.00	81,100,000	100.00
Badan Bahasa	1. RUPIAH MURNI	548,335,336,000	-	0.00	538,884,770,663	98.28
	2. PNPB	139,312,000	-	0.00	68,535,881	49.20
Kebudayaan	1. RUPIAH MURNI	2,151,587,722,000	-	0.00	2,056,139,348,561	95.56
	2. PNPB	458,002,000	-	0.00	458,000,000	100.00
	3. BLU	34,971,836,000	-	0.00	-	0.00
GTK	1. RUPIAH MURNI	3,254,977,597,000	-	0.00	3,236,155,554,137	99.42
	2. PNPB	1,989,471,000	-	0.00	437,894,547	22.01
DIKTI RISTEK	1. RUPIAH MURNI	18,549,231,758,000	200,931,038,000	1.08	17,722,789,586,085	95.54
	2. PINJAMAN LN	2,084,757,984,000	-	0.00	1,326,592,939,970	63.63
	3. RM PENDAMPING	98,625,826,000	-	0.00	78,909,235,349	80.01
	4. PNPB	821,532,329,000	60,000,000	0.01	766,855,295,947	93.34
	5. BLU	8,912,876,437,000	4,469,009,000	0.05	8,312,629,115,027	93.27



Unit Eselon I	Sumber Dana	Pagu	Blokir	% Blokir	Realisasi	%
	6. HIBAH DN	16,100,000,000	-	0.00	12,316,063,000	76.50
	7. HIBAH LN	81,787,192,000	33,319,329,000	40.74	5,356,672,091	6.55
	8. SBSN	1,852,063,314,000	51,608,220,000	2.79	1,392,108,658,666	75.17
VOKASI	1. RUPIAH MURNI	5,084,449,009,000	3,572,568,000	0.07	4,953,063,869,288	97.42
	2. PNBP	517,177,552,000	4,037,000	0.00	489,409,157,001	94.63
	3. BLU	1,013,238,460,000	5,892,883,000	0.58	876,490,784,967	86.50
	4. HIBAH DN	8,994,306,000	-	0.00	7,870,042,683	87.50
	5. HIBAH LN	207,531,000	-	0.00	206,550,320	99.53
	6. SBSN PBS	711,034,000,000	-	0.00	699,583,694,654	98.39

C. Efisiensi Sumber Daya

Dari pagu anggaran Kemendikbudristek Tahun 2023 yang sebesar Rp 84.527.635.111.000,- , Kemendikbudristek berhasil melakukan efisiensi 12.27% atau sebesar Rp 6.644.570.375.316,- . Adapun efisiensi tersebut didapatkan dari total seluruh efisiensi yang dilakukan unit eselon I Kemendikbudristek berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggaran yang diterbitkan pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan tanggal 20 Februari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No.	UNIT UTAMA	Efisiensi (%)	Efisiensi (Rp)
1	SETJEN	9.5	3,707,181,720,316
2	ITJEN	13.23	14,996,097,430
3	DITJEN PAUDDIKDASMAN	19.11	123,052,495,395
4	BSKAP	4.4	230,668,690,455
5	BADAN BAHASA	20	27,423,732,400
6	DITJEN KEBUDAYAAN	20	109,350,878,000
7	DITJEN GTK	13.41	242,875,993,139
8	DITJEN DIKTIRISTEK	20	1,620,848,742,000
9	DITJEN VOKASI	12.91	568,172,026,181
TOTAL		12.72	6,644,570,375,316

Secara rinci efisiensi anggaran tersebut sebagai berikut:

Sasaran	Optimalisasi yang Dilakukan	Kinerja yang Didukung
Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi jumlah penerima bantuan pembiayaan Pendidikan dasar dan menengah (Program Indonesia Pintar) Optimalisasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Optimalisasi penerima KIP Kuliah Optimalisasi pembangunan fasilitas PT melalui SBSN dan PHLN 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah jenjang dasar dan menengah Peningkatan Angka Partisipasi Kasar SMA sederajat Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pemberian gaji guru SILN dan Tunjangan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS Optimalisasi jumlah sasaran PPG Daljab dan Prajab Optimalisasi penguatan karakter peserta didik Optimalisasi peningkatan prestasi peserta didik Optimalisasi pemulihan pembelajaran Optimalisasi implementasi pelaksanaan assemen 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional Peningkatan Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik Peningkatan jumlah Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya Peningkatan Peserta Didik Yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum Dalam Asesmen Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi

Sasaran	Optimalisasi yang Dilakukan	Kinerja yang Didukung
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya Optimalisasi penyelenggaraan <i>Event</i> Kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan
Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pengusulan Zona Integritas 	Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi

D. Inovasi

1. Pengembangan Platform Merdeka Mengajar

a. Fitur Rekomendasi Belajar Berbasis Rapor Pendidikan

Penambahan fitur Rekomendasi Belajar berbasis Rapor Pendidikan dan Refleksi Kompetensi pada platform Merdeka Mengajar yang dapat diakses melalui aplikasi android maupun web lalu buka halaman <https://guru.kemdikbud.go.id/refleksi-kompetensi>



Apa itu fitur Rekomendasi Belajar berbasis Rapor Pendidikan?

Kini, menentukan prioritas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jadi semakin mudah karena rekomendasinya otomatis disesuaikan dengan laporan capaian di Rapor Pendidikan.

Waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk meningkatkan kompetensi menjadi lebih efisien serta topik-topik yang dipelajari akan semakin relevan dan berdampak untuk pembenahan satuan pendidikan Anda.

Bagaimana cara menggunakan fitur Rekomendasi Belajar berbasis Rapor Pendidikan?

1. Masuk ke menu Pelatihan Mandiri di platform Merdeka Mengajar
2. Temukan bagian Rekomendasi Belajar pada halaman Untuk Anda dan pilih salah satu topik
3. Ikuti topik-topik pelatihan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan Anda

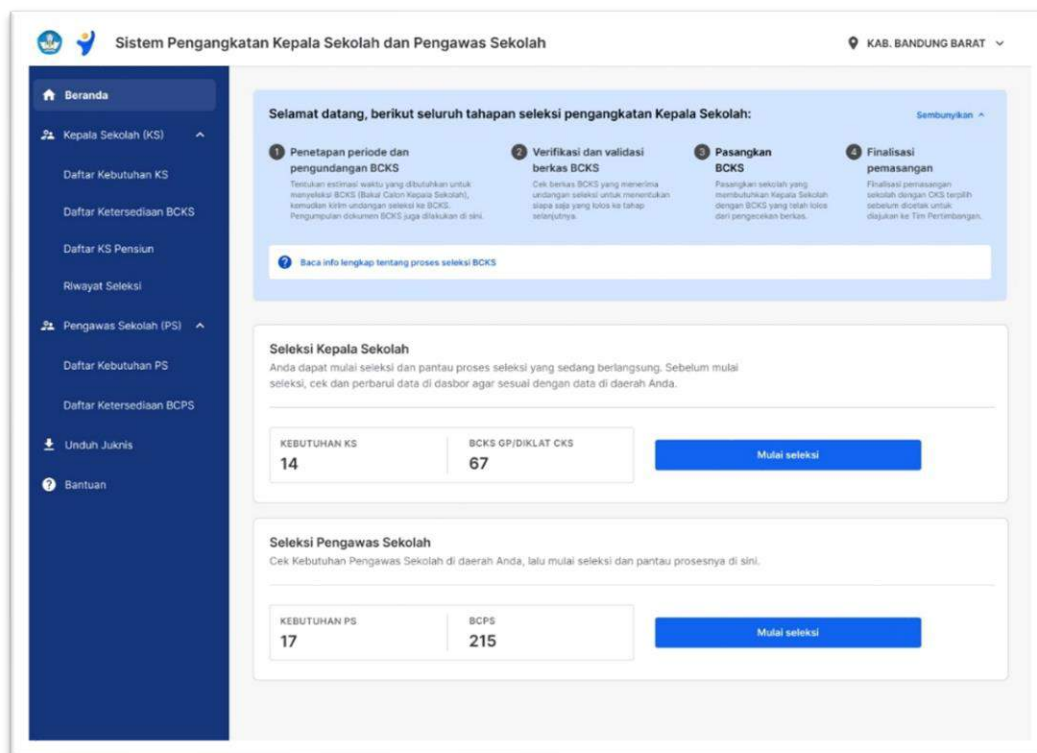
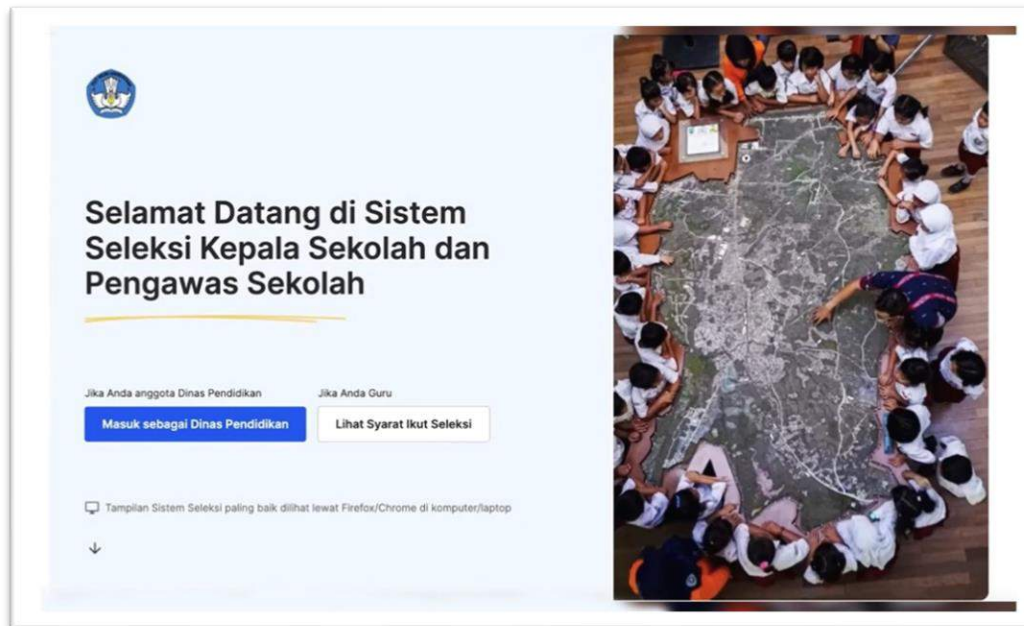
Akses platform Merdeka Mengajar sekarang dan wujudkan pembelajaran yang **#LebihBermakna**

- b. Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah secara digital yang terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar

Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah secara digital yang terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar. Sistem tersebut dapat diakses melalui laman <https://pengangkatanksp.kemdikbud.go.id/>.

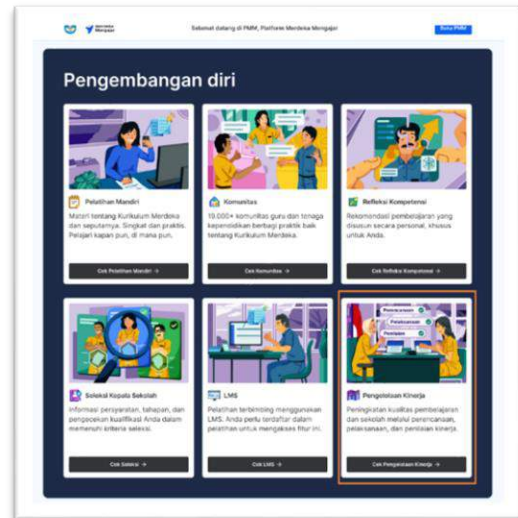
Pengembangan sistem ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan penugasan/pengangkatan guru sebagai kepala sekolah



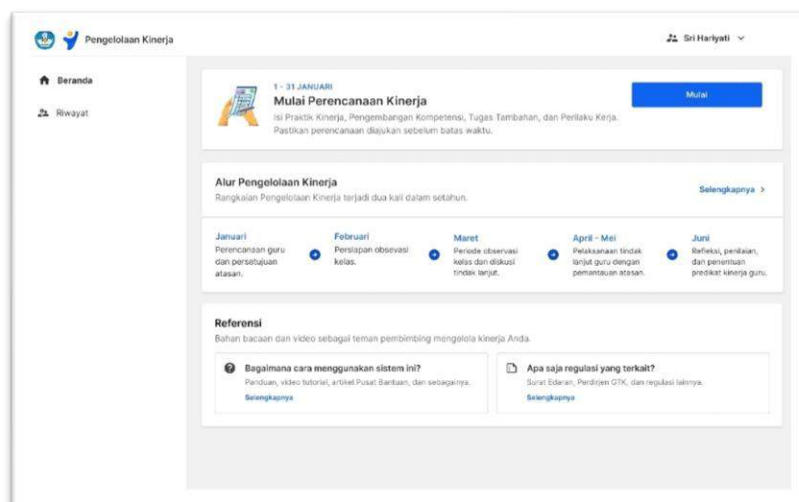


- c. Fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala Sekolah melalui platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan layanan e-Kinerja

Fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala Sekolah melalui platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan layanan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Fitur tersebut dikembangkan sebagai alat bantu untuk memudahkan guru dan Kepala Sekolah menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan satuan Pendidikan dan pengembangan karir guru dan kepala sekolah. Fitur tersebut dapat diakses melalui aplikasi android maupun web. Buka halaman <https://guru.kemdikbud.go.id/> lalu geser layer ke bawah dan temukan Pengembangan Diri, lalu klik Pengelolaan Kinerja



- d. Fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala Sekolah melalui platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan layanan e-Kinerja

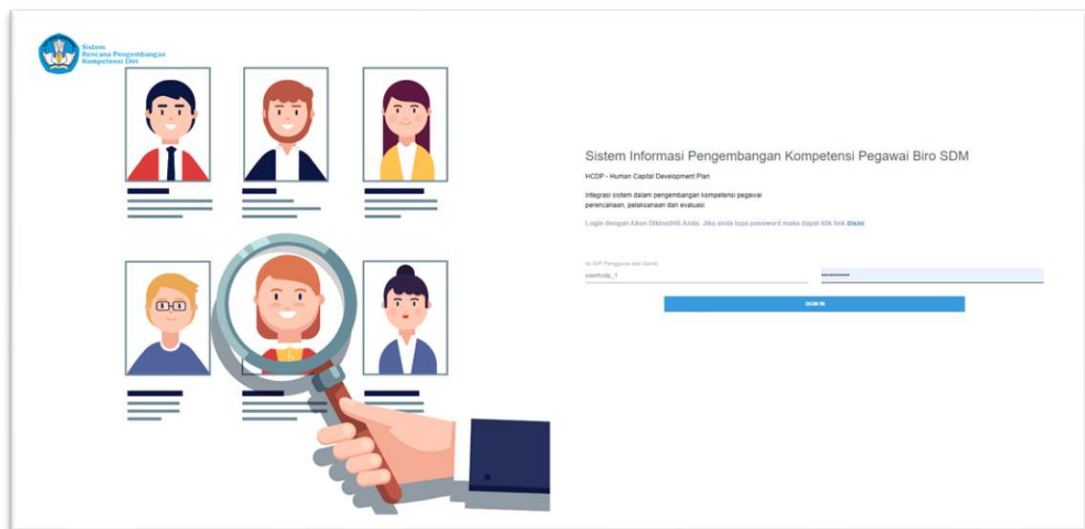


2. Aplikasi Manajemen Karier Pegawai

Aplikasi manajemen karier pegawai terintegrasi dimaksudkan untuk membantu manajemen SDM terkait perencanaan pengembangan (TNA), memudahkan akuisisi talent, pembentukan kelompok rencana suksesi, dan perencanaan karier pegawai selama jangka waktu tertentu.

Dampak dari adanya inovasi tersebut yaitu:

- 1) tersedianya data rencana pengembangan pegawai
- 2) tersedianya data profil pegawai untuk pengelompokan talent dan akuisisi talent
- 3) data pendukung bagi pengisian jabatan-jabatan kritikal
- 4) memberikan data dukung dalam penempatan pegawai (karier pegawai/proses mutasi kepegawaian).



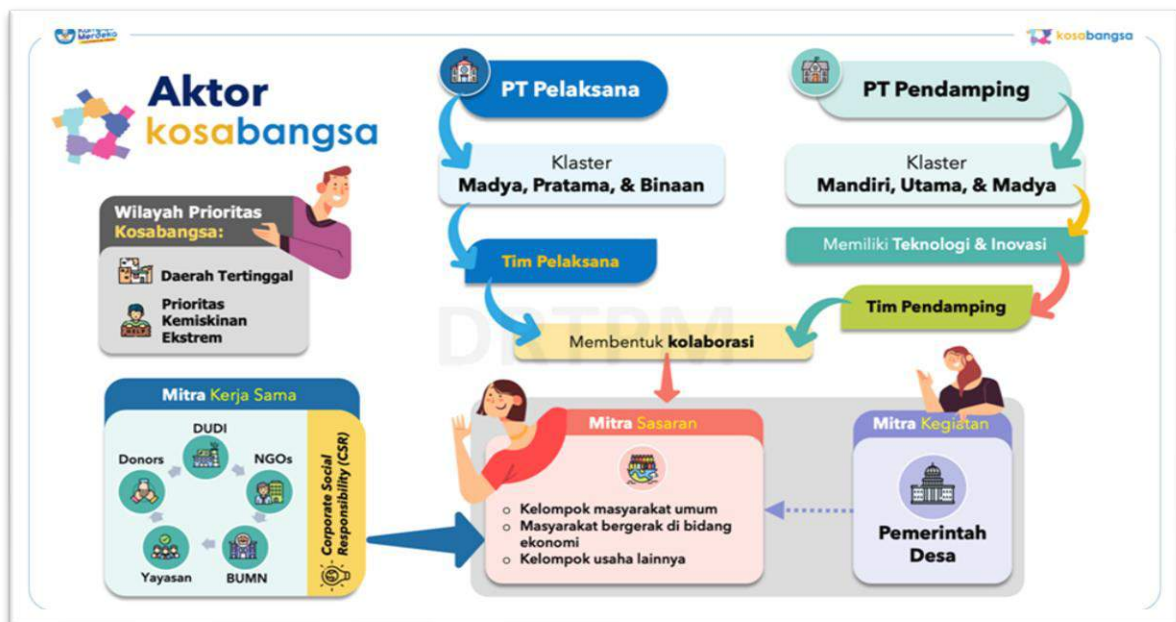
3. Kosabangsa

Program pemberdayaan masyarakat di perguruan tinggi ini diarahkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat berdasarkan analisis situasi, serta dilaksanakan oleh perguruan tinggi pelaksana berkolaborasi dengan perguruan tinggi pendamping. Konsep

sinergi ini disebut sebagai suatu Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat (Kosabangsa).

Sinergi kolaborasi antar perguruan tinggi (dosen dan mahasiswa), beserta mitra sasaran (kelompok masyarakat), mitra kegiatan (institusi pemerintahan desa/kelurahan/desa adat), dan mitra kerja sama (DuDi, Yayasan, NGO/LSM, BUMN, Donor) diharapkan menjadi akselerasi dalam pembangunan bangsa melalui penerapan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat melalui dukungan para mitra strategis.

Pada Program Kosabangsa, DRTPM memberikan bantuan pendanaan untuk 105 Judul proposal perguruan tinggi yang terpilih berdasarkan hasil seleksi dengan rincian tim pelaksana yang berasal dari 70 perguruan tinggi pelaksana dan tim pendamping yang berasal dari 49 perguruan tinggi pendamping.



Penghargaan



Penghargaan Government Public Relations (GPR) Institute

Prestasi membangun Digital Public Relations



Piagam Penghargaan

Predikat Penilaian Kepatuhan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun
2023



Penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia

Peringkat II dengan kategori AA “Sangat Memuaskan” berdasarkan hasil pengawasan kearsipan Tahun 2022



Humas Indonesia

Meraih Silver Winner Indonesia GPR Awards 2023 Kategori Lembaga Humas-Pemerintah Terbaik



Piagam Penghargaan

Atas peran aktif dan Berkomitmen dalam mendorong pemenuhan kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2022-2023



SPS Awards 2023 – Media Relations Awards (MRA) 2023

Gold Winner Kategori Press Release



SPS Awards 2023 – Indonesia Digital Media Awards 2023

Silver Winner Kategori the Best of Government Social Media



Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2023

- Gold Winner Kategori Media Internal Subkategori E-Magazine
- Silver Winner Kategori Media Internal Subkategori Video Profile



Sertifikat Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagai Instansi yang Telah Diverifikasi
dalam Penilaian Tingkat Maturitas
Keamanan Siber (Cyber Security Maturity)
pada Sektor Pemerintah Pusat Tahun 2023



Kementerian Koperasi & UMKM

REPUBLIK INDONESIA

Memperoleh peringkat II
Dengan kategori Kementerian/Lembaga
dalam Hari UMKM Nasional Expo



Lembaga Sensor Film

Peraih Anugerah Iklan Layanan
Masyarakat Bangsa Karya Anak Bangsa.
"KEMENDIKBUD Merdeka Belajar,
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas"



**Perpustakaan Nasional
REPUBLIK INDONESIA**

Piagam penghargaan atas Keaktifannya melaksanakan UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 2023



Indonesia Contact Center Association

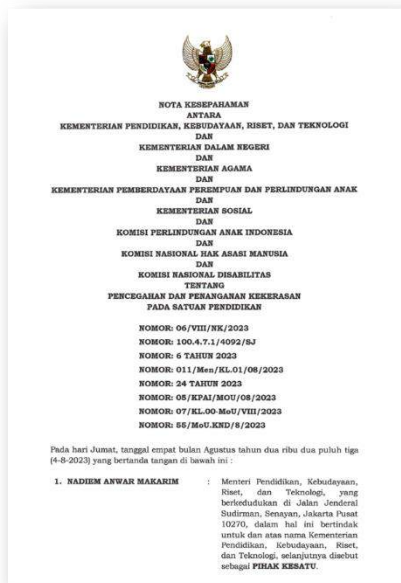
Penghargaan sebagai Pemenang The Best Technology Innovation PLATINUM

Colaborative/Crosscutting

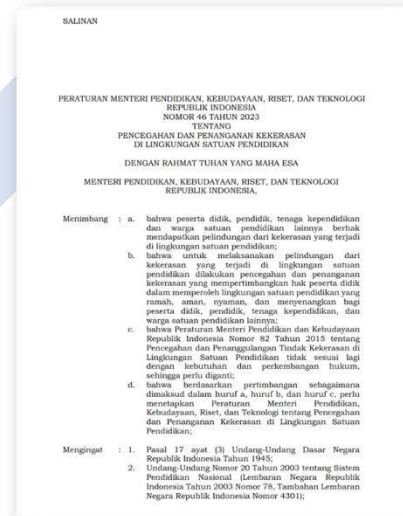
1. Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dengan 5 Kementerian dan 3 Lembaga melalui skema sinergi program/kegiatan Kolaborasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi delapan kementerian/lembaga terkait dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman demi mendukung pembelajaran yang optimal dan mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan berkarakter.



Nota Kesepahaman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan

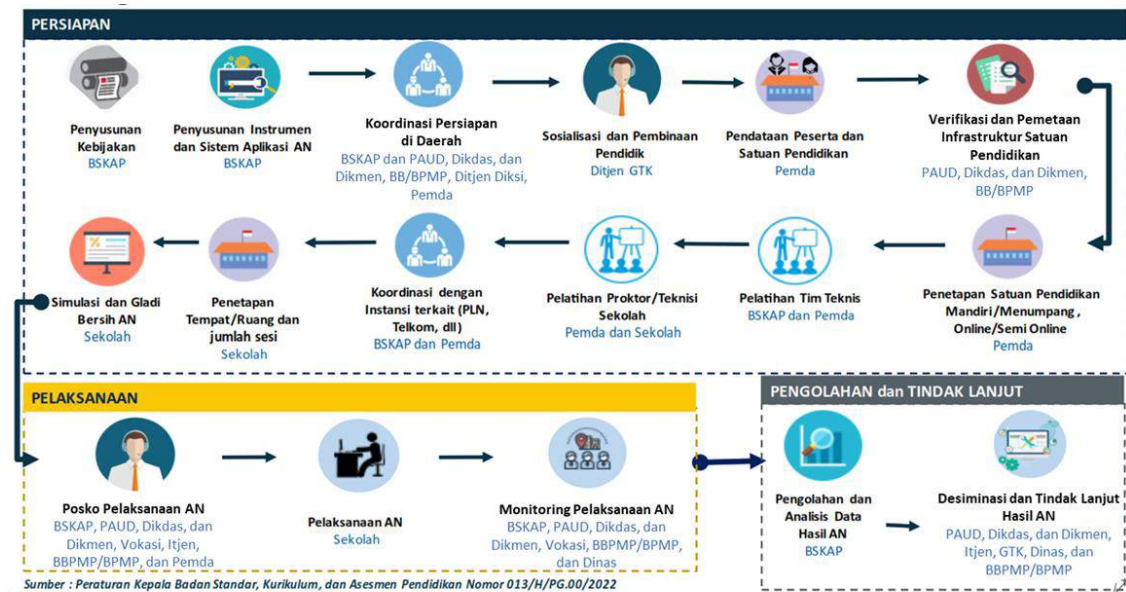


Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan



2. Asesmen Nasional

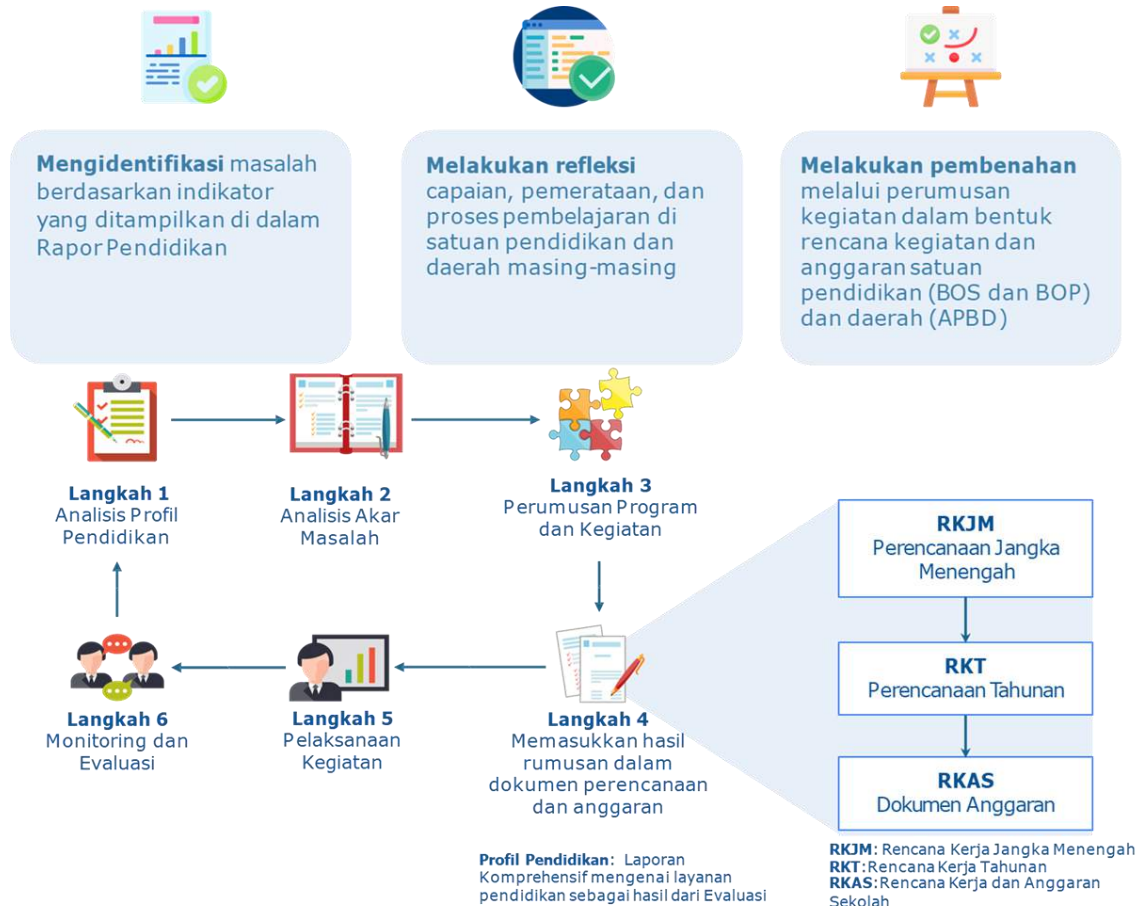
Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Pihak-pihak yang berkaitan pada program Asesmen Nasional adalah BSKAP, Ditjen GTK, Ditjen Diksi, Ditjen Vokasi, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, UPT BB/BPMP, Pemda, dan sekolah.



3. Perencanaan Berbasis Data (PBD)

PBD merupakan pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan oleh satuan pendidikan, dinas pendidikan, serta pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu dan capaian pendidikan secara berkelanjutan. PBD memastikan pembelanjaan anggaran fokus pada peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan sesuai isu yang dihadapi, serta terintegrasi dengan siklus perencanaan daerah dan satuan pendidikan, sehingga penganggaran menjadi lebih efektif, akuntabel dan konkret.

PBD merupakan kerja kolaborasi antara Kemendikbudristek (Ditjen PAUD Dikdasmen, Ditjen GTK, Ditjen Diksi, dan Biro Perencanaan), satuan pendidikan, dinas pendidikan, pemerintah daerah, Kemendagri, Kemenag, Bappenas, Kemenkeu, serta Mitra Pembangunan.



4. Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya

Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan bekerja sama dalam bidang pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya dengan beberapa pemerintah daerah diantaranya seperti:

- Pemerintah Daerah Kabupaten Maros terkait Sinergi Pelaksanaan Pemanfaatan Dan Bagi
- Hasil Retribusi Masuk Cagar Budaya Taman Prasejarah Leang-Leang - (3 Maret 2023 – 3 Maret 2025)
- Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto terkait pelestarian Cagar Budaya Trowulan Kab. Mojokerto - (05 Januari 2021–04 Januari 2024)
- Disporapar Provinsi Jawa Tengah dan Disparpora Kabupaten Sragen terkait Pengelolaan

- e. Museum Situs Manusia Purba Sangiran Klaster Krikilan – (1 April 2019–1 April 2024)
- f. Pemkab Banjarnegara terkait Sinergi Pelaksanaan Pelestarian Kawasan Candi Dieng di Kab. Banjarnegara – (21 Januari 2022–21 Januari 2025)
- g. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen terkait Sinergi Pengelolaan Museum Situs Manusia Purba Sangiran Klaster Ngebung dan Klaster Bukuran – (2 Juni 2022–2 Juni 2027)
- h. Museum Ullen Sentalu terkait Peminjaman Koleksi – (28 Oktober 2018 – 28 Oktober 2021)
- i. dan beberapa pemerintah daerah lainnya



Kerja sama tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Pemerintah Daerah terkait. Dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepakatan (NK) telah disepakati poin-poin penting dalam pelestarian serta pemanfaatan Cagar Budaya sehingga dalam pelaksanaannya dapat dijalankan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu pelestarian Cagar Budaya dan pemanfaatan Cagar Budaya dapat berjalan dengan terarah dan maksimal. Diharapkan dengan pelestarian Cagar Budaya yang baik dapat mengembangkan

pemanfaatan dan meningkatkan kunjungan masyarakat pada peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia.



Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HELMAR FARID : Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berkedudukan di Kompleks Kemendikbudristek Gedung E lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;



BAB IV

Penutup





Ringkasan Kinerja

Pada tahun 2023 Kemendikbudristek memperjanjikan 5 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja sasaran strategis dengan rata-rata capaian sasaran kinerja 103.61 % dan rata-rata capaian indicator kinerja sebesar 110.33%. Terdapat 2 IKSS yang capaiannya sama dengan yang ditargetkan tahun 2023, serta terdapat 7 IKSS yang capaiannya kurang dari yang telah ditargetkan, dan 11 IKSS capaiannya telah melebihi target tahun 2023. Adapun rata-rata pencapaian permasing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang yang didukung 5 IKSS dengan rata-rata ketercapaian sebesar 98,50%
2. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang yang didukung 8 IKSS dengan rata-rata ketercapaian sebesar 126,48%
3. Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan yang didukung 2 IKSS dengan rata-rata ketercapaian sebesar 103,76
4. Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan didukung 1 IKSS dengan ketercapaian 87.48%
5. Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel didukung oleh 4 IKSS dengan ketercapaian 101,83%

Selain itu, serapan anggaran Kemendikbudristek tahun 2023 adalah sebesar 95,49%, yakni sebesar Rp 80.714.414.470.938,- dari pagu anggaran Rp 84.527.635.111.000. Kemendikbudristek pun berhasil melakukan efisiensi sebesar 12,72% atau Rp.6.644.570.375.316,- dari anggaran tersebut.

Adapun kendala umum dalam mencapai target di tahun 2023 adalah:

1. Belum meratanya sebaran satuan pendidikan khususnya di daerah 3T, serta belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai di setiap satuan pendidikan;
2. Masih terdapat lembaga kebudayaan yang belum terstandarisasi;

3. Masih terdapat banyak jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang belum mendapatkan rekognisi internasional dan belum dapat diterapkan di masyarakat; serta
4. Hasil evaluasi tahun sebelumnya, masih belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Sebagai upaya tindak lanjut kendala tersebut Kemendikbudristek melakukan langkah antisipasi sebagai berikut:

1. Memanfaatkan anggaran DAK Fisik dan sumber pendanaan lainnya (SBSN, PHLN) untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan di setiap jenjang;
2. Melakukan sosialisasi tentang mekanisme penetapan WBTB yang mencakup tata cara pengusulan, sampai pelestariannya guna meningkatkan pemahaman terhadap sistem Data Pokok Kebudayaan;
3. Mendorong Perguruan Tinggi untuk meningkatkan penelitian yang dapat dipublikasikan di tingkat internasional serta penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. Mendorong satuan kerja agar melakukan dialog kinerja dalam menetapkan target kinerjanya.



Langkah Kerja ke Depan

Pada tahun 2024 Kemendikbudristek memperjanjikan 5 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja sasaran strategis. Dalam rangka mendorong ketercapaian sasaran strategis yang diperjanjikan tersebut, Kemendikbudristek telah merumuskan beberapa langkah kerja terdapan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:

- 1 Mengoptimalkan pemenuhan sarana prasarana pendidikan diwujudkan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan
- 2 Mengoptimalkan penyaluran bantuan pendidikan terutama untuk bantuan afirmasi pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan
- 3 Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi sehingga berdaya saing tinggi dan mampu beradaptasi melalui program MSIB
- 4 Melakukan peningkatan kompetensi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru
- 5 Mengoptimalkan implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan
- 6 Meningkatkan partisipasi publik dalam event bidang kebudayaan, diplomasi budaya, serta perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
- 7 Satuan Kerja di lingkungan Kemendikbudristek agar memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja

Lampiran

Pernyataan Telah Direviu
Perjanjian Kinerja 2023 (Awal)
Perjanjian Kinerja 2023 (Revisi)
Pengukuran Kinerja 2023



PERNYATAAN TELAH DI REVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu laporan kinerja untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2024
Inspektur Jenderal,

Natarina Muliana
NIP197211191996032002





Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 Januari 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Target Kinerja

#	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SS 1] Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	[IKSS 1.1] Angka Kesiapan Sekolah	75.59
		[IKSS 1.2] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99.32
		[IKSS 1.3] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	96.34
		[IKSS 1.4] Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat	92.80
		[IKSS 1.5] Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	36.64
2	[SS 2] Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang	[IKSS 2.1] Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	0.52
		[IKSS 2.2.a] Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Literasi	49.75
		[IKSS 2.2.b] Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Numerasi	29.20
		[IKSS 2.3] Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	30
		[IKSS 2.4] Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	48.83
		[IKSS 2.5] Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya	5.50
		[IKSS 2.6] Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/ berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP	45
		[IKSS 2.7] Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1.2X UMP)	20
3	[SS 3] Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	[IKSS 3.1] Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	75
		[IKSS 3.2] Indeks pembangunan kebudayaan	61.20

4	[SS 4] Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan	[IKSS 4.1] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	86.500
5	[SS 5] Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel	[IKSS 5.1] Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	WTP
		[IKSS 5.2] Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	83
		[IKSS 5.3] Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A
		[IKSS 5.4] Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	81

No	Nama Program	Alokasi
1	Program Pendidikan Tinggi	Rp. 31.527.253.251.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.994.718.358.000
3	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp. 14.818.624.988.000
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 4.046.031.657.000
5	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp. 8.708.496.945.000
6	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Rp. 1.282.655.238.000
	TOTAL	Rp. 80.377.780.437.000

Jakarta, 30 Januari 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 27 Desember 2023

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi,**



Nadiem Anwar Makarim

Target Kinerja

#	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SS 1] Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	[IKSS 1.1] Angka Kesiapan Sekolah	75.59
		[IKSS 1.2] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99.32
		[IKSS 1.3] Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	96.34
		[IKSS 1.4] Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat	92.80
		[IKSS 1.5] Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	31.89
2	[SS 2] Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang	[IKSS 2.1] Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	0.52
		[IKSS 2.2.a] Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Literasi	59.49
		[IKSS 2.2.b] Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Numerasi	45.24
		[IKSS 2.3] Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	30
		[IKSS 2.4] Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	48.83
		[IKSS 2.5] Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya	5.50
		[IKSS 2.6] Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/ berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP	45
		[IKSS 2.7] Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1.2X UMP)	20
3	[SS 3] Meningkatnya pemaparan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	[IKSS 3.1] Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	75
		[IKSS 3.2] Indeks pembangunan kebudayaan	61.20

4	[SS 4] Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan	[IKSS 4.1] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	86500
5	[SS 5] Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel	[IKSS 5.1] Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	WTP
		[IKSS 5.2] Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	83
		[IKSS 5.3] Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A
		[IKSS 5.4] Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	81

No	Nama Program	Alokasi
1	Program Pendidikan Tinggi	Rp. 35.426.665.205.000
2	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 4.719.402.666.000
3	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Rp. 1.697.477.745.000
4	Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.296.004.769.000
5	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp. 10.114.863.637.000
6	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp. 13.273.623.279.000
	TOTAL	Rp. 84.528.037.301.000

Jakarta, 27 Desember 2023

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi,**



Nadiem Anwar Makarim



Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis/indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Target Triwulan				Realisasi Triwulan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang									
Angka Kesiapan Sekolah	75,59	0	0	0	75,59	0	0	0	76,54
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	99,32	0	0	0	99,32	0	0	0	99,16
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	96,34	0	0	0	96,34	0	0	0	96,10
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	92,80	0	0	0	92,80	0	0	0	86,34
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	31,89	0	0	0	31,89	0	0	0	31,45
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang									
Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD	0,52	0	0	0	0,52	0	0	0	0,52
Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum									
a. Literasi	59,49	0	0	0	59,49	0	0	0	68,13
b. Numerasi	45,24	0	0	0	45,24	0	0	0	62,51
Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik	30	0	0	0	30	0	0	0	33,03
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	48,83	0	0	0	48,83	0	0	0	52,69
Persentase Peserta Didik Berprestasi yang Difasilitasi Kelangsungan Karir Belajar dan Karir Profesionalnya	5,5	0	0	0	5,5	0	0	0	9,82
Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan/Berwirausaha dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan dengan Gaji/Pendapatan Minimum 1x UMP	45	0	0	0	45	0	0	0	47,88
Persentase Lulusan PT Akademik yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang Dari 1 Tahun dan Mendapatkan Gaji Kompetitif (1.2X UMP)	20	0	0	0	20	0	0	0	31,24



Sasaran Strategis/indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Target Triwulan				Realisasi Triwulan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestariaian Bahasa dan Kebudayaan									
Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	75	0	0	0	75	0	0	0	88,07
Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,20	0	0	0	61,20	0	0	0	55,13
Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan									
Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh Masyarakat	86.500	0	0	0	86.500	10.549	37.918	65.287	75.669
Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel									
Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	WTP	-	WTP	WTP	WTP	-	-	WTP*)	WTP*)
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek	83	0	0	0	83	0	0	0	86,7
Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A	-	-	-	A	-	-	-	BB
Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	81	0	0	0	81	0	0	0	83,79

*) Realisasi tahun 2022